

SIAPA ~~X~~ MENANG



6 PROVINSI
RAWAN
POLITISASI
SARA

PEMILIH MUDA
PENENTU
INDONESIA
EMAS

JOKOWI:
PILIH
PEMIMPIN
BERNYALI

BURUH WAJIB
SEJAHTERA
PENGUSAHA
HARUS LABA

HERMAN DERU
YAKIN GANDENG
MAWADI YAHYA
DI PILGUB SUMSEL



Rp75.000,-

info indonesia

iNOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000

*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON UNTUK PARA PELANGGAN**



Alamat REDAKSI/IKLAN/pemasaran: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

• TELP 021-791 96781 • FAX 021-791 96786

TABLOID REFERENSI PEMILU 2024



TERBIT
TIAP
HARI
SENIN



EDISI
BULAN
OKTOBER
2023

DAFTAR ISI



7

INFO UTAMA

"We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow." (Lord Palmerston 1848)



22

INFO SUMSEL

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara resmi melantik Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni. Tidak perlu menunggu lama, Agus Fatoni harus mampu menyelesaikan lima tugas penting dari negara untuk wilayah Sumatera Selatan.



32

INFO DPR

Rapat Paripurna DPR Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi undang-undang.



38

INFO PEMILU

Sejumlah partai politik diprediksi tak lolos ke Senayan karena dukungannya di bawah ambang batas parlemen atau parliametary threshold 4 persen. Partai yang berstatus non parlemen dan partai baru menjadi yang terancam gagal mengirimkan kadernya ke Senayan tahun depan.



74

INFO MUBA

Menyambut pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan berbagai persiapan terutama mengantisipasi berbagai masalah pada pelaksanaan pesta demokrasi.



76

INFO EKONOMI

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendorong pemangku kepentingan untuk segera mulai membahas kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024. Asosiasi buruh tersebut menilai, pembahasan UMP dapat dilakukan meski tanpa dasar hukum.



87

INFO KHUSUS

Pemberantasan judi online di Indonesia berjalan panjang dan melelahkan. Sudah beberapa kali ganti Menteri Komunikasi dan Informatika, Indonesia masih terus kebanjiran situs macam ini.



3 DARI REDAKSI

20 OPINI

36 INFO MPR

46 INFO PILKADA

80 INFO ISTANA

84 INFO SELEBRITI

86 KAJI

64

INFO NASIONAL

Pemerintah menyiapkan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Aturan ini yang menjadi regulasi acuan penyaluran BBM bersubsidi, Peralite dan Solar, lebih tepat sasaran.

SEDERHANA

Sulit menemukan periode atau jangka waktu tertentu saat Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan berada dalam kondisi ideal dalam perspektif demokrasi. Apalagi di masa pra kemerdekaan. Pertanyaannya, mengapa?

Jawabnya sederhana saja. Demokrasi memang lahir dan berkembang di Barat, pada mulanya. Salah satu yang kerap menjadi tonggak tumbuh dan berkembangnya demokrasi adalah Revolusi Prancis (1789-1799) dengan slogannya yang terkenal: liberte (liberty, kebebasan), egalite (equality, kesetaraan), fraternite (brotherhood, persaudaraan). Kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan hingga kini menjadi landasan demokrasi.

Nah, tiba di negara-negara bukan barat, katakanlah di kawasan Asia, upaya demokratisasi menemukan nilai-nilai lokal yang kadang tetap berbenturan dengan tiga asas demokrasi tadi. Apapun alasannya, kita sulit menemukan demokrasi ideal di negara-negara besar Asia seperti China, India, dan Indonesia. Berbeda misalnya dengan Australia yang memang perjalanan sejarahnya melekat dengan budaya Barat.

Kini, sampailah ke perkembangan pentas politik nasional, khususnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret, Almas Tsaqibbiru. Dalam putusannya, MK menyatakan pasal tersebut "bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Boleh jadi banyak yang tidak puas terhadap putusan itu. Dengan berbagai alasan. Namun, jika ditilik lebih jauh, kebanyakan yang menentang putusan itu menggunakan perspektif Barat, tempat demokrasi berasal. Jadi, kembali lagi, memang ada nilai-nilai demokrasi yang berbenturan dengan realitas politik bangsa-bangsa yang bukan Barat.

Namun, demokrasi masih menyediakan ruang perbedaan gagasan bahkan ideologi. Selanjutnya, rakyat memilih langsung secara bebas gagasan atau ideologi mana yang menjadi pilihannya, melalui pemilihan aktor-aktor politik yang mengusung gagasan dan ideologi tadi.

Kembali ke putusan MK tadi, jelas itu merupakan upaya sengaja melalui jalur hukum yang masih berada dalam kerangka demokrasi. Paling tidak, demokrasinya terlihat dari perbedaan pendapat (dissenting opinion) di antara para hakim MK.

Toh mahkamah yang lebih besar akan berlangsung, yakni Pemilu 2024. Ketika rakyat menentukan pilihannya secara relatif bebas. Apakah akan memilih pengusung putusan MK tadi atau yang menentangnya? Tinggal usaha masing-masing bagaimana meraih dukungan 50 persen plus satu suara rakyat, bahkan lebih besar lagi. Dengan nilai-nilai lokal yang juga beragam dalam perspektif demokrasi. Memang bukan soal sederhana. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

- TELP 021-791 96781
- FAX 021-791 96786

Twitter : @InfoIndonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.idn

Email : redaksi@infoindonesia.id

PENDIRI: Usman Rizal **DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM:** Usman Rizal

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Zulfahmi Jamba **PEMIMPIN REDAKSI:** Gunawan Effendi **WAKIL PEMIMPIN**

REDAKSI: Rahmad Romli **REDAKTUR PELAKSANA:** Rusdiyono **REDAKTUR :** Rio Taufiq Adam, Melati Tagore,

Anugrah Dany, Rifky Ilmi, Budi Prasetya, Ahmad Yani, Yuni Watiana, Mario Ananta, Rahmad KR, Iwan Fals,

Heni Elsa Wulandari, Dedy Sagita, Nina Iskandar, Jifran, Nefri, Indra Hadi, Pahmi Ramadhan, Moehamad

Moeslim, Sadam M, Hardi Aar, Reno, Aldi Rinaldi, M. Iqbal, Andyanto, M. Yadhi, Muhammad Fiqri, Muhammad

Khaidir Boyke Parningotan Hutapea (Bekasi), Dian Taresa (Kalimantan Tengah), Zaki (Kalimantan Timur),

Basri (Kalimantan Utara), Lalu Suparman Ambakti (Nusa Tenggara Barat), Abu Bakar Usman (Kepulauan

Bangka Belitung) **EDITOR & GRAFIS:** Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali

KEUANGAN: Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI :** Nur Aisah **PENGEMBANGAN BISNIS:** RM Solehin,

Zul Jamba **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar **BANK ACCOUNT:** A/N : PT. Wahana Multimedia, BCA : No Rek : 553-

041-4321, KCP Otista Jakarta Timur

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro



GIBRAN PADA AKHIRNYA

"We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow." (Lord Palmerston 1848)

Kita tidak mempunyai sekutu abadi, dan kita tidak mempunyai musuh abadi. Kepentingan kitalah yang kekal dan abadi, dan kepentingan itulah yang menjadi kewajiban kita mengikutinya.

Apa yang dikemukakan oleh Lord Palmerston, Menteri Luar Negeri Inggris di Abad XIX, itu lebih mengarah ke diplomasi dan intelijen. Namun, sudah banyak terbukti, ungkapan itu juga berlaku dalam dinamika politik dalam negeri. Politik dalam negeri Indonesia

tak terkecuali.

Demikianlah, dua kali Pemilihan Presiden Indonesia (pada 2014 dan 2019) menghadapkan Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dalam dua kali pemilihan itu, Joko Widodo terpilih sebagai Presiden. Bagaimana dengan Pilpres 2024 saat Jokowi tak mungkin lagi maju sebagai Capres karena sudah menjadi Presiden dua periode (2014-2024)?

Nah, pada Pilpres 2024, yang tampak adalah persekutuan atau koalisi

antara Prabowo dan Joko Widodo --diwakili oleh putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Prabowo dan Gibran akan berpasangan sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sambil menunggu pendaftaran dan pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum untuk berhadapan dengan dua kandidat pasangan lainnya: Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Rasyid Baswedan-A Muhaimin Iskandar dalam Pilpres yang terjadwal pada 14 Februari 2024.



Tanda-tanda pencalonan Gibran sebagai kandidat Cawapres semakin jelas dengan kedatangannya ke Jakarta pada Sabtu, 21 Oktober 2023. Salah satu agenda putra sulung Jokowi itu menemui Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu, 21 Oktober 2023.

Pertemuan itu berlangsung selama 40 menit. Toh Zulhas tampaknya juga memberikan sinyal positif untuk mendorong Gibran menjadi bakal



cawapres Prabowo.

"Agar Indonesia maju terus, silaturahmi tidak boleh terputus. Bismillah, Mas Wali," ujar Zulhas yang partainya merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo sebagai capres.

Agenda lainnya, ternyata Gibran yang masih aktif sebagai Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah itu, hadir dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar. Di acara itu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumumkan keputusan partainya mengusung Gibran sebagai kandidat cawapres berbasis aspirasi dari DPD partai di 34 provinsi.

"Berdasarkan hasil pertemuan dengan para Ketua DPD tadi malam, Pak, kami rapat cukup lama, cukup hangat tapi semuanya konsensus mengusulkan, saya tanya dulu mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming

para peserta Rapimnas.

"Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirohim, maka saya ketok usulan Golkar yang akan saya serahkan ke Pak Prabowo dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai," ungkapnya.

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo juga hadir dalam Rapimnas Partai Golkar itu. "Kita, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari empat partai parlemen dan empat partai nonparlemen, tapi juga punya akar, dukungan," kata Prabowo di kantor DPP Golkar.

Jadi, sambungnya, biasanya nanti akan rapat. "Musyawarah dan nanti kita umumkan keputusan kita bersama," kata Prabowo.

Tak hanya Golkar, Partai Bulan Bintang (PBB) juga menyatakan mendukung Gibran menjadi bakal cawapres Prabowo. Hal ini disampai-



Raka untuk kita pasang dengan Pak Prabowo sebagai bacawapres Republik Indonesia," kata Airlangga dalam acara Rapimnas Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu, 21 Oktober 2023.

"Apakah setuju?" tanya Airlangga yang dijawab setuju oleh para kader Golkar.

Airlangga kemudian memutuskan kader Partai Golkar sepakat mendukung Gibran. Dia lantas mengetuk palu dan hasil Rapimnas pun disetujui

kan Sekjen PBB Afriansyah Noor usai pertemuan Gibran dengan Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra.

"Jadi insya Allah Pak Yusril secara pribadi sudah legawa, dan beliau mengikhhlaskan Mas Gibran sebagai cawapres pendamping Bapak Prabowo. Jadi jelas itu semua sudah kita lakukan," ujar Afriansyah. "Prabowo Gibran, PBB fixed," ujarnya.

Keesokan harinya, Minggu, 22 Oktober 2023, Zulhas mengemukakan

• INFO UTAMA

pengumuman nama cawapres dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan berlangsung pada hari yang sama malam harinya. "Jadi kita soal wapres, nanya wapres kan ini? Wapres sudah ada satu nama di kantong Pak Prabowo. Nanti malam akan diumumkan. Nanti malam. Nanti malam," kata Zulhas ditemui di acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38 di Tangerang, Banten, Minggu, 22 Oktober 2023.

Peluang Gibran maju sebagai cawapres semakin terbuka menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Amar putusan MK mengenai uji materi itu antara lain:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan permohonan untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone-

DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. "Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya kalau presiden sudah pulang, masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain. Tolong ditanyakan. Saya juga mau tahu jawabannya," kata Puan di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Oktober 2023.

Mengenai ketidakhadiran Jokowi saat PDIP mengumumkan Mahfud MD sebagai cawapres pendamping Ganjar, Puan memaklumi. Puan mengatakan Jokowi memiliki agenda kenegaraan di luar negeri. Dia menganggap



Jadi insya Allah Pak Yusril secara pribadi sudah legawa, dan beliau mengikhlaskan Mas Gibran sebagai cawapres pendamping Bapak Prabowo.

yang mengabulkan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang UU Pemilu terkait kepala daerah di bawah usia 40 tahun (U-40) bisa maju capres atau cawapres pada 16 Oktober 2023. Frasa norma baru kepala daerah dianggap menjadi jalan Gibran memenuhi syarat maju di pilpres meski belum berumur 40 tahun.

MK mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (Unsa) bernama Almas Tsaqibbirru yang intinya MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali yang pernah atau sedang menjabat yang dipilih lewat pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

sia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Menyusul putusan MK tadi, banyak pertanyaan muncul termasuk dari Ketua

ada tugas yang lebih penting untuk dijalankan Jokowi sebagai kepala negara Republik Indonesia.

"Sebagai kader PDI Perjuangan Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh (Arab Saudi)," ucap Puan.

Sedangkan Gibran, usai putusan MK itu malah bergerak menemui beberapa Ketua Umum Partai Politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang semula berada di Koalisi Perubahan. Partai Demokrat berpindah koalisi setelah Koalisi Perubahan memutuskan untuk mengusung pasangan Anies-Cak Imin.

Bagaimana sikap Jokowi yang masih menjabat Presiden hingga Ok-

tober 2024? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku mendoakan dan merestui langkah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang baru disebut-sebut akan maju sebagai Cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

"Ya orang tuanya hanya tugasnya mendoakan dan merestui," kata Jokowi usai menghadiri Apel Hari Santri Nasional 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya, Minggu pagi, 22 Oktober 2023

Lebih lanjut, Jokowi menyebut

Hal itu juga sebagai respons terhadap pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang ingin tahu apakah Jokowi masih mendukung Ganjar Pranowo. Saat ditanya apakah ia cenderung memilih salah satu calon, mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun kembali menegaskan ia mendukung semua kandidat demi kebaikan negara.

"Dukung semuanya. Untuk kebaikan negara ini," tandas Jokowi.

Alhasil, Minggu malam, 22 Okto-

ma, yang dihadiri lengkap oleh ketua umum masing-masing dan sekretaris jenderal masing-masing, kita telah berembuk secara final secara konsensus.

Seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029, dan saudara Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang sudah ditunggu-tunggu.

Ini sekaligus adalah deklarasi yang



bahwa anaknya itu sudah dewasa. Ia pun mengaku tak berhak mencampuri urusan yang sudah diputuskan Gibran. "Keputusan semua sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita," ucapnya.

Di acara yang sama Jokowi menyatakan dirinya tidak memihak dan akan mendukung semua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang maju Pilpres 2024. "Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini," kata Jokowi.

ber 2023 Gibran resmi diumumkan langsung oleh Prabowo Subianto, bersama para ketua umum partai koalisi agar menjadi cawapres di Pilpres 2024. Prabowo menyampaikan keputusan diambil secara konsensus. Berikut pernyataan lengkap Prabowo:

Selamat malam saudara-saudara. Baru saja Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Pri-

kita sampaikan ke masyarakat umum dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU. Demikian, terima kasih. Saya kira tidak perlu ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi, bulat dan konsensus. Dan kita siap maju untuk Indonesia Maju.

Demikianlah dinamika politik yang terasa kian cepat menjelang pendaftaran pasangan kandidat Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024. Selain tak ada musuh dan sekutu abadi, dalam politik tak ada yang terjadi secara kebetulan. ●



5 HARI DENGAN DINAMIKA TINGGI

Lima hari saja Presiden Jokowi berkunjung ke luar negeri. Dalam rentang itu, dinamika politik nasional melaju dengan cepat.

L awatan ke luar negeri itu berlangsung antara 16-20 Oktober 2023. Presiden Joko Widodo dan rombongan menghadiri sejumlah agenda penting, seperti pertemuan bilateral dengan beberapa pimpinan negara hingga menghadiri forum internasional.

Menko Marves ad interim Erick Thohir yang mendampingi Presiden mengatakan dalam forum itu berlangsung 11 penandatanganan dokumen kesepakatan. Kesepakatan ini mencakup angka investasi mencapai US\$12,6 miliar atau Rp197,8 triliun (Kurs Rp 15.700/US\$) dari sektor energi hingga teknologi kesehatan.

"Kerja sama senilai US\$12,6 miliar ini terjalin antara perusahaan swasta-swasta, BUMN-swasta, maupun BUMN-BUMN. Ini untuk memperkuat pengembangan industri baterai listrik, energi hijau, dan teknologi kesehatan di tanah

air, agar bisa meningkatkan pembukaan lapangan pekerjaan," mengutip akun instagram resmi Erick Thohir.

Sedangkan di dalam negeri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang mendampingi Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. "Hari ini, Rabu 18 oktober 2023 saya dengan mantap diri saya ambil keputusan ke semua, saya tujukan sebesar-besar bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara dengan ucapkan bismillahirrahmanirrahim calon wakil presiden yang dipilih PDIP yang akan dampingi Ganjar Pranowo adalah Prof Dr Mahfud MD," ujar Mega di Kantor DPP PDIP.

Pengumuman Mahfud sebagai bacawapres tersebut dihadiri oleh para ketua umum partai politik pengusung dan pendukung bacapres Ganjar Pranowo.



Selain Mega sebagai Ketua Umum PDIP, hadir Plt Ketua Umum DPP PPP Mardiono, Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. Sebelumnya, para ketum parpol pengusung dan pendukung Ganjar menggelar pertemuan pada Selasa, 17 Oktober 2023. Pertemuan ini mengarah ke kesepakatan menunjuk sosok cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

Ganjar sebelumnya dideklarasikan sebagai calon presiden yang diusung oleh PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sejak 21 April 2023. Mahfud akhirnya dipilih dari sejumlah nama yang santer disebut-sebut sebagai kandidat cawapres Ganjar, antara lain Khofifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno hingga Ridwan Kamil. Toh nama Menko Polhukam itu tampak makin pasti setelah bertemu dengan Mega pada Rabu malam.

Mega menyebut Mahfud MD merupakan sosok berpengalaman nyata dalam pemerintahan. Sedangkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengemukakan penetapan Mahfud sebagai bacawapres Ganjar merupakan momentum yang penting bagi para elite partai politik pengusung Ganjar Pranowo sebagai Presiden.

Usai mengumumkan nama Mahfud

MD sebagai bacawapres untuk mendampingi Ganjar, Mega berulang kali memuji sosoknya. Ia mengungkapkan, Mahfud MD adalah sosok yang disebutnya "tidak asing", karena pernah bersama-sama menahkhodai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. "Saya bisa mengerti dari cara berpikir, jalan pikirannya," kata Mega yang menyebut Mahfud sebagai sosok intelektual mumpuni.

Dia juga menyebut Mahfud memiliki pengalaman yang lengkap di legislatif, eksekutif dan yudikatif. Secara khusus, Mega menilai Mahfud merupakan pendekar hukum, dan pembela wong cilik yang jujur, bernyali. "Beliau bisa menjadi

wasit yang baik di tengah persaingan politik dan bisnis yang sering dirasakan tidak adil," kata Mega yang mengatakan Mahfud bertugas mereformasi sistem hukum nasional untuk mewujudkan wajah keadilan sejati.

Sedangkan Mahfud MD dalam pidatonya mengemukakan penetapan dirinya sebagai pendamping Ganjar dalam Pilpres 2024 merupakan kehormatan dan kebanggaan. "Saya diberi amanah mengemban tanggung jawab yang besar dan mulia bersama Mas Ganjar meneruskan cita-cita Bung Karno dan para pendiri negara lainnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil,



• INFO UTAMA

makmur dan sejahtera,” ujar Menko Polhukam ini.

Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, sambungnya, ia fokus pada

bersedia untuk ikut kontestasi,” tegas Mahfud.

Selanjutnya Mahfud bersama dengan pasangannya, Ganjar Pranowo

jud jika kita memenuhi sejumlah syarat, yakni ideologi bangsa kokok, ekonomi baik, hukum dan keadilan ditegakkan, politik yang demokratis, budaya gotong royong yang hidup, serta mengedepankan persaudaraan,” kata Mahfud.

Dia kemudian menekankan bahwa prioritas pemberantasan korupsi, kepastian hukum dan konsistensi dalam implementasi penegakannya, memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi, serta memberikan perlindungan pada masyarakat.

Mahfud menegaskan pula pentingnya demokrasi dan nomokrasi berjalan seiring dan seimbang. “Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, sedangkan nomokrasi adalah kedaulatan hukum.

Demokrasi tanpa nomokrasi akan anarkis. Sementara nomokrasi tanpa demokrasi akan sewenang-wenang. Sehingga keduanya harus berjalan seiring dan seimbang,” sambungnya.

Indonesia yang beragam, lanjut Mahfud, membutuhkan toleransi dan akseptasi, perlindungan pada masyarakat lemah, serta rasa kasih sayang kepada wong cilik. “Saya berkeyakinan, Mas Ganjar adalah figur yang tepat memimpin bangsa Indonesia untuk mewujudkan semua cita-cita yang saya sebutkan tadi, dan mempercepat pembangunan yang sudah baik,” ungkap Mahfud.

Mahfud mengaku mengenal Ganjar sejak lama. Sejak 2004 hingga 2008 keduanya sama-sama menjadi anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keduanya juga sering bertemu ketika Ganjar menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Mahfud MD menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi.

“Saya tahu persis Mas Ganjar adalah figur pemimpin yang merakyat dan berani. Berani memperbaiki yang bengkok-bengkok, berani menerima kritik, berani memperjuangkan nilai-nilai politik yang diyakini benar,” ujarnya.

Sedangkan Ganjar mengemukakan dirinya bersama Mahfud mendapat amanah yang penuh dengan tantangan untuk berjuang bersama rakyat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. “Alasan kami hanya satu, kami ingin bekerja dengan tulus, sepenuh hati untuk rakyat Indonesia,” tegas Ganjar.



tugasnya untuk memastikan pemilu berjalan lancar, sehingga selama dia tak pernah menyatakan ikut dalam kontestasi pemilu 2024. Kali ini ia menyatakan bersedia. “Saya menyatakan

akan melanjutkan upaya cita-cita menuju Indonesia emas, yakni ketika Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil dan beradab pada 2045 “Dalam menyongsong Indonesia emas 2045 akan terwu-

Ganjar kemudian menjelaskan bahwa pengumuman dirinya dan Mahfud sebagai capres dan cawapres Koalisi PDIP menjadi tonggak sejarah untuk menyongsong Indonesia yang lebih adil, yang diperjuangkan oleh pemimpin yang mendengar langsung suara rakyat dan pemimpin yang mau berkerjingat bersama rakyat. "Mulai detik ini mari bergerak bersama mewujudkan mimpi seluruh anak bangsa di mana pun berada tanpa terkecuali. Ini bukan perjuangan yang mudah," katanya.

Namun, dia yakin dengan semangat bersama Indonesia akan mencapai masa depan yang jauh lebih baik. "Inshaallah, bismillah, kami siap," tegas Ganjar, diikuti anggukan kepada Mahfud di sampingnya.

Dia mengatakan bahwa dirinya dan Mahfud ingin bergerak cepat seperti yang diinginkan rakyat, bukan hanya untuk maju, tapi juga mewujudkan Indonesia unggul. "Ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang seorang Mahfud, bukan pula tentang kekuasaan. Bukan sama sekali. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Di bawah kepemimpinannya di masa mendatang, Ganjar ingin memastikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat, tak hanya dalam wilayah tapi juga politik, pangan, ekonomi, sosial, dan kedaulatan digital.

"Kita dobrak kemiskinan yang masih menjerat rakyat dengan menyediakan kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali," katanya.

Pemerintahan di masa mendatang, lanjut Ganjar, harus bekerja lebih keras dan lebih tegas, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. "Tegas, hitam putih, benar salah dan tidak abu-abu."

Ganjar juga bertekad semua potensi alam Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun ia juga menegaskan perlunya kelestarian alam untuk generasi selanjutnya.

Toh semua pernyataan-pernyataan politik itu tanpa kehadiran Presiden Jokowi yang berada di luar negeri. Mengenai hal ini, Ketua TPN Ganjar-Mahfud MD, Arsjad Rasjid, membantah pengumuman ketika absennya Jokowi di Ja-

karta karena PDIP tidak melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta. "Enggaklah. Pak Jokowi, kan, memang berangkat. Kita, kan, enggak tahu schedule-nya gimana, ya, kan?" kata Arsjad Sabtu, 21 Oktober 2021.

Arsjad justru mengatakan pihaknya telah memberi tahu Jokowi jika ingin mengusung Mahfud sebagai cawapres. "Kami TPN, ini pemilu, ya, kan. Kalau diskusi tadi saya katakan pilihan siapa pasti sudah ada diskusi. Kenapa? He is the current CEO. Pasti tahu, dong, dia yang tahu punya masalah. Tapi waktu pendaftaran, kan, enggak perlu ini [dilaporkan] beliau," ujarnya.

Saat pengumuman Ganjar sebagai capres, Jokowi memang ikut hadir. Sehingga, baik ketika pengumuman Mah-

bukan yang kalau memang SOP-nya harus ke sana, ya, pasti. Tapi tadi balik lagi bahwa mengenai program ke depan, pemikiran bagaimana pasti Pak Jokowi diajak bicara," ujarnya.

"Beliau Presiden yang sekarang, beliau yang paling tahu apa tantangan yang dihadapi ke depan dan kurang lebih karakter, personality apa yang diperlukan ke depan bagi seorang presiden," tandasnya.

Toh perkembangan berlanjut setelah Presiden mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu, 21 Oktober 2023 dinihari setelah melawat ke China kemudian Arab Saudi. Selama di Arab Saudi, salah satu kegiatan yang dihadiri Presiden Jokowi adalah Konferensi Tingkat



fud cawapres tidak ada Jokowi bukan karena tidak menghargai dia.

"Itu bukan tidak menghormati, lho, bukan gitu. Jadi tidak akan melihatnya: 'Wah ini gara-gara Pak Jokowi', enggaklah. Ini, kan, sebagai proses. Tanggal 19 ada ini, kan, bagaimana kita punya deadline tanggal 25, kita mesti masukin, kalau ada yang kurang masih ada waktu lagi," jelasnya.

Demikian pula ketika pendaftaran Ganjar-Mahfud yang dilakukan sehari setelahnya, yaitu 19 Oktober 2023. Menurut Arsjad, untuk pendaftaran tidak perlu harus lapor ke Jokowi.

"Kalau dalam konteks ini, kan, namanya juga ini, kan, pemilu. Ini, kan, proses,

Tinggi (KTT) ASEAN-GCC (Gulf Cooperation Council).

Setelah kedatangan Presiden dari luar negeri, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming bergerak menemui sejumlah ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Gibran juga hadir dalam Rapimnas Golkar yang mendukung pencalonannya sebagai kandidat Cawapres.

Alhasil tiga pasangan Capres dan Cawapres tersusun sudah. Pasangan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin Iskandar malah sudah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum pada Kamis, 19 Oktober 2023. Pasangan Prabowo-Gibran menyusul kemudian. ●

SAMA-SAMA TERBELAH

Kalkulasi politik perolehan suara dalam Pilpres 2024 kian rumit dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan kandidat Cawapres berpasangan dengan kandidat Capres Prabowo Subianto. Suara nasionalis maupun Islam politik sama-sama terbelah.



Tiga pasangan Capres dan Cawapres sudah tersusun. Tinggal bagaimana meraih dukungan terbesar pemilih untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Toh sulit mengelak bahwa pasangan Capres dan Cawapres menunjukkan basis politik yang terbelah. Pasangan pertama yang mendaftar adalah Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar. Selanjutnya, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dari dua pasangan itu, masing-masing kandidat cawapresnya berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU), organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam den-

alnya, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sudah jelas merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan oleh elite politik dengan afiliasi kuat kepada NU. Sedangkan Mahfud MD, pasangan Ganjar Pranowo, juga memiliki latar belakang NU yang kuat di samping pernah aktif di PKB juga.

Lalu muncul pasangan ketiga, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pasangan ini dianggap berpotensi membelah kubu politik nasionalis yang dimotori Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah mengusung Capres Ganjar Pranowo. Sedangkan Gibran

“PDI Perjuangan ini Partai Banteng. Semakin ditekan semakin semangat. Munculnya Prabowo-Gibran justru akan menjadi kontras dengan Ganjar-Mahfud MD. Terlebih Ganjar Pranowo-Mahfud MD dikenal visioner, punya nyali, dan perpaduan antara harapan percepatan daya unggul bangsa dan ketegasan dalam menegakkan keadilan. Positioning Prof Mahfud MD sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik menjadi semangat anti-KKN yang lahir kembali dengan daya semangat yang lebih besar,” kata Hasto dalam keterangannya, Senin, 23 Oktober 2023.

Hasto mengatakan PDIP bersama



gan pengaruh terbesar di Indonesia.

Dari dua pasangan yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada hari pertama, Kamis, 19 Oktober 2023, masing-masing kandidat cawapresnya berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU), organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dengan pengaruh terbesar di Indonesia. Pasangan Anies mis-

selain putra Presiden Joko Widodo yang masih menjabat, masih berstatus kader PDIP.

Jadi jelas pencalonan Gibran akan memicu tanggapan, bisa positif atau negatif dari PDIP. Menanggapi pencalonan Gibran, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah mengemukakan sikap partainya.

PPP, Perindo, dan Hanura serta rekan semakin yakin kalau jalan politik mereka berdasarkan nilai moral dan etika politik. Dia pun semakin yakin Ganjar-Mahfud siap bertarung di 2024.

“Namun pada saat bersamaan kami meyakini bahwa Ganjar Pranowo-Mahfud MD semakin mantap berkontestasi, bertarung dalam gagasan bagi

• INFO UTAMA

daya unggul bangsa di masa depan, dan memiliki nyali karena berdiri kokoh dalam tuntunan mata hati rakyat. Semangat rawe-rawe rantas, malang-malang putung kini bergelora dengan keyakinan satyam eva jayate," ujarnya.

Dia meminta seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP tetap bijak dan berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala dengan mengedepankan persuasi yang baik, strategi yang tepat, dan bersemangat turun ke bawah. Menurut Hasto, politik sejatinya digerakkan oleh dedikasi bagi bangsa dan negara, berjuang untuk rakyat, bukan bagi kepentingan keluarga.

"Ketika mandat rakyat bahwa kekuasaan itu untuk kepentingan se-

ini. Artinya kita menghargai pasangan Prabowo-Gibran sebagai pilihan dari Koalisi Indonesia Maju," kata Ketua DPP Nasdem Charles Meikyansyah kepada wartawan, Senin, 23 Oktober 2023.

NasDem mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo-Gibran. Dia berharap pertandingan di pemilu nanti menghasilkan kompetisi yang sehat dan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

"Kita ucapkan selamat, bagaimanapun kita ingin berkompetisi dalam kompetisi yang baik, sehat, yang bisa memberikan pendidikan bagi masyarakat Indonesia bahwa pertandingan ini adalah pertandingan yang memberikan warna bagi Indonesia

bagaimana kemudian orang-orang yang bicara ke publik itu memberikan keterangan yang clear, yang baik dan tidak memberi kebingungan di masyarakat, sekaligus membangun bahwa politik apalagi dalam kompetisi politik saat ini sekali lagi yang kita bangun adalah persatuan dan kesatuan bangsa," lanjut Charles.

Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni sudah mengucapkan selamat untuk pasangan Prabowo-Gibran. "Selamat buat Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah resmi menjadi bacapres dan bacawapres pada pertarungan 2024 mendatang," kata Sahroni kepada wartawan, Minggu, 22 Oktober 2022.

Sahroni mendoakan agar proses pendaftaran berjalan dengan lancar. "Saya doakan lancar dalam proses pendaftaran ke KPU-nya, sekali lagi selamat dan sukses," jelasnya.

Sahroni menyebut pertarungan Pilpres 2024 akan semakin menarik. Namun NasDem, kata Sahroni, akan melakukan segala upaya untuk memenangkan pasangan yang diusungnya yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Strateginya makin menarik, karena kita melawan pada calon yang beda status. Tapi kami siap bertarung dengan segala upaya memenangi pertarungan 2024 akan datang," kata Sahroni.

Toh di balik tanggapan itu, secara akademis koalisi partai politik di Indonesia merupakan kombinasi pengaruh banyak faktor. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syaif Hidayatullah Jakarta Saiful Mujani menyebutkan setidaknya enam faktor yang dapat mempengaruhi partai politik (parpol) menjalin koalisi saat pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres).

Pertama, kesamaan platform partai atau ideologi. "Setidaknya ada enam faktor yang bisa mempengaruhi partai politik bisa berkoalisi dan mendukung satu pasangan tertentu," kata Saiful dalam program Bedah Politik episode "Prabowo-Puan vs Ganjar-Airlangga atau Anies-AHY?" yang mulai tayang di kanal Youtube SMRC TV, sejak April 2023

Ideologi dimaksud dalam konteks



luruh bangsa dan negara, lalu dibelokkan menjadi ambisi, maka semua wajib bergerak dengan penuh keyakinan karena Ganjar-Mahfud MD berpihak pada kebenaran," ujar Hasto.

"Satyam Eva Jayate Pada akhirnya kebenaranlah yang akan menang!" kata Hasto.

Sedangkan Partai NasDem yang menjadi pengusung awal pasangan Anies-Cak Imin menegaskan Ketua Umumnya, Surya Paloh, menghormati keputusan di tiap partai. "Pada prinsipnya Pak Surya Paloh menghormati setiap putusan oleh setiap parpol karena itu adalah hak otonomi tiap partai menentukan siapa yang terbaik dari mereka untuk menentukan pasangan

jauh lebih baik ke depan jauh lebih dinamis ke depannya," ucap Charles.

Charles mengungkap dalam pertemuan internal ini, Surya Paloh juga memberikan arahan kepada kader yang kerap tampil ke publik. Surya Paloh meminta kadernya untuk memberikan penjelasan yang tidak membingungkan masyarakat.

"Hari ini pertemuan Pak Surya pimpin adalah arahan kepada mereka-mereka yang sering bicara ke publik, kita kan sering lihat di layar ada Pak Taufik Basari, Bestari Barus, Hermawi Taslim, Charles Meikyansyah, Ahmad Sahroni, Ahmad Ali dan lain-lain," ujarnya.

"Hari ini agendanya adalah

Indonesia, yakni partai yang lebih nasionalis atau kebangsaan, partai lebih pluralis dalam pengertian inklusif terhadap pelbagai identitas. "Di sisi yang lain ada partai yang lebih menekankan Islam, lebih eksklusif karena Islam lebih diutamakan, kurang terbuka pada semua unsur yang beragam dalam masyarakat Indonesia," ujar Saiful.

Saiful menilai ada dua kutub ideologi politik di Indonesia. Kutub yang paling nasionalis adalah PDI Perjuangan (PDIP). Sementara kutub yang paling Islam ialah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebab, jarak ideologisnya jauh, antara PDIP dan PKS, maka kemungkinan untuk bersama-sama di tingkat nasional tidak mudah.

"Sementara partai-partai dalam spektrum antara PDIP dan PKS bisa

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, menurut Saiful, Nasdem dan Gerindra juga tidak mudah untuk bertemu. Dua partai itu memiliki pengalaman tersendiri tentang itu. Belakangan, Nasdem dan PDIP juga tidak mudah berkomunikasi dan suasana kebatinan di antara elit partai akan mempengaruhi formasi koalisi," ujarnya.

Ketiga, adanya tiga partai besar yang sangat berpengaruh untuk menjadi atau menarik poros koalisi. Partai dimaksud, yaitu PDIP yang tanpa koalisi pun sudah cukup untuk mencalonkan presiden. Kemudian, Gerindra dan Golkar yang masih membutuhkan tambahan sedikit tambahan suara.

Keempat, intensitas harus menjadi

Saiful menunjukkan dalam dua tahun terakhir, belum ada perubahan signifikan dalam komposisi dukungan pemilih terhadap calon. Tiga besar yang mendapatkan dukungan terbanyak dari publik adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. "Prabowo dan Ganjar sudah seimbang. Sementara dalam setahun terakhir, Maret 2021 sampai Maret 2022, Ganjar dan Anies mengalami kemajuan," ungkapnya.

Keenam, Nahdlatul Ulama (NU). "NU juga ikut berpengaruh, setidaknya untuk calon wakil presiden," ucap Saiful. Saiful mengatakan Megawati Soekarnoputri dan PDIP cenderung akan berkoalisi dengan tokoh-tokoh NU. "Megawati menggandeng Hasy-



Prabowo dan Ganjar sudah seimbang. Sementara dalam setahun terakhir, Maret 2021 sampai Maret 2022, Ganjar dan Anies mengalami kemajuan.

berkoalisi dilihat dari sisi ideologi, misalnya PDIP dengan Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem," tutur Saiful.

Kedua, komunikasi elite. Hal ini dinilai sangat menentukan. Saiful mengatakan sejak Pilpres 2004 sampai sekarang, terlihat PDIP dan Demokrat tidak mudah untuk melakukan komunikasi.

"Ketika Demokrat berkuasa dan SBY sebagai presiden, PDIP memilih sebagai partai oposisi. Ketika PDIP berkuasa, sebagai partai terbesar pendukung pemerintah, Demokrat sebenarnya ingin bergabung sebagai partai pendukung pemerintah, tetapi PDIP nampaknya tidak menerima," ujar Saiful.



calon presiden (capres). Ada partai yang pimpinannya harus menjadi capres, yaitu Gerindra. Saiful menyatakan kemungkinan pertimbangannya adalah efek Prabowo Subianto terhadap Gerindra. Sementara, partai-partai lain tidak sekuat dukungan Prabowo. Misalnya, Golkar dengan Airlangga Hartarto belum terlalu yakin maju sebagai nomor satu atau tidak.

"Demikian juga Puan Maharani. Walaupun partainya besar, juga belum kuat didorong untuk menjadi calon presiden. Karena itu, faktor Prabowo menjadi sangat penting, karena dia akan maju menjadi nomor satu," kata Saiful Mujani.

Kelima, elektabilitas bakal calon.

im Muzadi (pada 2004), tahun 2014 Jokowi-Jusuf Kalla, dan tahun 2019 Jokowi-Ma'ruf Amin. Ada kecenderungan PDIP memilih tokoh NU sebagai calon wakil presiden," ujarnya.

Namun perkembangan terbentuknya pasangan Prabowo-Gibran memang menambah kerumitan kombinasi nasionalis dan Islam politik. Baik kelompok nasionalis maupun kelompok Islam politik sama-sama terbelah dalam koalisi dan pasangan Capres-Cawapres yang terbentuk.

Bagaimana konfigurasinya kelak? Hasil Pemilu dan Pilpres 2024 akan menjadi jawaban yang paling sah, dengan syarat proses pemilihan yang jujur dan adil juga terwujud. ●

INDONESIA, JOKOWI, DAN MEGAWATI PASCA-2024

Meskipun sempat merebak kabar yang tidak benar alias hoaks di media sosial bahwa Amerika Serikat menolak mengundang Indonesia dalam KTT APEC di negaranya, kenyataannya ternyata terbalik. Presiden Joko Widodo justru akan hadir bersama delegasi RI dalam perhelatan kerja sama ekonomi negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik pada November di San Francisco, AS, itu.

Menariknya, kabar hoaks menyebutkan Indonesia ditolak hadir oleh negara-negara anggota APEC karena kebijakan hilirisasi yang ditempuhnya, yang membuat kerugian ekonomi bagi sejumlah negara maju dan adikuasa, seperti AS, Kanada, Australia, dan Korea Selatan.

Jokowi dan figur Soekarno

Jika dilihat dari kacamata dunia internasional, kebijakan dan politik hilirisasi Presiden Jokowi itu pasti dinilai sangat berani karena Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, hutan, tambang, mineral, dan lainnya tak mau lagi mengeksport bahan baku mentah tambang ke luar negeri, seperti bijih nikel.

Indonesia justru akan mengolahnya terlebih dulu dan baru akan mengirimkan ke negara-negara maju yang membutuhkan barang jadi dari hasil tambang tersebut. Dengan mengirimkan bahan jadi yang sudah diolah sendiri oleh pabrik dan smelter di Indonesia, keuntungan Indonesia bisa berlipat ganda ketimbang harus mengirim bahan mentah.

Jadi, politik hilirisasi adalah upaya, kebijakan, dan strategi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki dan tersimpan di Tanah Air untuk kepentingan sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Presiden Jokowi meyakini, politik hilirisasi akan menjadi lompatan besar peradaban negara dan kemajuan bangsa.

Apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan politik hilirisasi mengingatkan kita pada sikap dan kebijakan politik Bung Karno di masa kejayaannya. Sangat sedikit pemimpin dunia yang berani bersikap dan menyatakan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa karena PBB dinilai tidak berpi-

hak pada kepentingan negara-negara yang belum merdeka.

Presiden Soekarno juga kecewa dengan PBB yang tidak optimal membantu memperjuangkan pembebasan Irian Barat dari kangkangan Belanda dan negara-negara sekutunya yang berkuasa di PBB sejak 1960.

Untuk menekan AS dan PBB, Bung Karno yang pidatonya di PBB pada 30 September 1960 oleh UNESCO dijadikan salah satu Memori Dunia (Memory of the World) pada Mei 2023- pun meningkatkan relasi dan komunikasinya dengan pemimpin Uni Soviet yang waktu itu masih menghadapi masa Perang Dingin dengan Amerika.

Amerika akhirnya terpaksa mendesak Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia setelah melihat bahwa Indonesia sudah siap untuk melakukan invasi ke Irian Barat melalui Operasi Jaya Wijaya.

Keberanian dan sikap tegas Bung Karno sebagai pemimpin di negara baru yang belum lama merdeka dan terus berada di bawah ancaman negara-negara eks penjajah, mulai dari Belanda, Jepang, Inggris, dan Portugis, kini diikuti Presiden Jokowi, di antaranya dengan politik hilirisasi dengan tidak menggadaikan begitu saja komoditas penting dari Indonesia dengan harga murah.

Itulah yang dilakukan Presiden Jokowi untuk menunjukkan usaha dan sikapnya merealisasikan prinsip Trisakti Tavip yang tujuannya adalah

berjuang membuat NKRI Berdiri di Atas Kaki Sendiri (Berdikari) di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian di bidang budaya.

Tavip sendiri merupakan singkatan Tahun Vivere Pericoloso, sebuah ungkapan Italia yang artinya "hidup menyerempet-nyerempet bahaya".

Sebelum mengakhiri kepemimpinannya satu tahun lagi pada 20 Oktober 2024, Presiden Jokowi merasakan tekanan-tekanan dari luar negeri di bidang ekonomi ketika kebijakannya untuk membuat lompatan kemajuan ekonomi, di antaranya dengan melarang ekspor bijih nikel, mendapat protes keras dari Uni Eropa.

UE menggugat Indonesia melalui Organisasi Perdagangan



Oleh: Guntur Soekarno Putra
Putra Sulung Presiden Ke-1 RI
Ketua Dewan Ideologi DPP
Persatuan Alumni GMNI

gan Dunia (WTO) pada awal 2021. Padahal, sebagai akibat kebijakan Jokowi itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 18 September 2022, nilai ekspor komoditas turunan nikel meningkat signifikan sejak diterapkan larangan ekspor bijih nikel pada awal 2020.

Nilai ekspor komoditas turunan nikel pada Januari-Agustus 2022 juga mencapai USD12,35 miliar atau tumbuh hingga 263 persen jika dibandingkan tahun 2019. Sebelum diterapkannya larangan ekspor bijih nikel, nilai ekspornya hanya USD3,40 miliar.

Dengan gayanya yang khas, rupanya selama ini Presiden Jokowi juga bertekad melanjutkan program-program Presiden

Mengingat pemikiran dan pengalamannya yang tentu masih sangat dan sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini, hal itu perlu dipertimbangkan. Namun, mungkinkah Jokowi dapat meneruskan estafet kepemimpinan di sebuah parpol yang menjadi pendukung pemerintah selama ini?

Jawabannya adalah, apakah ada jaminan pasca-Pemilu 2024, Megawati Soekarnoputri masih tetap menjadi Ketua Umum PDIP? Mengingat usianya tidak muda lagi -pada 23 Januari 2024, usia Megawati akan mencapai 77 tahun- tentu kita harus memikirkan bilamana Adis -begitu penulis kerap menyapa Megawati sejak kecil- tidak lagi menjadi ketua umum PDIP.



Soekarno yang belum terlaksana, seperti pemindahan ibu kota ke Kalimantan, mendirikan angkatan perang yang kuat, dan mengadakan kerja sama yang erat dengan China.

Jokowi dan Megawati Pasca-2024

Setelah Jokowi mengakhiri tugasnya pada tahun depan, di mana posisi yang tepat dan pas baginya sebagai mantan presiden ke-7 RI? Jadi apakah seorang Jokowi nanti? Apakah ia tidak menghendaki harus menjadi "apa dan siapa-siapa" seperti apa yang ia pernah utarakan beberapa waktu lalu?

Saat ditanya wartawan jika ia selesai menjalankan tugasnya pada Oktober 2024, Jokowi menjawab ia akan undur diri dan kembali ke kota asalnya, Solo, sebagai warga negara biasa.

Dari sudut pandang penulis, dengan melihat tantangan geostrategis masa datang dan relasinya dengan banyak tokoh, sejumlah kalangan dan wong cilik di mana pun selama ia menjabat sepuluh tahun menjadi presiden, kepala pemerintahan, dan kepala negara, Jokowi dibutuhkan untuk tetap berada dalam lingkaran kekuasaan dan pemerintahan. Bukan sebagai presiden, melainkan paling tidak Jokowi harus menjadi ketua umum sebuah partai politik.

Bilamana seperti itu, apakah tak mungkin Jokowi meneruskan estafet kepemimpinan di PDIP sebagai ketua umum dan Megawati menjadi ketua dewan pembinaanya?

Mengapa bukan kader atau pengurus atau tokoh senior di Dewan Pimpinan Pusat PDIP lainnya yang memimpin PDIP karena selama ini mereka notabene adalah kader militan dan "anak-anak ideologis" Bung Karno di PDIP?

Jawabannya, Jokowi pun anak ideologis Bung Karno karena selama sepuluh tahun menjadi wali kota Solo, dua tahun lebih menjadi gubernur DKI Jakarta, dan nanti sepuluh tahun menjadi presiden RI -yang berarti selama 22 tahun di pemerintahan- Jokowi konsisten melaksanakan ide-ide Bung Karno.

Langkah Jokowi untuk dapat menjadi ketua umum PDIP ini sangat dimungkinkan dan sudah barang tentu hal ini kalau mau dilakukan harus diputuskan melalui suatu kongres luar biasa PDIP yang benar-benar demokratis. Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina, dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya.

Masalahnya adalah, apakah Megawati, Jokowi, dan partai mau? •



LANGSUNG FOKUS PADA 5 TUGAS PENTING

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara resmi melantik Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni. Tidak perlu menunggu lama, Agus Fatoni harus mampu menyelesaikan lima tugas penting dari negara untuk wilayah Sumatera Selatan.

Menurut Mendagri, pelantikan penjabat gubernur Sumatera Selatan ini sesuai dengan keputusan presiden tentang pemberhentian gubernur dan wakil gubernur yang telah mengakhiri masa jabatannya, serta keputusan presiden tentang pengangkatan penjabat gubernur dengan masa jabatan paling lama satu tahun.

"Penjabat mengisi kekosongan sampai dengan pilkada serentak nanti. Saya paham betul dua-duanya ini memiliki kemampuan dan kapabilitas yang sangat mumpuni tentang pemerintahan. Dua-duanya dari lulusan IPDN. Jadi, memang bidang pemerintahan, serta memahami tentang prinsip-prinsip pemerintahan otonomi daerah," ungkapnya.

Mendagri Tito Karnavian mengakui, Agus Fatoni memiliki pengalaman menjadi penjabat gubernur, di

mana sebelumnya pernah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Utara.

"Tentu tugas utama yang paling penting bagi saya adalah mereka bisa membuat pemerintahan tetap berjalan, running, jangan sampai terjadi kekosongan. Setelah itu saya minta juga mereka melakukan hal-hal yang menjadi prioritas, baik nasional maupun daerah. Misalnya tentang penurunan angka stunting, penurunan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, dan mengendalikan inflasi," tuturnya.

Terkhusus untuk di Sumsel, pesan Mendagri, penjabat gubernur diminta untuk terus melakukan hal-hal yang menjadi prioritas, seperti pembangunan jalan dan Pelabuhan. Selain itu, yang paling penting dan krusial adalah untuk menindaklanjuti penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).



“Terhusus ini saya minta untuk tangani karhutla, karena kualitas udara di Kota Palembang tidak sehat, titik kebakaran segera dikerjakan bersama forkopimda,” tambahnya.

Mendagri secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih untuk pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2018-2023 yang telah mengakhiri masa tugasnya.

“Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Sumsel dan Wakil Gubernur Sumsel yang sebelumnya, yakni Bapak Herman Deru dan Bapak Mawardi Yahya atas kerja keras dengan pengabdianya,” terangnya.

Sementara, Penjabat Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, menegaskan, setelah resmi dilantik, dirinya segera melaksanakan tugas sesuai dengan arahan Mendagri. Khususnya penurunan stunting, mengendalikan inflasi, penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, serta mengendalikan Karhutla dan pelaksanaan pilkada.

“Karhutla segera kita tangani, kemudian kemiskinan ekstrem, stunting, penanganan inflasi, serta tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan lainnya yang selama ini harus dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya,” ungkapnya.

Menurut Agus Fatoni, untuk menyelesaikan semua permasalahan ini, dia akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD, Forkopimda, dan akan konsolidasi internal bersama Pemrov Sumatera Selatan.

Dalam upaya penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan inflasi yang menjadi prioritas nasional, Agus juga akan mengajak seluruh pihak bersama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan TNI/Polri bekerja sama.

Terkait dengan agenda Pilkada Serentak 2024, Agus Fatoni menegaskan, Pemrov dan Pemkab/Pemkot wajib mengalokasikan dana 40 persen pada 2023 dan 60 persen di 2024.

Pulang Kampung

Sosok Agus Fatoni sebetulnya bukan orang asing bagi masyarakat

Sumatera Selatan. Sehingga kedatangannya dapat diibaratkan seperti pulang kampung untuk membangun Sumsel agar makin sejahtera.

“Ya ini kami mau pulang kampung, pulang kampung ya bersama-sama membangun kampung kita, dan kemudian kita membuat masyarakat kita semakin sejahtera,” ucap Agus Fatoni.

Agus Fatoni mengatakan banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan bersama-sama. Dia telah mem-

karhutla di sejumlah wilayah Sumsel.

Agus Fatoni mengajak seluruh stakeholder terkait, mulai dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota, forkopimda, dan sektor swasta untuk menangani secara bersama-sama.

“Apalagi ini cuacanya sedang seperti ini (El nino), dan ini (penanggulangan) bisa kita lakukan kalau kita bersama-sama. Kalau kita kompak, baik dari pemrov/kabupaten/kota, forkopimda dan kemudian swasta dan masyarakat kita. Karena ini tang-



prioritaskan sejumlah program yang akan diselesaikannya selama menjabat.

Program-program tersebut di antaranya terkait karhutla, pengendalian inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, dan Pilkada 2024. Terlebih, saat ini Indonesia tengah dilanda kemarau yang disebabkan oleh El Nino. Salah satu dampaknya adalah terjadi

gung jawab kita bersama,” ucap Agus Fatoni.

Agus Fatoni diketahui lahir pada 6 Juni 1972. Dia adalah birokrat Indonesia yang merupakan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada 1994 atau angkatan ke-3 yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. •rhd/***



GERAK CEPAT TANGANI KARHUTLA SUMSEL

Penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu fokus utama Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni, dengan menyiapkan alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut.

Agus Fatoni menyebut penanganan Karhutla merupakan tanggung jawab bersama dari semua pihak. Selain itu, dukungan dan kerja sama dari TNI/Polri, DPRD, bupati/wali kota dan seluruh masyarakat Sumsel sangat dibutuhkan.

Menurutnya, tanggung jawab penanganan karhutla tidak dapat dibebankan pada salah satu pihak. Melainkan butuh kerja sama yang terintegrasi, termasuk di dalamnya pihak swasta atau korporasi. Terlebih, penanganan Karhutla ini menyangkut keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat Sumsel.

"Saya yakin seluruh pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik. Karena ini

menyangkut nama baik bangsa kita, apalagi kalau sampai mengeksport asap ke negara lain. Oleh karena itu harus ditangani karena ini menyangkut keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat," kata Agus Fatoni.

Agus Fatoni menyebut metode pemadaman karhutla yang selama ini telah dilakukan di Sumsel sudah berjalan dengan baik, di antaranya berupa water bombing, teknologi modifikasi hujan buatan, serta pemadaman secara manual yang dilakukan satuan tugas karhutla yang dibantu masyarakat sekitar. Namun, masi perlu dilakukan penajaman.

"Metode ini sudah berjalan, tinggal lagi penajaman di lapangan," ujar Agus Fatoni.

Agus Fatoni juga meminta bupati/wali kota untuk segera menyediakan anggaran penanganan karhutla melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Dia meminta mereka segera mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut.

"Untuk penanganan agar tidak terjadi lagi karhutla, banyak sekali yang dilakukan. Pertama sosialisasi, kedua penegakan hukum pemadaman api dan macam-macam, termasuk kita siapkan alokasi anggaran," ujar Agus Fatoni.

Terkait metode penanganan Karhutla, pihaknya tetap menggunakan cara atau langkah yang telah dilakukan selama ini. Namun, dia menegaskan akan melakukan penamba-

han sejumlah teknologi.

“Penambahan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) juga diusulkan, termasuk water bombing. Kemudian kita juga akan melakukan pergeseran anggaran di pemda,” tambah Agus Fatoni.

Selain mengalokasikan anggaran, dia juga meminta pihak swasta untuk ikut berkontribusi membantu percepatan penanganan karhutla, seperti menambah pembuatan embung, kanal dan lainnya.

“Soal anggarannya, kita hitung dulu, kemudian kita carikan sumbernya, baik dari pemerintah daerah, kabupaten/kota maupun dari pihak swasta. Untuk pendanaan dapat dilakukan pemda melalui pergeseran anggaran yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT),” jelas Agus Fatoni.

Hal lain yang tak kalah penting dilakukan untuk mempercepat penanganan karhutla di Sumsel adalah tetap melakukan sosialisasi secara masif, baik pemerintah provinsi/kabupaten/kota hingga ke tingkat desa.

“Perlu juga penegakan hukum dengan mengaktifkan Gakkumdu bersama Polri, Kejaksaan dan Gakkum KLHK,” ujar Agus Fatoni.

Tinjau Langsung Karhutla

Agus Fatoni juga melakukan peninjauan langsung ke lokasi karhutla melalui pantauan udara dari helikopter. Nantinya keseluruhan hasil peninjauan akan dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan terkait penanganan Karhutla di Sumsel.

Keseriusan Agus Fatoni menangani permasalahan karhutla di Sumsel telah menjadi salah satu program penting bagi dirinya sebagai Penjabat Gubernur Sumsel.

Sejak awal melaksanakan tugas sebagai Penjabat Gubernur Sumsel, Agus Fatoni sudah mengajak jajaran Forkopimda untuk membantu menuntaskan permasalahan karhutla di wilayah ini.

Usai melakukan pantauan udara, Fatoni melaksanakan rapat bersama dengan mengajak Satuan Tugas Karhutla yang berisi TNI, Polri, bupati, wali kota, perusahaan-perusahaan terkait dan masyarakat.

Agus Fatoni juga mengingatkan

masyarakat untuk berhenti membakar hutan, lahan dan kebun. Ini dilakukan guna meminimalisir dampak buruk bagi lingkungan maupun kesehatan.

“Dampak pembakaran hutan dan lahan ini sangat luas, baik itu bagi kesehatan dan lingkungan. Karena itu, kita harapkan masyarakat menahan diri untuk tidak melakukan pembakaran sekecil apapun,” kata Agus Fatoni.

Agus Fatoni mengatakan, media mempunyai peran penting dalam mengedukasi masyarakat supaya paham akan bahaya pembakaran lahan secara ilegal.

“Untuk media kita harapkan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa membakar (lahan) itu membahayakan,” imbuhnya.

Selain peran penting dari media, Agus Fatoni juga meminta seluruh

stakeholder, baik itu Forkopimda, TNI/Polri, pihak swasta dan masyarakat untuk terus bersinergi dalam menangani karhutla. Ke depannya, Agus Fatoni juga akan memperbanyak armada dan personel guna memaksimalkan kerja di lapangan.

“Setelah kita lihat dan pantau dari atas (udara), untuk pola yang akan kita kerjakan nanti sudah kelihatan, masih perlu penambahan dan penyalangan untuk semuanya, baik itu peralatan, personel, makanya kita perlu mempererat sinergi,” ucapnya.

Agus Fatoni menegaskan sejauh ini penegakan hukum betul-betul ditegakan bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan secara ilegal. “Perlu dicatat juga bahwa penegakan hukum selama ini sudah berjalan, baik itu dari kepolisian dan kejaksaan,” terangnya.

•rhd/***





PELABUHAN TANJUNG CARAT SIAP DIREALISASIKAN

Setelah sempat terhambat, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali menargetkan ground breaking pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Sumatera Selatan dapat dilakukan pada 2024.

Budi mengatakan nantinya seluruh kendala yang berkaitan dengan proses administrasi, seperti lahan dan sebagainya, diharapkan bisa tuntas dalam waktu dekat.

"Tahun depan semuanya akan kita selesaikan, baik itu administrasi, Amalnya, anggaran dan sebagainya. Insya Allah 2024 sudah bisa dimulai ground breaking Pelabuhan Tanjung Carat," kata Menhub Budi Karya.

Dia menilai keberadaan Pelabuhan Tanjung Carat nantinya sangat penting mengingat selama ini seluruh komoditi, baik pertambangan dan urusan logistik lainnya, dikirim ke

pelabuhan di Lampung. Kondisi ini terjadi akibat Pelabuhan Boom Baru Palembang yang masih belum mampu meng-cover penuh karena lokasinya berdekatan dengan perkotaan dan sungai yang dangkal.

Oleh karena itu, Menhub meminta instansi terkait untuk secepatnya mengurus seluruh persyaratan yang harus diselesaikan. Pihaknya juga akan terus mendorong untuk percepatan pelaksanaannya di tingkat kementerian, baik itu dengan Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian PUPR.

Saat ini, banyak investor yang berminat untuk berinvestasi di Pelabuhan

Tanjung Carat. Namun, masih menunggu kepastian dari investor bidang kontainer atau logistik dalam pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat.

Penjabat Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, sepakat untuk merealisasikan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat. Terlebih, nantinya bisa berdampak positif yang sangat besar bagi Sumatera Selatan.

"Pada prinsipnya semua program yang masuk ke Sumsel, baik dalam hal kelancaran transportasi dan pelayanan publik, pasti kita dukung. Dan tadi kita juga membahas berbagai hal, termasuk merealisasikan

Pelabuhan Tanjung Carat, apa-apa saja yang harus kita lakukan dan langkah-langkah untuk percepatannya akan dilaksanakan,” jelas Agus Fatoni.

Agus Fatoni juga menekankan, rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat harus dilakukan secara optimal. Nantinya, instansi terkait diminta melakukan inventarisasi untuk percepatannya.

“Kebetulan sekali saya mengikuti pembahasan Pelabuhan Tanjung Carat di kementerian dan tahu mengenai perkembangannya. Semoga pembangunannya bisa segera dilaksanakan dan kami akan melakukan koordinasi secara intens untuk merealisikannya,” ungkap Agus Fatoni.

Apresiasi Transportasi Publik

Menhub Budi Karya Sumadi juga mengapresiasi pembangunan transportasi publik terintegrasi di Sumatera Selatan. Dia secara langsung juga mengapresiasi Penjabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni atas komitmennya terhadap pembangunan transportasi umum di Bumi Sriwijaya. Menurut dia, Kota Palembang menjadi salah satu kota yang memiliki moda transportasi lengkap, mulai dari bus, angkot, LRT, feeder LRT, hingga angkutan sungai yang terintegrasi.

“Kota Palembang termasuk salah satu kota yang memiliki transportasi antar moda paling lengkap,” ungkapnya.

Ke depannya, kata Agus Fatoni, akan dilakukan penambahan rute pada angkutan feeder. Ada tiga rute baru yang rencananya akan

dibangun, yaitu di Plaju, Bukit, dan PT Pusri. Ini dilakukan karena melihat besarnya jumlah penduduk dan jarak lokasi antara satu titik ke titik lain terlalu jauh.

“Karena feedernya relatif terlalu jauh hingga waktu tempuh masyarakat dari satu titik ke titik lain terlalu lama. Jadi kita akan membuat feeder tegak lurus terhadap transportasi LRT. Nah, reroute ini bisa ditambah atau justru menghilangkan karena belum maksimal. Tujuannya agar bisa maksimal,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan saat ini terdapat program dari Amerika Serikat, yai-

Penyusunan Feasibility Study Pengembangan Stasiun LRT Ampera yang diharapkan transportasi dan Kawasan sekitarnya menjadi lebih baik.

“Apalagi Amerika akan berinvestasi dengan memberikan dana hibahnya. Ini merupakan inisiasi yang baik dari Pemprov Sumsel,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait kelanjutan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat masih menjadi fokusnya untuk direalisasikan di Sumsel. Saat ini, pelabuhan besar itu sedang difinalisasi feasibility study (FS).

Agus Fatoni mengatakan telah meninjau langsung transportasi pub-



tu Millennium Challenge Corporation (MCA) yang merupakan badan pengelola dana hibah. Mereka baru saja melakukan Kick-Off Meeting

lik yang ada di Kota Palembang, baik transportasi darat maupun perairan. Dia juga meminta dukungan dari seluruh pihak terhadap pembangunan transportasi di Sumsel.

“Kami dan masyarakat Sumsel bersyukur bahwa pemerintah memberi perhatian besar terhadap pembangunan transportasi publik yang memudahkan semuanya dalam melakukan aktivitas dan untuk mendorong perekonomian Sumsel,” ujar Fatoni.

“Saya minta untuk menyatukan langkah dan tekad untuk mewujudkan transportasi publik yang lebih baik. Dan Alhamdulillah pemerintah pusat mendukung dan kita harus melakukan kegiatan-kegiatan dengan mengutamakan penggunaan transportasi publik yang dibangun,” sambungnya. ●RHD/***



GERAK CEPAT ANTISIPASI INFLASI

Guna mengantisipasi terjadinya gejolak ekonomi yang dapat menimbulkan inflasi, Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni mendorong pemerintah daerah segera menggelar operasi pasar murah di daerahnya masing-masing. Operasi pasar dinilai mampu mengantisipasi terjadinya inflasi.

Selain itu, Agus Fatoni juga memastikan stok beras aman hingga Desember mendatang. Hal ini disampaikan usai meninjau dan mengecek langsung harga di dua pasar tradisional, yakni Pasar Palimo dan Pasar Lemabang, Palembang.

"Stok beras dari Bulog masih ada, jadi dari sisi stok aman sampai Desember 2023. Jadi ini menggembirakan, walaupun harga naik tapi stok aman," kata Agus Fatoni.

Beberapa hari belakangan harga beras cenderung mengalami kenaikan. Sehingga Pemprov Sumsel berupaya melakukan menstabilkan harga melalui kegiatan operasi pasar.

"Upaya yang dilakukan pemerintah menstabilkan harga salah satunya operasi pasar melalui Bulog. Kemudian nanti melakukan langkah-langkah

yang lain, bisa juga memberikan subsidi termasuk bansos. Jadi itu yang bisa dilakukan," terangnya.

Agus Fatoni mengupayakan stok beras yang dijual di pasaran diperbanyak. Dengan demikian harga akan Kembali normal, di samping kegiatan pasar murah dan operasi pasar yang akan dilakukan Bulog bersama instansi terkait.

"Mudah-mudahan harga beras bisa turun dengan memperbanyak stok di pasaran, selain kita memberikan subsidi serta bantuan sosial," ucapnya.

Sementara itu, dalam tinjauannya ke Pasar Lemabang, Agus Fatoni juga mengecek satu per satu kios dan berdialog dengan pedagang yang menjual kebutuhan pokok. Melalui kesempatan itu, Agus Fatoni menanyakan terkait stok dan harga terkini.

"Saya cek di toko-toko permintaan

beras masih tinggi, di beberapa tempat tadi begitu datang langsung habis. Di Pasar Lemabang beras dari harga Rp13 ribu per kilo, naik menjadi Rp 14 ribu sampai Rp15 ribu per kilo," ucapnya.

Agus Fatoni menyarakan agar masyarakat tetap menjaga stok pangannya dengan tidak terlalu boros. Mengingat saat ini masih dalam musim kemarau.

Agus Fatoni juga mengecek ketersediaan stok dan harga bahan pokok lainnya, seperti telur, daging ayam, daging sapi, daging kambing dan beras. Berdasarkan hasil pemantauannya di Pasar Palimo Palembang, harga daging mengalami penurunan. Hal ini bisa dilihat dari harga daging ayam yang sebelumnya seharga Rp35 ribu per kilogram menjadi Rp30 ribu per kilogram.

"Alhamdulillah untuk harga daging, baik itu daging ayam maupun daging sapi daging kambing turun. Begitu juga harga telur. Harga telur stabil Rp25 ribu per kilogram," ujar Fatoni.

Operasi Pasar Menyeluruh

Agus Fatoni juga meminta pemerintah daerah untuk menggelar operasi pasar. Hal ini penting untuk mengantisipasi terjadi inflasi di Sumatera Selatan.

"Saya harapkan Pemda lainnya juga menggelar operasi pasar seperti yang dilakukan Kabupaten OKI," ucap Fatoni usai meninjau pelaksanaan operasi pasar.

Fatoni juga memberikan apresiasi terhadap upaya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten OKI yang telah menggelar operasi pasar murah beras dan minyak goreng. Kegiatan ini diperuntukan bagi masyarakat Kota Kayuagung.

"Saya berikan apresiasi digelarnya operasi pasar beras dan minyak goreng ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat sekaligus dapat menurunkan terjadinya inflasi daerah," kata Fatoni.

Dalam kegiatan ini, pemerintah daerah bekerja sama dengan Bulog yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penerima manfaat sehingga inflasi dapat ditekan.

Sejumlah warga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pemerintah yang telah menggelar pasar murah. Salah satu warga, Cek Da mengaku sangat terbantu dalam

Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten OKI dengan Perum Bulog Wilayah Sumsel yang menyiapkan stok 8 ton beras dan 1.600 liter minyak goreng.

Melalui pasar murah ini, pemerintah



pemenuhan kebutuhan pokok warga.

"Kami masyarakat terbantu sekali, semoga ke depannya harga kebutuhan pokok lebih murah lagi, dan menjadikan masyarakat lebih sejahtera lagi," ungkapnya.

Pasar murah ini dapat terlaksana atas kerja sama Tim Pengendalian

menyiapkan sejumlah paket sembako, di antaranya paket seharga Rp67 ribu berisi beras 5 kilogram dan 1 liter minyak goreng. Harga tersebut lebih murah jika dibanding harga pasar berkisar Rp97 ribu. Pemerintah menyiapkan 1.600 kupon yang dibagikan kepada warga Kecamatan Kota Kayuagung. •rhd/***

REALISASIKAN PENINGKATAN STATUS RSUD SITI FATIMAH

Guna merealisasikan peningkatan klasifikasi RSUD Siti Fatimah Az-Zahra dari tipe B ke tipe A, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan upaya penambahan tenaga dokter sub spesialis. Usulan tersebut ditujukan langsung ke Kementerian Kesehatan.

"Terkait rencana peningkatan klasifikasi RSUD Siti Fatimah menjadi tipe A, kami akan meminta langsung ke Kementerian Kesehatan. Termasuk juga usulan penambahan dokter sub spesialis," kata Penjabat Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, saat menerima audiensi Direktur RSUD Siti Fatimah, Syamsuddin Isaac.

Sebelum mengajukan usulan tersebut, nantinya permintaan itu akan melalui tahap kajian terlebih dahulu oleh tim khusus. Agar usulan itu upaya dapat terealisasi, maka semua pihak harus terlibat.

"Nanti mekanismenya akan kita bahas terlebih dahulu. Harus ada pembagian tugas, sehingga upaya

ini maksimal. Koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak juga harus semakin ditingkatkan agar lebih optimal," terangnya.

Saat ini, RSUD Siti Fatimah masuk dalam klasifikasi rumah sakit tipe B. Fatoni memproyeksikan klasifikasi RSUD Siti Fatimah dapat meningkat menjadi tipe A.

Persyaratan rumah sakit dengan klasifikasi tipe A harus memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik, yakni paling sedikit 4 Pelayanan Medik Spesialis Dasar, 5 pelayanan Spesialis Penunjang Medik, 12 Pelayanan Medik Spesialis Lain, dan 13 Pelayanan Medik Sub Spesialis.

Dalam kesempatan ini, Direktur RSUD Siti Fatimah, Syamsuddin Isaac, mengatakan pihaknya terus



berupaya agar peningkatan klasifikasi terhadap RSUD tersebut dapat terealisasi. Sejumlah langkah mulai dari pembenahan pelayanan dan fasilitas terus dilakukan.

"Kendalanya karena kita kekurangan pelayanan medik sub spesialis. Kita melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti kedokteran Universitas Sriwijaya. Kami bekerja sama dengan kedokteran Unsri di bidang pendidikan, sehingga kami juga menjadi rumah sakit pendidikan dengan akreditasi A," lanjutnya.

Dia berharap, upaya yang dilakukan tersebut dapat mempercepat meningkatnya klasifikasi RSUD Siti Fatimah. "Diharapkan, ke depan dapat berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat terkait klasifikasi tipe A ini," ucap Syamsuddin.

Untuk mengetahui kondisi RSUD Siti Fatimah, Agus Fatoni juga melakukan kunjungan langsung. Dia menekankan pihak pengelola rumah sakit agar terus meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat yang datang untuk mempercepat kesembuhan pasien. Selain itu, dia juga mengapresiasi pihak rumah sakit yang tetap semangat bekerja meskipun hari libur.

"Berikan pelayanan yang terbaik, buat pasien nyaman mungkin. Karena itu akan mempercepat kesembuhan pasien. Walau di hari minggu bapak-ibu semua hadir, ini cukup lumayan lengkap kami ucapkan terima kasih," sambungnya.

Tingkatkan Fasilitas JSC

Agus Fatoni juga melakukan perbaikan fasilitas bidang olahraga dengan meninjau kawasan Jakabaring Sport City (JSC). Sejumlah lokasi yang dikunjungi di antaranya Wisma Atlet, Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring Aquatic Stadium dan Jakabaring Bowling Center.

"Saya datang ke sini karena JSC juga dikelola BUMD kita, maka saya ingin memastikan apakah untung atau tidak. Tadi sudah disampaikan pengelola, dari sisi pendapatan masih menguntungkan," ungkapnya.

Dirinya berharap, semua BUMD milik Pemprov Sumsel bisa dikelola se-

cara profesional dan memiliki kinerja yang apik agar tidak merugi serta bisa mendapatkan keuntungan.

Dia meminta agar JSC lebih dipromosikan secara luas. Hal ini guna semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas yang ada di lokasi ini.

"JSC harus lebih dipromosikan secara luas. Dengan semakin banyak digunakan oleh masyarakat, corpo-

menurun, sehingga perlu dilakukan perawatan. Biaya perawatan dan pemeliharaan cukup besar, karena venue-nya cukup banyak. Ya, fasilitas yang sudah ada dan tersedia, kita miliki harus kita kembangkan, terus kita perbaiki agar harapan sejak awal menjadikan Sumsel lebih baik lagi," ungkap Agus Fatoni.

Agus Fatoni mengatakan, pada 2024, Indonesia ditunjuk oleh AFC



rate, organisasi, kegiatan sosial, seremonial dan lainnya bisa menjadikan JSC lebih semarak lagi," katanya.

Selain itu, Agus Fatoni juga meminta agar dilakukan perbaikan dan pengelolaan terhadap seluruh fasilitas JSC. Langkah tersebut perlu dilakukan guna tetap menjadikan JSC sebagai kawasan sport tourism.

"Memang yang namanya aset akan

sebagai tuan rumah Piala Asia Wanita U-17. Nantinya, Stadion Gelora Sriwijaya, Stadion Atletik I, dan Stadion Bumi Sriwijaya akan menjadi lokasi kegiatan tersebut.

"Salah satu event internasional yang akan digelar di Sumsel adalah sepak bola wanita tingkat Asia oleh karena itu harus dipersiapkan dengan baik," kata Fatoni. ●rhd/***



PERUBAHAN UU ASN AMANKAN POSISI TENAGA HONORER

Rapat Paripurna DPR Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi undang-undang.

Berdasarkan laporan Komisi II DPR, terdapat delapan fraksi yaitu Fraksi PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, Demokrat, PAN dan PPP yang menyetujui RUU tentang perubahan atas UU 5/2014 tentang ASN dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II pada rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Sedangkan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui dengan catatan.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, proses pembahasan RUU tentang perubahan atas UU 5/2014 tentang ASN membutuhkan waktu yang sangat Panjang, yakni sekitar dua tahun sembilan bulan.

RUU tersebut disusun DPR bersama

Pemerintah dalam rangka menjawab tantangan ASN ke depan agar terwujudnya birokrasi yang profesional dan berkelas dunia, indeks persepsi korupsi yang semakin baik, serta indeks efektivitas pemerintahan yang semakin baik pula.

"Hal ini dilakukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, dan masyarakat yang semakin sejahtera," kata Doli.

Ketua DPR, Puan Maharani, menegaskan, pengesahan UU ASN merupakan dukungan DPR untuk pemerataan ASN berkualitas di daerah, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

"Undang-undang ini menjadi transformasi di tubuh ASN sebagai abdi

negara, serta untuk memperbaiki kesenjangan talenta nasional. Kita ketahui bersama sebaran ASN berkualitas masih kurang merata karena saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja," kata Puan.

Dengan adanya UU ASN yang baru, Puan berharap Kementerian PANRB dapat mengimplementasikan capaian formasi ASN khusus di daerah 3T.

"Untuk menghadirkan pelayanan maksimal ke seluruh wilayah Indonesia diperlukan ASN berkualitas tinggi yang bersedia ditempatkan di daerah 3T," jelas mantan Menko PMK itu.

Berdasarkan keterangan pemerintah terdapat lebih dari 130.000 formasi ASN yang tidak terpenuhi di daerah 3T. Hal tersebut dikarenakan kurangnya



ketertarikan calon ASN untuk mengisi formasi di daerah-daerah tersebut.

Untuk memenuhi transformasi kualitas pelayanan ASN, katanya, maka UU ASN memberikan solusi dengan mengatur adanya insentif bagi ASN yang bersedia ditempatkan di wilayah 3T. Transformasi ini dibutuhkan demi target arah pembangunan nasional.

Misalnya kedaulatan pangan, digitalisasi, hilirisasi, dan antisipasi perubahan iklim sebagai prioritas nasional. Oleh karena itu, rekrutmen ASN harus diarahkan untuk instansi-instansi yang menjadi "leading sector" terkait hal tersebut, serta untuk daerah-daerah yang menjadi sentra akselerator untuk sektor-sektor itu.

"Dengan adanya insentif khusus dan percepatan dalam kenaikan pangkat dibanding ASN di wilayah ibu kota, hal ini akan menjadi penarik minat para ASN untuk bersedia ditempatkan di daerah 3T," jelas Puan.

Lewat UU ASN, Pemerintah bisa membuat usulan untuk ASN yang akan ditempatkan di luar ibu kota. Puan berharap beleid ini dapat memfasilitasi agar tidak ada lagi kekosongan formasi ASN di beberapa wilayah

luar Indonesia.

"ASN yang ditempatkan di daerah 3T akan dapat mempercepat pembangunan daerah. Hal ini karena ASN tersebut akan dapat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan," ungkapnya.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), total formasi ASN di wilayah 3T di Indonesia pada 2023 sebanyak 134.000 formasi. Dari jumlah tersebut, 100.000 formasi diperuntukkan bagi tenaga guru, 20.000 formasi diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, dan 14.000 formasi diperuntukkan bagi tenaga teknis.

Target formasi ASN di wilayah 3T di Indonesia pada 2023 adalah sebanyak 90 persen dari total formasi. Artinya, pemerintah menargetkan 120.600 formasi ASN di wilayah 3T dapat terisi pada 2023.

Puan menilai jika seluruh formasi ASN di daerah 3T terisi, maka akan bisa menjawab tantangan ke depan untuk terciptanya birokrasi yang profesional dan berkelas dunia, indeks persepsi korupsi yang semakin baik, dan indeks efektivitas pemerintahan yang semakin baik.

"Selain itu ASN yang ditempatkan di daerah 3T akan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat setempat. Hal ini karena ASN tersebut memiliki kompetensi dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut," terang Puan.

Puan mengungkapkan, hadirnya UU ASN yang baru juga menjadi dukungan DPR terhadap percepatan pengembangan kompetensi ASN. Menurutnya, pengembangan kompetensi ASN menjadi kunci peningkatan kualitas pelayanan untuk rakyat.

"Pengembangan kompetensi kini bukan lagi sekadar hak bagi ASN, tapi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi negara," ujarnya.

Pola pengembangan kompetensi bagi ASN pun saat ini tidak lagi klasikal, seperti penataran. Tetapi mengutamakan experiential learning, seperti magang dan on the job training.

"Tentunya hal ini dapat mendukung terciptanya reformasi birokrasi yang baik di tubuh pemerintah," tegas Puan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas, mengata-

kan, terdapat tujuh agenda transformasi ASN dalam tentang perubahan atas UU 5/2014 tentang ASN.

Tujuh agenda itu yakni transformasi rekrutmen dan jabatan ASN; kemudahan mobilitas talenta nasional; percepatan pengembangan kompetensi; penataan tenaga non-ASN; reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN; digitalisasi manajemen ASN; serta penguatan budaya kerja dan

tentang Perubahan atas UU 5/2014 menjadi payung hukum tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal tenaga non-ASN (honorar).

“Berkat dukungan DPR, UU Perubahan atas UU ASN ini menjadi payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN, yaitu tidak boleh ada PHK massal, yang telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal,” kata Anas.

agar bisa terus bekerja,” ujarnya.

Terkait dengan hal tersebut, Anas mengatakan bahwa akan terdapat perluasan skema dan mekanisme kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sehingga dapat menjadi salah satu opsi dalam penataan tenaga honorar.

“Nanti didetailkan di peraturan pemerintah (PP),” ucapnya.

Prinsip krusial yang akan diatur dalam PP, kata dia, salah satunya ialah tidak boleh ada penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini akibat penataan tenaga honorar. Apalagi, kontribusi tenaga non-ASN dalam pemerintahan sangat signifikan.



Semoga upaya kami untuk mewujudkan ASN yang profesional dan berkelas dunia dapat memberikan dampak pada terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang semakin sejahtera

“Ini adalah komitmen pemerintah, DPR, DPD, asosiasi pemda, dan berbagai pemangku kepentingan lain untuk para tenaga non-ASN,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga mendesain agar penataan tersebut tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah.

Anas mengatakan, daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) akan mendapat kemudahan mobilitas talenta ASN. Hal ini didedikasikan untuk mengatasi kesenjangan talenta nasional yang sebarannya selama ini tidak merata, karena hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa.

“Kemudahan ini kita dedikasikan untuk mengatasi kesenjangan talenta yang selama ini sebagian masih terpu-



citra institusi.

“Semoga upaya kami untuk mewujudkan ASN yang profesional dan berkelas dunia dapat memberikan dampak pada terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang semakin sejahtera,” kata Azwar Anas menyampaikan pendapat akhir mewakili Pemerintah.

Anas mengatakan Undang-Undang

Anas mengatakan, penataan tenaga non-ASN yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta orang menjadi salah satu isu krusial dalam penyusunan RUU tentang Perubahan UU 5/2014.

“Kalau normatif, mereka tidak lagi bekerja pada November 2023. Disahkannya RUU ini menjadi UU memastikan semuanya aman dan tetap bekerja. Istimahnya, kami amankan dahulu

sat di kota-kota besar saja,” ujar Anas.

Adapun mobilitas talenta akan berorientasi ‘Indonesia-Sentris’ sehingga dukungan keberadaan ASN, terutama di daerah 3T akan turut mendukung pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Ia menjelaskan pada tahun-tahun sebelumnya ada lebih dari 130.000 formasi ASN yang tidak terpenuhi di daerah 3T. Sebab, kurangnya ketertarikan calon ASN untuk mengisi formasi

untuk instansi-instansi yang menjadi leading sector terkait hal tersebut, serta untuk daerah-daerah yang menjadi sentra akselerator untuk sektor-sektor tersebut.

“Nah, yang berlaku selama ini, rekrutmen ASN hanya didasarkan pada penetapan kebutuhan yang basis-nya adalah analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai bisnis proses saat ini,” ujar Anas.

Padahal, di saat yang sama birokrasi

“Fleksibilitas mobilitas talenta ini juga memastikan dengan jelas bahwa PNS yang diangkat menjadi pejabat negara, komisioner atau anggota lembaga non-struktural, maupun dalam penugasan ke organisasi dunia, tidak kehilangan hak kepegawaian-nya selama menjalankan tugas tersebut,” papar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP) tersebut.

UU anyar ini juga mendukung per-



di daerah-daerah tersebut. UU ini menjadi solusi agar daerah 3T juga mendapat pelayanan dengan baik.

“Salah satunya nanti di PP, pemerintah menyiapkan insentif khusus bagi ASN yang bertugas ke daerah 3T,” jelasnya.

Anas menambahkan salah satu poin krusial lain dalam RUU ASN yaitu rekrutmen ASN yang ditransformasikan dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Sehingga ketika negara menjadi beberapa sektor prioritas. Misalnya, kedaulatan pangan, digitalisasi, hilirisasi, dan antisipasi perubahan iklim sebagai prioritas nasional, maka rekrutmen ASN harus diarahkan

sedang melakukan penyederhanaan proses bisnis melalui digitalisasi. Hal ini menyebabkan korelasi antara jumlah dan jenis jabatan ASN dengan apa yang menjadi prioritas nasional menjadi belum sepenuhnya selaras.

Untuk itu, mobilitas talenta untuk ASN bertugas ke luar instansi pemerintah seperti TNI/Polri dan BUMN juga mulai terbuka dengan resminya UU ini. ASN dapat didorong untuk bergerak antar-instansi untuk pengembangan kompetensinya.

Selama ini, jelas Anas, persyaratan untuk melakukan mutasi sangat kaku, sehingga muncul stigma bahwa sulit memindahkan seorang ASN.

cepatan pengembangan kompetensi ASN. Pengembangan kompetensi tidak lagi dimaknai sebagai hak, melainkan suatu kewajiban bagi ASN.

“Untuk itu, Instansi Pemerintah wajib memberikan kemudahan akses belajar bagi Pegawai ASN,” tegas mantan Bupati Banyuwangi ini.

Pola pengembangan kompetensi pun tidak lagi klasikal, seperti penataran, tetapi mengutamakan experiential learning, seperti magang dan on the job training.

“Seluruh konsep itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi ASN menuju birokrasi profesional,” ujar Anas. ●



PERCEPATAN MIGRASI KENDARAAN LISTRIK

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan tantangan industri otomotif saat ini yakni menuju era netralitas karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060. Hal itu mengingat otomotif merupakan salah satu penyumbang terbesar emisi karbon di Indonesia.

Berdasarkan data Direktorat Mega Proyek dan EBT PT PLN, sektor transportasi melepas emisi karbondioksida (CO₂) sebanyak 280 juta ton pada 2020 dan diprediksi membengkak menjadi 860 juta ton pada 2060.

"Tidak hanya melalui kendaraan listrik, untuk mengurangi emisi gas buang, kini dunia juga sedang berusaha menghadirkan kendaraan tenaga surya serta kendaraan tenaga hydrogen. Sebagaimana telah dilakukan Sono Motors asal Jerman yang telah menghadirkan sebuah mobil tenaga

2023.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Perindustrian pada 2020, populasi kendaraan roda empat bermesin pembakaran internal (mobil ICE) mencapai 17,5 juta unit dan menghasilkan emisi karbon 59,3 juta ton. Lalu, jumlah sepeda motor ICE 100,5 juta unit dengan emisi karbon 36 juta ton.

Pada 2030, jumlah mobil ICE diprediksi naik menjadi 25,8 juta unit dengan emisi karbon 92,2 juta ton. Sedangkan, jumlah motor ICE diprediksi naik menjadi 158,42 juta unit pada

dengan kemampuan sendiri, dan 441 juta ton dengan bantuan internasional. Salah satu cara mewujudkannya, sesuai roadmap menuju net zero emission, pada 2051-2060, seluruh kendaraan bermotor sudah harus bebas emisi. Karenanya, percepatan penggunaan kendaraan listrik saat ini merupakan sebuah keniscayaan," jelas Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini.

Bamsuet juga mendukung Permenperin 6/2022 yang menargetkan penjualan mobil listrik pada 2025 mencapai 400 ribu unit, dengan pengurangan impor BBM 5 juta barel dan emisi karbon 1,84 juta ton.

Pada 2030, penjualan mobil listrik ditargetkan mencapai 600 ribu unit, dengan pengurangan impor BBM 7,5 juta barel dan emisi karbon 2,76 juta ton. Pada 2035, penjualan mobil listrik ditargetkan 1 juta unit, dengan pengurangan impor BBM 12,5 juta barel dan emisi karbon 4,6 juta ton.

"Sementara produksi motor listrik pada 2025 diproyeksikan 1,76 juta unit, tahun 2030 sebanyak 2,45 juta unit, dan tahun 2035 sebanyak 3,22 juta unit. Target pengurangan emisi karbon pada 2025, 2030, dan 2035 masing-masing mencapai 800 ribu ton, 1 juta ton, dan 1,4 juta ton," ungkap Bamsuet.

Bamsuet menambahkan, pengguna kendaraan listrik memiliki banyak keunggulan. Antara lain ramah lingkungan dan ramah kantong karena tidak menghasilkan emisi gas buang, serta tidak perlu servis rutin bulanan. Kendaraan listrik juga memiliki torsi instan sehingga terasa lincah dan gesit, terutama ketika digunakan dalam situasi stop and go.

"Keunggulan lainnya yakni kondisi



surya bernama Sion sebagai pilihan mobilitas yang terjangkau dan ramah lingkungan. Kita juga harus mempersiapkan diri sejak sekarang, sehingga tidak ketinggalan," ujar Bamsuet dalam Kick Off Green Energy Percepatan Transformasi Energi Listrik di Indonesia yang diselenggarakan Tribun Network Kompas Gramedia dengan PT PLN Persero, di Jakarta, Rabu, 18 Oktober

2023 serta menghasilkan emisi 55 juta ton karbon.

"Berdasarkan UU 16/2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, komitmen Indonesia pada tahun 2030 menargetkan penurunan gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri, dan 41 persen dengan bantuan internasional. Serta menurunkan emisi sektor energi 314 juta ton

kabin senyap dan nyaman, tidak terdengar suara mesin, pajak kendaraan relatif murah, di DKI Jakarta BBNKB gratis dan PKB yang hanya perlu dibayar 10 persen oleh pemilik mobil, minim perawatan karena memiliki komponen bergerak yang lebih sedikit dibandingkan kendaraan konvensional, memiliki tingkat efisiensi tinggi serta bebas tilang ganjil genap,” ujar Bamsuet.

Bamsuet juga mengungkapkan selama lebih kurang 3,5 tahun pembahasan antara IMI Pusat di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum Mobilitas Rifat Sungkar dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan pihak terkait lainnya, Indonesia akhirnya memiliki Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45/2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor.

Hal ini menjadi dasar hukum bagi para pecinta otomotif sekaligus pelaku usaha otomotif dalam melakukan kustomisasi kendaraan. Selain itu, juga menjadi tonggak kemajuan industri kustomisasi di Indonesia.

Dia menyebut, apresiasi perlu diberikan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang telah aktif bersinergi dengan IMI, sehingga Permenhub 45/2023 tersebut bisa keluar yang terdiri dari 57 pasal dan tersebar dalam enam bab.

“Didalamnya mencakup persyaratan teknis, administratif, keselamatan/safety yang sudah mengakomodir dan memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku usaha kustom. Di antaranya pada rangka landasan, toleransi perubahan jarak s u m b u r o d a , p e r u b a h a n motor penggerak dan beberapa hal lainnya. Kriteria kendaraan kustomisasi dengan penetapan minimum kombinasi perubahan spesifikasi teknis utama dan

persyaratan teknis yang diatur dalam Permen ini sudah tepat, sehingga dapat membedakan Permen ini dengan peraturan lainnya,” ujar Bamsuet.

Bamsuet menjelaskan, pada lampiran persyaratan administratif, Permen ini juga telah memberikan informasi yang jelas yang dapat diimplementasikan oleh pelaku usaha. Tinggal dibekali sosialisasi dan literasi atau bagan legalitas

dustri karoseri yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

“Menjadikan modifikator dan builder bisa memiliki acuan yang jelas dalam memodifikasi kendaraan. Sekaligus menggairahkan industri kendaraan kustom yang saat ini sedang digandrungi berbagai negara dunia, termasuk digandrungi Presiden Joko Wido-



sampai dengan penerbitan SRUT.

“IMI akan menjadi mitra strategis bagi Kementerian Perhubungan untuk mensosialisasikan Permen tersebut kepada seluruh stakeholder, mulai dari pihak terkait maupun pelaku usaha. Sekaligus memberikan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha kustomisasi kendaraan dalam menjaga Permen tersebut agar dapat terlaksana dan diterapkan dengan baik,” jelas Bamsuet.

Dia menengangkan, berdasarkan Permenhub 45/2023 tersebut, kustomisasi kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh bengkel umum, lembaga/institusi atau perusahaan in-

do,” terang Bamsuet.

Dia menambahkan, industri kendaraan kustom terbukti bisa dijadikan sebagai salah satu sektor penyelamat perekonomian dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Sekaligus memajukan UMKM dan ekonomi kreatif. Hal itu mengingat sektor UMKM adalah penyumbang terbesar berbagai kebutuhan pelaku usaha kendaraan kustom, mulai dari helm, knalpot, spion, jaket, hingga sepatu, dan berbagai kebutuhan lainnya.

“Saat ini saja, kendaraan kustom Indonesia sudah diakui berbagai negara dunia. Salah satu karya bengkel kendaraan kustom Indonesia Thrive Motorcycle, T-005 Cross, menjadi satu dari 25 karya motor kustom dari seluruh dunia yang masuk dalam pameran bertajuk ‘Custom Revolution’, di Petersen Automotive Museum, Los Angeles, Amerika Serikat, pada 2018. Dengan hadirnya Permen tersebut, diharapkan dapat semakin menumbuhkembangkan industri kustomisasi di Indonesia yang pada akhirnya turut mengharumkan nama Indonesia di mata dunia,” pungkas Bamsuet. ●



PARPOL KURANG DUKUNGAN GAGAL KE SENAYAN

Sejumlah partai politik diprediksi tak lolos ke Senayan karena dukungannya di bawah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen. Partai yang berstatus non parlemen dan partai baru menjadi yang terancam gagal mengirimkan kadernya ke Senayan tahun depan.

Temuan terbaru yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan hanya lima partai politik yang lolos ke parlemen jika Pemilihan Umum dilakukan hari ini. Temuan itu seiring dengan berlaku ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen bagi partai politik untuk bisa melenggang ke Senayan.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, menuturkan, berdasarkan pilihan spontan responden, sebanyak 22,3 persen memilih PDIP. Pada pilihan kedua ada Gerindra dengan 10,6

responden disuguhkan simulasi 18 nama dan lambang partai politik yang akan berlaga di Pemilu 2024. Dari hasil itu terdapat 8 partai yang dinyatakan lolos ambang batas parlemen. Partai yang dinyatakan lolos adalah PDIP dengan 26,1 persen.

Selanjutnya, Gerindra berada di posisi kedua dengan 14,4 persen, disusul Golkar 9,7 persen dan PKB 7,6 persen. Partai lain yang mendapat suara di atas 5 persen adalah Partai NasDem 7,0 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 6,0 persen, Partai Demokrat 4,3 persen, dan Partai Amanat Nasional (PAN) den-

Partai Hanura 0,4 persen, Partai Ummat 0,2 persen, Partai Gelora 0,2 persen, Partai Bulan Bintang (PBB) 0,2 persen, Partai Garuda 0,1 persen, lalu Buruh dan PKN 0 persen.

"Tapi masih ada 15 persen yang masih belum menjawab," kata Djayadi dalam paparannya, Jumat, 20 Oktober 2023.

Adapun, survei tersebut dilakukan pada 2-8 Oktober 2023 dengan melibatkan 1620 responden menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar +/-2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Selanjutnya, menurut hasil survei Indikator Politik Indonesia, PDIP menjadi partai politik dengan elektabilitas tertinggi jika pemilihan legislatif dilakukan saat ini. Tercatat, ada 26 persen responden yang memilih partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Partai Gerindra mengikuti di urutan kedua dengan meraih suara dari 12,6 persen responden. Setelahnya ada Partai Golkar yang mencatatkan elektabilitas sebesar 9,2 persen. PKB mencatatkan elektabilitas sebesar 7,5 persen. Kemudian, dukungan terhadap PKS dan Partai Demokrat masing-masing sebesar 5,2 persen dan 5,1 persen.

Partai Nasdem berada di urutan ketujuh dengan elektabilitas sebesar 4,8 persen. Sedangkan 4,5 persen responden mendukung PAN jika pileg dilakukan saat ini.

Lebih lanjut, 10 partai lainnya masih meraih elektabilitas di bawah 4 persen. Persentase itu masih di bawah ambang batas parlemen yang ditetapkan untuk Pemilu 2024.

Survei Indikator Politik dilakukan den-



persen suara yang diikuti Partai Golkar 7,2 persen.

Dua partai lain yang dalam temuan LSI lolos ke Senayan adalah Partai NasDem dengan 4,8 persen suara. Lalu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 4,2 persen suara. Sedangkan partai lain mendapatkan suara di bawah ambang batas parlemen 4 persen.

Hasil tak berbeda ditunjukkan ketika

gan 4,2 persen.

Sementara itu, beberapa partai lainnya mendapat perolehan suara di bawah 4 persen. Partai yang terancam tak lolos adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 2,5 persen suara, dan Perindo dengan 1,3 persen suara. Adapun partai yang mendapat suara di bawah 1 persen yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 0,8 persen,

gan metode multistage random sampling melalui wawancara tatap muka terhadap 4.090 responden di seluruh Indonesia pada 25 Agustus-3 September 2023. Survei ini dilakukan dengan tingkat toleransi kesalahan (margin of error) sebesar $\pm 2,9$ persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei The Republic Institute juga mencatat PDIP masih jadi jawara di Pemilu 2024 disusul Gerindra di posisi dua. Partai Demokrat secara mengejutkan versi survei ini ada di posisi ketiga. Survei Republic Institute mencatat ada 11 partai politik yang elektabilitasnya tak sampai 4 persen dan tidak akan lolos ke DPR.

PDIP diperkirakan bisa mempertahankan kemenangan dengan elektabilitas 23,4 persen. Sementara Gerindra di posisi kedua 15,3 persen. Partai Demokrat berada di posisi tiga dengan perolehan 11,8 persen.

Di posisi bawah ada sejumlah partai di parlemen saat ini yang diprediksi tak lolos ambang batas. PAN diprediksi tak lolos ke Senayan karena hanya punya elektabilitas 3,2 persen. Elektabilitas PAN naik 0,4 persen dalam tiga bulan terakhir, tetapi belum cukup meloloskan partai itu ke parlemen.

PPP juga menjadi partai petahana yang diprediksi tak lolos ke DPR. Elektabilitas partai Pa'bah itu cuma 1,5 persen. Suara mereka turun 1,1 persen sejak tiga bulan lalu.

Sembilan partai lainnya yang diprediksi tak lolos parlemen adalah PSI (0,6 persen), Perindo (0,6 persen), Partai Hanura (0,4 persen), PBB (0,4 persen), Partai Ummat (0,2 persen), Partai Gelora (0,2 persen), Partai Buruh (0,2 persen), Partai Garuda (0,2 persen), dan PKN (0,2 persen).

Hanya enam parpol yang diprediksi lolos ke Senayan. Selain PDIP, Gerindra, dan Demokrat, ada PKB dengan 10 persen, Golkar 8,7 persen, dan NasDem 7,2 persen.



Survei The Republic Institute pun mengungkap penurunan elektabilitas sejumlah partai petahana. Misalnya, Golkar yang turun dari 10,8 persen menjadi 8,7 persen dalam tiga bulan. Begitu pula NasDem yang turun dari 8,4 persen ke 7,2 persen. PKS juga turun dari 7,7 persen ke 6 persen.

"Penurunan yang terjadi pada Golkar dalam temuan hasil penelitian ini ialah belum kuatnya gerakan partai Golkar untuk menyapa pemilih, baik yang dilakukan Golkar sebagai parpol peserta pemilu maupun yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Golkar di tingkat lokal," dikutip dari keterangan tertulis The Republic Institute, Rabu, 11 Oktober 2023.

"Khusus Nasdem dan PKS karena dampak dari pilihan capresnya, di mana PKS dan Nasdem pengusung utama Anies Baswedan, hasil penelitian ini menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan juga mengalami penurunan," sambungnya.

The Republic Institute melibatkan 2.010 responden yang dipilih melalui stratified random sampling dalam survei ini. Survei digelar 13-23 September 2023 di 38 provinsi dengan margin of Error survei sebesar 2,19 persen.

Tetap Optimis

Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, merespons jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru yang memprediksi bahwa tiga partai peserta Pemilu 2024 yakni PPP, Perindo, dan PSI tak lolos parlemen.

"Surveinya kapan itu? Ah, pertengahan September, ya kita lihat nanti," kata Kaesang.

Putra bungsu Presiden Jokowi itu



memilih tak ambil pusing dan meminta doa masyarakat agar elektabilitas PSI segera naik. "Doanya saja, pokoknya target (elektabilitas) kami enggak muluk-muluk. Kalau elektabilitasnya bisa 4 persen ya alhamdulillah, kalau 8 persen alhamdulillah, kalau 16 persen ya Allah, alhamdulillah," kata Kaesang.

Kaesang menuturkan, saat ini selaku ketua umum PSI yang baru, berfokus untuk menggencarkan sosialisasi program PSI terutama di kalangan anak muda. "Dari Yogya ini kami kembali dulu ke Jakarta, lalu minggu ini rencananya (sosialisasi) ke Bandung, habis itu ke Manado, lalu NTT, baru setelah itu mungkin kami bergerak ke Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Tengah," kata Kaesang.

Sementara itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, mengomentari hasil survei lembaga Indikator Politik yang menunjukkan PPP diprediksi tak tembus ke parlemen.

Awiek, sapaannya, menyebut pihaknya akan menjadikan hasil survei Indikator ini sebagai bahan evaluasi. Tapi ia tetap optimis PPP akan lolos ke DPR meskipun saat ini diprediksi tidak akan tembus ke Senayan.

"Hasil survei Indikator Politik tersebut kami jadikan bahan evaluasi dalam langkah pemenangan ke depan. Dan kami tegaskan PPP selalu lolos ke parlemen meskipun dipotret tidak lolos. Karena PPP mau lolos pemilu bukan lolos survei," kata Awiek.

Awiek menyebut PPP menghargai hasil survei Indikator meskipun berbeda dengan hasil survei internal dan lembaga survei lainnya. Menurutnya, sampel survei Indikator diambil saat para caleg PPP belum masif bergerak di lapangan.

"Saat pengambilan sample dilakukan pada posisi caleg PPP belum bergerak masif karena belum masuk tahapan DCT. Jika survei dilakukan pada saat DCT telah diumumkan dan semua bergerak kami yakini hasilnya akan jauh lebih bagus," ucapnya. ●

6 PROVINSI RAWAN POLITISASI SARA

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merilis enam provinsi yang berpotensi memiliki kerawanan tinggi Politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) di Pemilu 2024.

Anggota Bawaslu, Lolly Su-henty, mengungkapkan, DKI Jakarta menempati urutan pertama sebagai provinsi yang paling rawan terjadi politisasi SARA dengan skor 100. Adapun peringkat kedua diduduki Maluku Utara (77,16). Sementara peringkat ketiga sampai keenam ditempati Di Yogyakarta (14,81), Papua Barat (14,81), Jawa Barat (12,35), dan Kalimantan Barat (7,4).

Namun, saat diranking berdasarkan agregasi kabupaten/kota, Papua Tengah menjadi provinsi paling rawan isu politisasi SARA dengan skor 41,02. Urutan di bawahnya adalah DKI Jakarta (20,82), Banten (11,64), DIY (2,77), Papua Pegunungan (2,74), dan Maluku Utara (2,23).

Lolly mengungkapkan isu SARA yang tergambar dari hasil pemetaan kerawanan yang dilakukan pihaknya adalah kampanye bermuatan SARA di media sosial. Di tingkat provinsi, kampanye bermuatan SARA berdasarkan agama mencapai 86 persen. Ada-

pun penolakan calon peserta pemilu berbasis etnik sebesar 75 persen.

"Kedua isu ini memang sangat mudah diprovokasi karena etnis dan agama merupakan bagian dari identitas kolektif yang mampu menggerakkan suatu kelompok untuk berhadapan dengan kelompok lain," kata Lolly saat membuka Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Isu Strategis: Politisasi SARA di Yogyakarta, Selasa, 10 Oktober 2023.

"Dalam konteks ini, waspadalah untuk provinsi yang dipetakan peristiwanya banyak terjadi di kabupaten/kota. Lakukan upaya pencegahan terbaik supaya ini tidak terjadi di 2024," ujar Lolly.

Berdasarkan pemetaan yang disusun Puslitbangdiklat Bawaslu tersebut,

Lolly berharap, terhadap enam provinsi berpotensi kerawanan tertinggi soal Isu Politisasi SARA ini memiliki strategi dalam melakukan pencegahannya.

"Lakukan upaya pencegahan dengan melibatkan dengan berbagai pihak, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota. Alasannya, upaya pencegahan yang baik yaitu dengan membangunnya melalui komunikasi dengan berbagai pihak terkait yang bertujuan mencegah melakukan politisasi SARA," ujarnya.

Selanjutnya, di tingkat kabupaten/kota tercatat 20 daerah yang memiliki kerawanan tinggi diantaranya Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jaya Wijaya, Kabu-

paten Pandeglang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Administrasi Pulau Seribu, Kota Jakarta Pusat, Kabupaten Sampang, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Alor, Kabupaten



Malaka, Kabupaten Mappi, Kota Jakarta Barat.

Potensi kabupaten/kota terawan selanjutnya yakni Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Mimika, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Sleman, Kabupaten Landak, Kabupaten Sarmi, dan Kota Sabulussalam.

“Dari dua puluh kabupaten/kota, sembilan di antaranya ada di Indonesia Timur, maka dibutuhkan upaya perencanaan terbaik,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Srikandi Bawaslu itu turut memaparkan kekerasan berbasis SARA merupakan muara dari berbagai indikator politisasi SARA, yakni kampanye di media sosial, kampanye tempat umum, dan penolakan calon berbasis SARA.

“Artinya, Penolakan calon berbasis sara kalau terjadi, itu akan berpengaruh terhadap meningkatnya kekerasan berbasis SARA,” ujarnya.

Lolly juga menyebutkan provokasi di media sosial menjadi modus kekerasan berbasis SARA tertinggi baik di provinsi dan kabupaten/kota. Kedua adalah provokasi online, bentrok antar kelompok dan kerusuhan warga.

Untuk itu, dia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi melakukan upaya pencegahan politisasi SARA dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Kemenkominfo, Dewan Pers, platform media sosial untuk pencegahan kampanye dan provokasi SARA di media sosial dan media massa lainnya. Serta Kerja sama dengan para pihak seperti TNI/Polri dan BIN untuk mengidentifikasi gejala dan mencegah berkembangnya politisasi SARA.

Lolly juga menegaskan pelaku provokasi SARA, termasuk lewat media sosial, bisa dilacak dan dijerat dengan hukum. Menurutnya, politisasi SARA merupakan kerawanan yang perlu diwaspadai bersama dalam pemilu nanti. Tidak boleh lagi peristiwa di pemilu-pemilu sebelumnya terulang di 2024.

“Kita harus jaga bersama-sama. Kita tidak ingin (pasca) pemilu kita tercerai berai, timbul permusuhan, residu dari pemilu itu sendiri,” ujarnya.

Berdasarkan kajian Bawaslu, politisasi SARA dapat bermuara pada kekerasan berbasis SARA. Media sosial

menjadi modus paling banyak yang digunakan oleh aktor-aktor tertentu untuk melakukan kampanye atau provokasi berbau SARA dalam pemilu.

Karena itu, Lolly mengatakan, Bawaslu bekerja sama dengan sejumlah pihak memitigasi kerawanan tersebut, salah satunya melalui patroli siber. Upaya ini melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta perusahaan penyedia layanan medsos, seperti Meta dan Tiktok.

“Bawaslu punya channel pelaporan cepat. Setelah kami kaji, kalau ada (konten) berpotensi menyebabkan dis-

masih bikin definisi yang kemudian multitafsir sehingga kita sendiri tidak menemukan titik temu,” ujarnya.

Menurut Lolly, definisi dan aturan yang jelas serta rigid mengenai politisasi SARA diperlukan untuk menangkal bahaya terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pihaknya mengajak semua pemangku kepentingan untuk duduk bersama guna melahirkan satu definisi yang dapat diamini oleh seluruh pihak.

Bawaslu juga mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi menyusun bank data kasus-kasus politisasi SARA sebagai kajian ilmiah. Upaya itu diper-



integrasi bangsa, isinya hasutan, kami punya channel khusus, sehingga take down-nya cepat,” ujarnya.

Lolly menambahkan, pelaku provokasi pun bisa dilacak di semua platform medsos. Pelaku bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun, Lolly menambahkan, kunci utama untuk memitigasi kerawanan ini adalah peran masyarakat agar menyebarkan informasi yang benar. Masyarakat juga diminta melaporkan ke Bawaslu jika menemukan pelanggaran terkait politisasi SARA.

Lolly juga meminta adanya upaya bersama untuk memperjelas definisi dan regulasi mengenai SARA. “Karena seringkali kita masih berdebat, kita

lakukan sebagai basis pembuatan kebijakan pencegahan di masa yang akan datang. Hasil pemetaan kerawanan yang dilakukan Bawaslu menyimpulkan kampanye bermuatan SARA di media sosial maupun di tempat umum serta mobilisasi penolakan calon berdasarkan SARA menjadi strategi umum politisasi SARA yang berujung pada kekerasan dan konflik berbasis SARA.

Kekerasan itu, sambungnya, memiliki modus yang beragam, seperti intimidasi, provokasi, bentrokan, dan kerusuhan antarpending. Lolly menyebut, ketika aksi saling provokasi dan intimidasi tidak dikelola dengan baik, dinamika konflik akan berkembang cepat dan menjadi sangat brutal. “Muaranya adalah bentrokan antarkelompok atau kerusuhan antarmassa yang berlarut-larut,” pungkasnya. ●

PEMILIH MUDA PENENTU INDONESIA EMAS

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengajak generasi muda, khususnya generasi Z, yang menjadi kelompok pemilih pemula di Pemilihan Umum 2024 untuk ikut ambil bagian secara aktif. Keterlibatan para pemilih pemula sangat penting mengingat generasi ini menjadi penentu masa depan bangsa.



"Pokoknya nasib negara ini, nasib masa depan bangsa ini, ada di tangan anak muda. Anak muda harus berpartisipasi untuk menyampaikan aspirasi politiknya (di Pemilu 2024)," kata Budi di Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023.

Budi mengatakan dari sisi Kementerian Kominfo, pihaknya terus mengajak anak muda agar bisa aktif menggunakan hak pilihnya saat Pemilu nanti lewat kegiatan literasi digital.

Literasi digital itu mengangkat tema Pemilu Damai 2024 yang menjadi bagian dari kampanye komunikasi untuk memastikan perhelatan pesta demokrasi itu bisa berjalan kondusif pada saat berlangsung di 14 Februari 2024.

Sebelumnya, literasi digital pernah juga diberikan kepada generasi Z sebagai pemilih pemula di Juli 2023 oleh Kementerian Kominfo. Saat itu, tema yang dihadirkan terkait dengan cara anak muda untuk bijak menangani konten-konten di media sosial yang mengandung muatan politik.

Para pemilih pemula diajarkan untuk

tidak terjebak dengan konten-konten yang bermuatan ingin memecah belah bangsa atau pun berisi ujaran kebencian. Literasi digital dengan muatan tersebut dilakukan Kementerian Kominfo agar peristiwa polarisasi masyarakat akibat Pemilu 2019 tidak kembali terulang.

Untuk menyukseskan kampanye Pemilu Damai 2024, Kementerian Kominfo juga sudah menyiapkan beberapa strategi. Misalnya lewat Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Kementerian Kominfo memberikan edukasi mengenai pentingnya netralitas untuk menciptakan Pemilu Damai 2024. Lalu, kerja sama juga dijalin Kementerian Kominfo dengan platform-platform digital seperti Meta, Google, dan TikTok untuk menangkal hoaks terkait Pemilu 2024.

Komunikasi lewat media sosial dengan mengangkat konten pentingnya Pemilu Damai yang dimiliki Kementerian Kominfo juga terus digencarkan agar generasi digital saat ini bisa lebih memahami pentingnya terlibat aktif dalam pemilu.

Selain soal Pemilu, Budi Arie juga

mengatakan infrastruktur dan kepemimpinan akan memperkuat ekosistem digital, sehingga pemerintah memberikan dukungan penuh dengan membangun infrastruktur digital lebih merata dan mendorong kepemimpinan digital.

"Indonesia berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekosistem digital melalui berbagai inisiatif," ujar Budi Arie dalam kegiatan China-Indonesia Executive Tech Summit: 4th Global Internet CEO Conference, berdasarkan pernyataan di Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023.

Budi Arie menyatakan saat ini pemerintah terus meningkatkan kualitas layanan internet dan memperluas cakupan dengan membangun beragam infrastruktur baik di hulu, tengah, dan hilir.

Dari sisi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi hulu, pihaknya telah menggelar jaringan tulang punggung serat optik di darat dan bawah laut, yang dilengkapi dengan penguatan lapisan middle-mile, melalui peluncuran Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) dengan total kapasitas 150 Gbps.

Selain itu, kata dia, Indonesia juga terus pemeratakan pembangunan base transceiver station (BTS) di last mile, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Untuk infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi hilir, Kementerian Kominfo juga mengembangkan infrastruktur digital Data Center," ucap Budi Arie.

Budi Arie mengatakan pemerintah juga mendorong kolaborasi lintas fungsi dengan berbagai mode dan penerapan strategi kepemimpinan digital, serta pengembangan kepemimpinan digital di tingkat C-Level untuk mendukung industri teknologi komunikasi.

"Kepemimpinan digital menekankan pada aspek fleksibilitas dalam memperluas peran di luar ekosistem, kolaborasi antar seluruh elemen dan transformasional untuk mengatasi tantangan di era digital," terang mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, mengajak anak muda untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) guna memberikan suara dan tidak golput pada Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Kaesang saat bertemu dengan anak-anak muda Indramayu Jumat malam, 20 Oktober 2023. Dalam kesempatan itu, Kaesang juga berkelakar agar anak muda nyob-

los dulu di TPS baru merayakan Hari Kasih Sayang, mengingat hari pencoblosan jatuh pada 14 Februari 2024.

"Di sini jujur saya mau safari politik, tujuannya saya bukan nyuruh teman-teman nyoblos PSI, tapi saya minta teman-teman semua untuk datang ke TPS di 14 Februari 2024. Jadi yang mau valentine ditunda dulu, nyoblos dulu baru valentine-an," kata Kaesang.

Kaesang juga mempersilakan anak muda mencoblos siapapun, baik partai, maupun kandidat, yang sesuai dengan hati nurani masing-masing. "Sekali lagi saya tekankan buat datang ke TPS pada 14 Februari 2004 dan terserah mau pilih apa, terserah mau pilih siapa presidennya," tuturnya.

"Yang belum punya pasangan ya liat quick count saja atau nongkrong di sini sambil melihat-lihat berita siapa yang jadi presiden selanjutnya," kata Kaesang.

Koordinator Nasional Rumah Indonesia, Arman Saputra, mengatakan, demi mewujudkan cita-cita negara menuju Indonesia Emas 2045, anak muda diminta untuk berperan aktif dalam Pemilu 2024.

Menurutnya, siapa pun yang menjadi capres dan cawapres haruslah yang mampu melanjutkan program Presiden Joko Widodo. Sejauh ini, dirinya melihat Menteri BUMN Erick Thohir lebih populer di kalangan anak muda.

Atas pertimbangan itu, anak-anak

muda itu diyakini akan mendukung Erick Thohir dan siap bekerja dengannya. Sekalipun Erick Thohir belum memastikannya dukungan kepada paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD atau Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar hingga menjadi cawapres.

"Anak-anak muda tentu saja akan ikut mewarnai momentum politik kali ini, karena generasi muda akan mengambil bagian untuk membawa gagasan, ide dan pengetahuan unggul yang mengutamakan kolaborasi dan transformasi pikiran demi kemajuan pembangunan bangsa dan negaranya," kata Arman saat berdiskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 19 Oktober 2023.

Karena itu, Arman berharap kolaborasi seluruh anak muda Indonesia yang kompeten dan berprestasi tentu akan menjadi kekuatan dan semangat menciptakan karya-karya nyata agar terwujudnya pembangunan, perkembangan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

"Rumah Indonesia sebagai wadah kelompok relawan anak muda akan terus bekerja mengajak seluruh generasi muda Indonesia dari kota hingga pelosok desa agar berpartisipasi dalam perhelatan pesta demokrasi Pilpres 2024, dan akan terus menyuarakan gagasan dan pemikiran kepada capres-cawapres yang didukung, demi terwujudnya Indonesia Emas 2045," tutupnya. ●



JOKOWI: PILIH PEMIMPIN BERNYALI

Presiden Joko Widodo mengungkapkan kriteria pemimpin yang layak dipilih masyarakat pada Pemilu 2024. Dia menyebut keberanian dan nyali wajib dimiliki seorang presiden terpilih saat coblosan tahun depan.

“Mengenai pemimpin yang kita pilih, hati-hati memilih pemimpin. Tantangan ke depan bukan makin ringan tapi makin berat, dunia tidak baik-baik saja. Adanya krisis pangan, iklim, perlu pemimpin yang berani, yang punya nyali,” kata Jokowi pada gelaran Konsolidasi Nasional Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Sabtu, 7 Oktober 2023.

Jokowi menyampaikan seorang pemimpin negara harus berani mempertahankan kepentingan negaranya sendiri. Dia mencontohkan agar sosok presiden harus berani menghadapi kekuatan asing di panggung internasional.

“Jangan digertak negara lain sudah ciut. Misal digugat Uni Eropa ke WTO kita jadi grogi. Jangan Indonesia pu-

nya pemimpin yang nyalinya gampang ciut,” ujar Jokowi.

Dia juga mengingatkan supaya sosok presiden wajib berani mengambil risiko. Jokowi menyindir sosok presiden jangan sampai hanya mementingkan keselamatan pribadinya.

“Pemimpin harus berani ambil risiko, itu yang betul. Jangan hanya cari selamat, cari enak, nikmati enaknya duduk di Istana, tidur di Istana. Kalau maunya enak ya duduk saja di Istana. Ruangan ber-AC, makannya waduh enggak usah saya ceritakan. Tapi apakah kita mau cari pemimpin yang begitu? Kita kan cari pemimpin yang mau kerja keras untuk rakyatnya. Kalau ada masalah tidak menghindari tapi diselesaikan” ucap Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengungkapkan dirinya masih kerap geleng-geleng kepala ketika menemukan praktik polarisasi di Tanah Air. Jokowi tak ingin

pemilu jadi ajang terjadinya polarisasi.

“Saya kadang geleng-geleng, masyarakat di bawah masih rame, padahal pemimpin di atas sudah ngopi bareng. Yang di atas sudah makan bersama, di bawah masih rame,” kata Jokowi.

Jokowi mensinyalkan agar para pendukungnya tak perlu larut dalam emosi Pilpres 2019. Jokowi mengajak para pendukungnya menjadi pribadi dewasa di iklim demokrasi. Salah satu caranya dengan menanggalkan praktik ujaran kebencian dalam ajang Pemilu 2024.

Jokowi mengimbau masyarakat agar bersikap biasa dalam hajatan pemilu. Sehingga, segala emosi yang terjadi saat pemilu diharapkan tuntas sesuai Pemilu.

“Berkaitan 2024, kita berharap agar jalannya pemilu itu damai dan tidak ada lagi namanya ujaran kebencian,” ujar Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga tak ingin hoaks dan berita bohong berseliweran dalam Pemilu 2024. Jokowi mengajak publik menyadari makna pemilu sebagai pesta demokrasi.

Jokowi juga mengingatkan masyarakat agar kembali rukun pas-capenyelenggaraan pemilu. Sikap semacam ini yang menurut Jokowi akan membawa kemajuan bagi bangsa.

“Pemilu ada terus tiap lima tahun, kalau tiap pemilu saling menjelekkan, kapan bangsa ini jadi bangsa yang besar? Karena bangsa besar kalau kita junjung persatuan kita. Jangan pemilu buat kita terpecah belah,” ucap Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini juga mengemukakan relawan harus berperan sebagai sistem pendingin menghadapi dinamika politik yang terjadi



di masyarakat menjelang kontestasi Pemilu 2024.

"Tolong, saya minta bantuan seluruh relawan agar seluruh relawan jadi sistem pendingin yang membuat suasana adem di bawah," kata Jokowi.

Jokowi berpesan kepada sekitar 16 ribu Relawan Alap-Alap Jokowi bahwa kontestasi Pemilu 2024 merupakan ajang politik yang rutin diselenggarakan setiap lima tahun sekali di Indonesia. "Kalau ada yang panas-panas, sudah disiram air biar dingin. Kalau ada ribut kecil di bawah, beri wejangan, beritahu bahwa pemilu selalu ada setiap lima tahun," kata Jokowi.

Jokowi berharap kontestasi Pemilu 2024 dapat berjalan damai tanpa diwarnai intrik politik, seperti ujaran kebencian hingga berita bohong atau hoaks. Pemilu harus dijalani dengan riang dan gembira karena setiap lima tahun sekali pemilu akan terus digelar.

"Kalau setiap pemilu saling benci, memfitnah, saling menjelekkan, dan saling merendahkan, kapan bangsa ini jadi bangsa besar," katanya.

Jokowi menambahkan, kepemimpinan nasional dalam periode 2024, 2029, dan 2034 menjadi kunci bagi lompatan Indonesia menjadi negara maju.

"Kepemimpinan ke depan itu sangat menentukan sekali, 2024, 2029, dan 2034, itu sangat-sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak," kata Jokowi.

Jokowi menyampaikan bahwa figur pemimpin yang ideal bagi Indonesia adalah yang bernyali besar, mau bekerja keras untuk rakyat, berani menyelesaikan persoalan bangsa, serta berani mengambil risiko menghadapi tantangan global.

"Tidak perlu saya sampaikan, tapi Bapak Ibu, semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena ini adalah negara demokrasi, kedaulatan itu ada di tangan rakyat," katanya.

Jokowi mengatakan geografis Indonesia yang memiliki sekitar 17 ribu pulau memberikan tantangan tersendiri bagi pemimpin nasional di masa depan. Sebab, pemerintah harus hadir memfasilitasi ragam kebutuhan infrastruktur publik, seperti listrik, sekolah, puskesmas, rumah sakit, pelabuhan, bandara hingga kebutuhan bahan ba-

kar minyak secara merata dan berkeadilan di setiap pulau.

"Ini negara besar, dari Sabang sampai Merauke sangat luas jangan dibandingkan dengan negara kecil yang mengelolanya jauh lebih mudah. Bapak Ibu bisa membayangkan, betapa sangat rumitnya mengelola negara ini," katanya.

Jokowi mengakhiri arahnya dengan meminta seluruh relawan untuk menatap masa depan bangsa Indonesia lebih optimistis dalam menggapai target sebagai negara maju.

"Karena kepemimpinan ini hitung-hitungan dari lembaga dunia, baik Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) itu sudah berhitung bahwa Indonesia akan masuk jadi negara maju itu kurang lebih 20 atau 25 tahun yang akan datang," katanya.

Sementara itu, Penanggungjawab Relawan Jaringan Alap-Alap Jokowi, Isnaini, mengatakan pihaknya siap

tanpa direncanakan. Proses konsolidasi sudah dilakukan panitia dan relawan sejak Mei 2022.

"Semula per regional sekarang menjadi hanya satu grup nasional. Setahun kemudian kami pertemukan simpul di Jawa dengan luar Jawa terutama dari Indonesia Timur di Kota Surabaya. Proses inilah yang akhirnya membuahkannya 93 wilayah kota/kabupaten akan datang di SICC," ujar Isnaini.

Peserta luar Jawa dominan dari Indonesia timur, yakni Jayapura, Sorong, Kupang, Flores, Bima, Lombok, Makassar, Gowa, Jeneponto, Kendari, Gorontalo, Manado, Ambon. Tetapi juga ada peserta dari Aceh, Medan, Bangka Belitung, Batam, Jambi, Palembang, Lampung, Palangka Raya, Banjarmasin, hingga Pontianak.

Sementara untuk Jawa, Isnaini menyebut angka 70 kota/kabupaten di Jatim, Jateng, DIY, Banten, Jabar dan Jabodetabek. Isnaini berharap Presiden



mengikuti instruksi Joko Widodo untuk Pemilu 2024.

"Kami dibawa ke kanan, ke kiri, maju, atau mundur, semua siap," kata Isnaini.

Isnaini menegaskan seluruh jaringan relawan pimpinannya akan mengikuti perintah Jokowi dalam mendukung sosok bakal calon presiden di Pemilu 2024.

Dia memaparkan gelaran Konsolidasi Nasional di SICC tersebut bukan

Jokowi nanti menjadi simbol pemer-satu seluruh simpul Relawan Jokowi. Hal itu termasuk dalam gelaran Pemilu 2024.

"Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi. Mestinya rakyat ikut riang gembira. Bukan sebaliknya diadu sana-sini, ditarik sana-sini untuk kepentingan sesaat. Harusnya Pak Jokowi menjadi kekuatan persatuan relawan," ujar Isnaini. ●



CALON GUBERNUR KALTENG MULAI BERANI DEKLARASI

Beberapa nama mulai bermunculan dan mendeklarasikan diri maju dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah 2024. Mereka di antaranya Abdul Razak, Nadalsyah, hingga Supian Hadi.

Kalimantan Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, ragam budaya, suku bangsa, dan agama. Untuk menghadapi tantangan pembangunan masa depan yang semakin



meningkat, diperlukan sosok pemimpin yang memiliki visi dan kemampuan untuk mengambil kebijakan yang tepat.

Abdul Razak dinilai oleh berbagai kalangan sebagai pemimpin yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Kalteng dalam lima tahun ke depan.

Saat ini, Abdul Razak terus mendapatkan dukungan dari berbagai tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan berbagai kalangan lainnya untuk maju sebagai calon gubernur Kalteng periode 2024-2029.

Dukungan tersebut datang dari berbagai kelompok dan organisasi, seperti Angkatan Penerus Perjuangan Gerakan Mandau Talawang Pancasila (APP GMTPS), Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Tengah, serta anggota legislatif di DPRD Kalimantan Tengah dari berbagai partai politik, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kalimantan Tengah.

Selain itu, dukungan juga datang dari Persatuan Pensiunan Kehutanan (Pershutindo) Kalimantan Tengah, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kalimantan Tengah, Hidayatullah Kalimantan Tengah, Buddhayana Indonesia Palangka Raya, dan sejumlah kelompok gereja di Palangka Raya.

Dukungan juga datang dari kaum milenial Kalimantan Tengah yang tergabung dalam Milenial For Abdul Razak (MFAR) dan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG)

Kalimantan Tengah.

Ketua DPP Paguyuban Keluarga Besar Flobamora Kalteng periode 2023-2028, Gregorius Doni Senun, menilai, sosok Abdul Razak layak untuk menjadi gubernur Kalteng.

"Sosok Abdul Razak yang merupakan tokoh masyarakat dan saat ini Wakil Ketua DPRD Kalteng tiga periode, layak menjadi gubernur Kalteng," ucapnya.

Abdul Razak sendiri menyatakan siap maju sebagai calon gubernur Kalteng pada pesta demokrasi 2024. "Kesiapan saya untuk maju dalam pemilihan gubernur Kalimantan Tengah 2024 mendatang berdasarkan arahan dan petunjuk Ketua DPD Partai Golkar Kalteng Ruslan AS," ungkap Abdul Razak.

Abdul Razak memohon dukungan semua pihak, terutama warga dari Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) yang di wilayah Kalimantan Tengah yang jumlahnya diklaim sebanyak 30 persen dari penduduk Kalteng.

"Apapun keputusan partai, maka saya harus siap melaksanakan amanah untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah pada 2024 mendatang," tegas Abdul Razak.

Sedangkan, kandidat calon gubernur yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kalteng, Nadalsyah, merasa optimistis untuk bersaing dalam Pilgub Kalteng 2024. "Sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak ikut dalam Pilgub 2024," katanya.

Sebagai langkah awal, Nadalsyah berencana untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR sebelum kemudian mengambil langkah serius dalam Pilgub Kalteng.

"Saya memohon doa restu dari masyarakat Kalimantan Tengah," tambahnya.

Nadalsyah mengakui bahwa selama ini belum ada komunikasi politik secara

formal terkait Pilgub 2024. Namun, ia mengindikasikan bahwa telah terjadi komunikasi informal yang bersifat membangun dukungan.

"Mantap, Insya Allah mantap dalam Pilgub 2024," ujarnya.

Sementara, mantan Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi, akhirnya menyatakan kesiapannya mencalonkan diri sebagai gubernur Kalteng pada Pilgub 2024.

"Saya siap maju untuk menjadi kandidat calon gubernur Kalteng. Secara mental dan semua saya siap untuk maju dalam Pilgub Kalteng 2024," tegasnya, belum lama ini.

Supian Hadi yang merupakan kader PDIP itu memohon dukungan masyarakat Kalteng untuk mencalonkan dirinya sebagai gubernur Kalteng. Meski diketahui dari partai mocong putih itu juga ramai digadangkan Agustiar Sabran maju dalam Pilgub nanti.

"Semua dari partai ada beberapa, mungkin PDIP ada beberapa yang ingin, di Golkar juga ada beberapa. Tapi partai akan melihat dan memilih serta menentukan," ungkapnya.



Apapun keputusan partai, maka saya harus siap melaksanakan amanah untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah pada 2024 mendatang

Ketua DPC PDIP Kotim, Halikinnor, menganggap wajar keinginan mantan Bupati Kotim, Supian Hadi, untuk maju dalam Pilgub Kalteng 2024.

Halikinnor mengatakan semua individu memiliki hak untuk bersaing dalam pemilihan umum, termasuk Pilgub, Pilkada, dan lainnya. Ia juga menegaskan Supian Hadi yang merupakan kader

PDIP memiliki kapasitas dan potensi untuk maju sebagai calon gubernur.

"Siapa pun berhak, apalagi Supian Hadi kan Kader PDIP, jadi wajar saja. Beliau sudah dua kali menjabat sebagai bupati, tentunya memiliki kapasitas dan potensi untuk maju sebagai gubernur," ujar Halikinnor.

Meskipun demikian, Halikinnor mengungkapkan bahwa hingga saat ini, PDIP belum memberikan instruksi resmi terkait Pilgub, termasuk calon kader yang akan diusung oleh partai dalam pemilihan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan arahan dari DPP PDIP, para kader partai sekarang lebih difokuskan pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.

Para kader PDIP diarahkan untuk turun ke masyarakat guna melakukan sosialisasi terkait calon presiden yang sudah ditetapkan oleh partai, meskipun belum resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jadi, siapa pun kader PDIP, terutama yang memiliki potensi, bisa saja dan berhak untuk maju. Keputusan akhir akan ditentukan oleh partai pada waktunya," pungkas Halikinnor. ●



5 TOKOH UTAMA PERKEMBANGAN JAKARTA

Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Jakarta Selatan (Jaksel) telah memberikan dukungan dan dorongan kepada Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, dan Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2024.

Bendahara Umum MD KAHMI Jakarta Selatan, Harjono menyatakan bahwa keduanya merupakan pilihan yang sangat tepat untuk menjadi cagub DKI Jakarta tahun 2024 berdasarkan pengalaman mereka yang cukup baik dalam dunia

pemerintahan.

Menurutnya, keduanya juga memiliki pengakuan luas di kalangan masyarakat karena keterlibatan mereka di bidang legislatif, satu di tingkat nasional dan yang lainnya di tingkat DKI Jakarta.

"Ahmad Ali dan Prasetyo Edi adalah individu yang baik dan memiliki pengaruh yang besar, serta memiliki pengalaman yang kuat di lembaga legislatif," ujar Harjono.

Meskipun demikian, Harjono mengungkapkan bahwa MD KAHMI Jakarta Selatan belum menerima pernyataan resmi dari KAHMI Jaya yang mendukung lima tokoh Jakarta sebagai kandidat cagub DKI Jakarta.

KAHMI Jaya sebelumnya telah mengusulkan lima tokoh sebagai kandidat cagub DKI Jakarta

dalam Pilgub DKI 2024. Salah satunya adalah Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Ketua KAHMI Jaya, M Syaiful Jihad, menyebutkan bahwa empat tokoh lainnya yang diusulkan adalah Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, Deputy Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Marullah Matali, Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR), KH Lutfi Hakim, dan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

Syaiful menjelaskan bahwa Ahmad Ali memiliki kualifikasi yang cocok untuk menjadi Gubernur DKI berdasarkan pengalamannya, status sebagai alumni HMI, keberhasilannya sebagai pengusaha, dan pengalaman politiknya sebagai anggota DPR serta Ketua Fraksi NasDem DPR dan Komisi III DPR.

Sementara itu, Prasetyo Edi Marsudi dianggap sebagai tokoh utama dalam perkembangan Jakarta karena pengalamannya sebagai Ketua DPRD DKI selama dua periode, yang membuatnya sangat menguasai penataan dan pembangunan di Jakarta.

"Pak Pras adalah tokoh kunci yang populer di Jakarta dan telah berkontribusi dalam dinamika pembangunan Jakarta selama 10 tahun terakhir," kata Syaiful.

Marullah Matali dikenal luas di kalangan komunitas Betawi di Jakarta, sementara KH Lutfi Hakim adalah sosok yang dekat dengan masyarakat Betawi dan juga merupakan kader HMI Cabang Ciputat.



Terakhir, Ahmad Riza Patria, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa periode 2017-2022, juga dianggap sebagai tokoh yang memiliki pengalaman dalam perkembangan Jakarta, meskipun masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur hanya beberapa tahun.

"Sekelompok lima tokoh ini dianggap pantas untuk menjadi pemimpin Jakarta dalam Pilgub Jakarta tahun 2024. Mereka memenuhi syarat untuk memimpin Jakarta di masa depan," demikian disampaikan Syaiful.

Hanya saja, sejumlah partai politik belum secara aktif membahas Pilgub DKI Jakarta, meskipun tinggal satu tahun lagi. Meskipun beberapa nama calon potensial telah muncul dalam perbincangan publik mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang, beberapa partai yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengakui bahwa mereka belum memprioritaskan perbincangan mengenai Pilgub DKI Jakarta.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih belum mengambil langkah lebih lanjut dalam persiapan untuk menghadapi Pilgub DKI Jakarta 2024.

Gembong Warsono, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P DKI Jakarta, menjelaskan bahwa partai tersebut saat ini sedang berfokus pada perencanaan strategi untuk Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Oh, tentang Pilgub DKI belum. Kami masih berkonsentrasi pada Pileg dan Pilpres. Jadi, belum ada pembahasan yang intens mengenai Pilgub DKI," ujar Gembong.

Gembong juga me-

gaskan bahwa hal ini sesuai dengan arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P kepada seluruh pengurus



Pak Pras adalah tokoh kunci yang populer di Jakarta dan telah berkontribusi dalam dinamika pembangunan Jakarta selama 10 tahun terakhir.

partai, termasuk di DKI Jakarta.

"Setelah Pileg dan Pilpres berlalu, kami akan lebih intens

mempersiapkan diri menghadapi Pilgub 2024. Karena memang kami diminta untuk

f o k u s

terlebih dahulu pada Pileg dan Pilpres," kata Gembong.

Sedangkan Partai Gerindra DKI juga belum membahas secara mendalam persiapan atau calon yang akan diusung dalam Pilgub Jakarta 2024. Saat ini, DPD Gerindra juga mengikuti fokus DPP Gerindra yang tengah mempersiapkan strategi untuk Pilpres dan Pileg 2024.

"Semua perhatian saat ini tertuju pada Pilpres dan Pileg 2024," kata Rahayu Saraswati, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, yang juga merupakan keponakan Prabowo Subianto.

Rahayu Saraswati juga menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada nama-nama yang dipertimbangkan untuk bertarung dalam kontestasi politik di DKI Jakarta.

Menurut analisis politik dari Ipsos Public Affairs, Arif Nurul Imam, situasi ini adalah hal yang wajar. Hal ini disebabkan oleh fokus hampir seluruh partai politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, yang akan berlangsung lebih awal dibandingkan Pilgub 2024.

"Hari ini, kita prioritas Pileg dan Pilpres, baru kemudian Pilgub. Oleh karena itu, partai politik dan elite politik saat ini lebih fokus pada Pemilihan Legislatif dan Pilpres," kata Arif. •



PELUANG ANDI SUDIRMAN DALAM PILGUB SULSEL SEBAGAI PETAHANA POPULER

Andi Sudirman Sulaiman (ASS), memiliki potensi untuk kembali maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2024.

Jika memutuskan untuk bertarung kembali, Andi Sudirman memiliki peluang besar untuk terpilih kembali sebagai gubernur karena statusnya sebagai petahana yang populer.

Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Sukri Tamma, nama Andi Sudirman dianggap layak masuk dalam bursa calon gubernur adalah hal yang wajar.

Menurut Sukri, hal ini karena kepala daerah yang menjabat biasanya cenderung maju lagi di periode kedua.

Sukri juga mencatat bahwa meskipun Andi Sudirman belum secara resmi menyatakan niatnya untuk maju, namun tanda-tanda keinginan tersebut sudah mulai terlihat.

"Andi Sudirman aktif mensosialisasikan dirinya dalam berbagai kesempatan kunjungan kerja di daerah yang merupakan indikator kuat bahwa ia berpotensi maju dalam Pilgub Sulsel 2024," jelasnya.

Sukri juga menyoroti kedekatan Andi Sudirman dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, interaksi ini sebagai upaya untuk memperkuat basis politiknya.

"Kehadiran Prabowo dalam beberapa acara di Sulsel dianggap sebagai bagian dari strategi sosialisasi Andi Sudirman, bahkan

dapat membuka peluang kerjasama dengan Partai Gerindra jika ia memutuskan maju dalam Pilgub," bebarnya.

Keunggulan Andi Sudirman sebagai petahana juga menjadi faktor penting dalam Pilgub Sulsel. Statusnya sebagai petahana memberinya keunggulan awal karena popularitasnya yang tinggi dan pengalaman kerjanya sebagai gubernur.

Saat ini, belum ada figur calon gubernur yang dengan tegas memproklamkan diri, kecuali kader Golkar, Ilham Arief Sirajuddin.

Namun, ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh Andi Sudirman dalam perjalanannya menuju Pilgub Sulsel.

"Salah satunya adalah potensi adanya hambatan fundamental, seperti masalah hukum atau skandal politik yang dapat menghambatnya maju," jelasnya.

Selain itu, isu adanya kemungkinan kakak kandung Andi Sudirman, Andi Amran Sulaiman, juga akan maju dalam Pilgub Sulsel bisa menjadi pertimbangan bagi Andi Sudirman.

Sukri Tamma, mengungkapkan bahwa kemunculan nama-nama Cagub Sulsel 2024 tidak terjadi begitu saja.

Mereka telah membangun reputasi dan kehadiran di berbagai konteks sehingga di-



gap memiliki kapabilitas untuk bersaing.

Nama-nama yang kini mencuat adalah Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum DPP Golkar, yang sebelumnya pernah mencalonkan diri pada Pilgub 2018, namun kalah.

Andi Iwan Darmawan Aras, Ketua Umum DPD Gerindra Sulsel. Rusdi Masse, Mantan Bupati Sidrap selama dua periode dan Ketua Umum DPW Nas-Dem Sulsel. Adnan Purichta Ichsan, Bupati Gowa yang telah menjabat selama dua periode dan memiliki pengalaman sebagai anggota DPRD Sulsel selama dua periode.

Ilham Arief Sirajuddin (IAS), Mantan Wali Kota Makassar yang pernah bertarung di Pilgub Sulsel 2013 sebagai pasangan Aziz Qahhar Mudzakkar. Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto, Nama Wali Kota. Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Utara dan Ketua DPD II Golkar Luwu Utara. Taufan Pawe: Wali Kota Parepare dan Ketua DPD I Golkar Sulsel.

Andi Fahsar M Padjalangi, Bupati Bone yang juga menjabat sebagai Ketua DPD II Golkar Bone. Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki, Eks Pangdam XIV/Hasanuddin yang juga masuk dalam daftar calon yang akan menantang Andi Sudirman Sulaiman dalam Pilgub Sulsel mendatang.

Kemunculan nama-nama ini menunjukkan bahwa persaingan dalam Pilgub Sulsel 2024 akan menjadi salah satu yang sangat menarik untuk diikuti. Masyarakat Sulsel akan memiliki banyak pilihan dalam menentukan pemimpin mereka di masa mendatang.

Andi Sudirman Sulaiman, telah memberikan tanggapannya terkait wacana kemungkinan akan kembali bertarung dalam kontestasi Pilgub Sulsel 2024. Namun, hingga saat ini, Andi Sudirman belum memutuskan apakah akan maju sebagai petahana atau tidak.

"Kita hanya bisa berdoa kepada Allah SWT. Semoga yang terbaik insyaallah. Mari kita berdoa saja," katanya.

Berita terbaru mengenai Pilgub

Sulsel 2024 telah mencatat kemunculan sejumlah figur calon gubernur yang siap menantang petahana, Andi Sudirman Sulaiman. Seperti yang diberitakan, setidaknya ada 10 tokoh yang mencuat sebagai pesaing dalam kontestasi politik ini.

Diketahui bahwa Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto telah resmi menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Senin, 28 Agustus 2023.

Bergabungnya Danny dengan PDIP dianggap akan berdampak pada posisi politiknya dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 mendatang.

Danny Pomanto telah lama dianggap sebagai salah satu figur yang berpotensi maju dalam Pilgub Sulsel 2024 mendatang.

Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Andi Luhur Priyanto menganggap bahwa keputusan Danny untuk bergabung dengan PDIP adalah langkah awal dalam persaingan politik melawan Andi Sudirman Sulaiman, yang saat itu menjabat se-

bagai inkumben dalam Pilgub Sulsel 2024.

"Bergabungnya Danny Pomanto ke PDIP juga menandakan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo, sambil mempertaruhkan kebijakan Andi Sudirman Sulaiman dalam mendukung Prabowo. Dengan demikian, formasi dukungan partai dalam Pilgub Sulsel 2024 mulai terlihat lebih jelas," ulasnya.

Sementara itu, Danny Pomanto sendiri enggan memberikan banyak komentar mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Ketika diwawancarai, Danny menyatakan bahwa saat ini fokus utamanya adalah memenangkan PDIP dalam Pilpres dan Pileg 2024.

"Itu pasti urusan di pimpinan-pimpinan partai. Urusan saya adalah memperjuangkan partai ini, bagaimana berjuang untuk masyarakat. Itu yang saya fokuskan," ungkap Danny.

Danny menekankan bahwa saat ini fokusnya adalah memenangkan PDIP dalam pemilihan demokratis yang akan datang pada tahun 2024. Dia berkomitmen untuk berjuang dengan sepenuh tenaga untuk tujuan tersebut.

"Kita Pilpres dulu sama Pileg, Pilkada itu belakangan. Kita konsentrasi dulu Pileg sama Pilpres. Bahwa persoalan hasil itu di belakang, perjuangan yang penting," tambahnya. ●



NTT BUTUH PEMIMPIN BAWA PERUBAHAN DAN PERBAIKAN

Suhu politik menjelang Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur 2024 terus memanas. Banyak calon kandidat yang telah muncul dan menyatakan kesiapannya untuk memimpin NTT.



Suhu politik menjelang Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur 2024 terus memanas. Banyak calon kandidat yang telah muncul dan menyatakan kesiapannya untuk memimpin NTT.

Hal ini menggambarkan betapa dinamisnya politik di daerah tersebut dengan jargon politik “jualan” para bakal calon Gubernur NTT yang telah mereka susun.

Para calon ini membawa beragam wacana perbaikan dan perubahan di berbagai sektor, termasuk pertanian, ekonomi, kesehatan, pendidikan, pariwisata, pengangguran, ketenagakerjaan, hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai janji-janji jika terpilih sebagai orang nomor satu di NTT nanti.

Guru Besar Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Fredrik Benu, mengungkapkan gagasan para bakal calon gubernur NTT adalah langkah yang sah, tergantung dari sudut pandang masing-masing.

Menurutnya, ada tiga aspek penting di NTT yaitu pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Bergantung pada prioritas masing-masing calon, fokus pada peningkatan mutu pendidikan, seperti yang diusulkan oleh Fransiscus Go, adalah langkah yang baik dan ia menghormat-

inya.

Namun, ia juga menekankan bahwa masalah ekonomi dan kesehatan masyarakat NTT tidak boleh diabaikan dan harus diatasi bersama-sama.

“Ada tiga sampai empat program yang harus dikerjakan, yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, pariwisata, dan ketenagakerjaan,” ujar Fred Benu.

Dia juga mengingatkan bahwa efek dari program strategis dapat berlangsung dalam jangka panjang maupun



Namun, mereka juga menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus diiringi dengan upaya dalam sektor-sektor lainnya agar NTT dapat mencapai perkembangan yang lebih baik

pendek. Oleh karena itu, ia mengajak Frans Go untuk mempertimbangkan untung ruginya secara politik jika pendidikan menjadi prioritasnya saat menjabat nanti.

Ia mengingatkan bahwa jabatan seorang gubernur hanya berlangsung selama lima tahun dan pemimpin harus mengevaluasi program kerjanya di akhir masa jabatan.

Sebagai seorang akademisi, Fred Benu bersedia mendukung calon pemimpin NTT yang fokus pada Pendidikan. Namun, dia menegaskan bahwa aspek lain seperti ekonomi, kesehatan, pariwisata, dan ketenagakerjaan juga harus diperhatikan.

Pendapat serupa juga datang dari dosen dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Anthonius Bele. Ia mengapresiasi jika pendidikan menjadi prioritas bagi calon pemimpin NTT. Namun, dia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan sektor-sektor lain seperti ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Namun, mereka juga menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus diiringi dengan upaya dalam sektor-sektor lainnya agar NTT dapat mencapai perkembangan yang lebih baik," tambahnya.

Diketahui sejumlah nama potensial telah muncul dan menjadi perbincangan di kalangan sebagai calon gubernur NTT. Salah satunya adalah Yohanis Fransiskus Lema yang merupakan seorang politisi muda asal NTT. Awal kariernya sebagai dosen di Universitas Nasional memperkuat kualifikasinya sebagai seorang akademisi.

Selain itu, dia juga terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian dan telah berperan sebagai konsultan di beberapa perusahaan multinasional di berbagai negara, termasuk Jakarta, Malaysia, Singapura, Amerika, dan Afrika. Kombinasi usia muda dan kekayaan pribadinya

membuatnya menarik perhatian.

Nama lain yang ikut mencuat adalah Melki Laka Lena yang sudah dikenal luas di NTT. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar NTT dan pernah terpilih sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR setelah Pileg 2019 dari Dapil NTT 2.

Selanjutnya, ada Juli Sutrisno Laiskodat, istri mantan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat. Julie Laiskodat telah menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon gubernur NTT menggantikan suaminya yang tidak mencalonkan diri lagi di Pilgub NTT 2024.

Julie Laiskodat sedang diperbincangkan sebagai salah satu calon potensial dalam Pilgub NTT 2024. Namun, Julie belum memberikan pernyataan tegas mengenai kesiapannya untuk maju dalam Pilgub NTT.

"Sejauh ini memang belum ada pembahasan dengan suami saya, Viktor Laiskodat. Tetapi selama suami saya dan ketua umum saya, Surya Paloh, memberikan izin, saya pasti akan siap. Toh, masih ada waktu yang cukup lama, kita tunggu tanggal mainnya

saja," ucap Julie belum lama ini.

Julie juga menyebut bahwa partai NasDem masih dalam tahap mencari kader terbaik untuk melanjutkan kerja yang telah dilakukan oleh mantan suaminya, Viktor Laiskodat, selama lima tahun terakhir.

"Meskipun saya memiliki niat untuk maju, jika hasil survei menunjukkan dukungan yang minim, maka keputusan akhir akan dilakukan oleh partai setelah melakukan survei yang lebih mendalam. Yang pasti, izin dari suami saya, Viktor Laiskodat, merupakan syarat mutlak," tambahnya.

Frans Aba juga merupakan salah satu figur yang ramai dibicarakan oleh warganet. Ia meraih gelar *Philosophi of Doctoral* dari University Sains Malaysia.

Selain itu, ada juga nama Orias Petrus Moedak. Ia secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk menjadi calon gubernur NTT. Orias Petrus Moedak memiliki karier yang cemerlang, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Ada juga Iskandar Laka yang pernah menjabat sebagai Staf Ahli DPRD Pasuruan dan terlibat dalam berbagai peran penting di media massa nasional. Ia juga merupakan pendiri dari Law Firm "IL" & Associates serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Fajar Panca Yudha." ●



PERSAINGAN KETAT CALON POTENSIAL, MASIH MENAHAN DIRI

Lembaga survei Curva Survei Indonesia (CSI) telah melakukan analisis mengenai peta politik yang akan memengaruhi Pilkada Gorontalo pada 2024 mendatang.

Secara khusus, dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024, menurut hasil analisis CSI saat ini situasinya masih relatif tenang. Belum ada calon yang menunjukkan tindakan politik yang agresif.

Meskipun hasil survei awal menunjukkan adanya persaingan yang cukup ketat di antara para calon potensial, tampaknya mereka masih menahan diri dan menunggu hasil dari Pemilu yang akan berlangsung pada Februari 2024 mendatang.

Direktur CSI Gorontalo, Hendra Yasin menjelaskan bahwa kesuksesan dalam Pemilu ini akan memiliki dampak signifikan pada peta politik Pilgub. Partai politik yang mendukung calon-calon tertentu akan mulai aktif bergerak menuju Pilkada Gorontalo 2024 nanti.

Menurut Hendra, saat ini, partai-partai di Gorontalo fokus pada upaya meraih kursi dalam Pemilu 2024.

"Raihan kursi sangat menentukan siapa yang akan maju dalam Pilgub dan dengan siapa partai akan berkoalisi, termasuk kemungkinan hadirnya calon in-

dependen," ungkap Hendra.

Hendra juga menyebutkan bahwa sudah ada beberapa nama yang banyak disebut-sebut sebagai potensial calon dalam Pilkada 2024.

Misalnya, dari Partai Golkar ada Ida Syahida, Roem Kono, Marten Taha, Syarif Mbuinga, Toni Uloli, dan Zainudin Amali. Sementara dari Partai Gerindra ada Elnino Mohi, dan dari Partai Nasdem ada Rachmat Gobel, Hamim Pou, dan Abdullah Gobel.

"Meskipun nama-nama ini cukup populer di kalangan masyarakat, keputusan akhir untuk maju atau tidak dalam Pilkada 2024 akan sangat bergantung pada hasil dari Pemilu 2024 mendatang," ulasnya.

Sebelumnya juga konstalasi politik menuju 2024 kembali menjadi topik

utama dalam acara pelantikan KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini menjadi ajang diskusi tentang tokoh-tokoh potensial dari Gorontalo yang mungkin akan mencalonkan diri dalam Pilgub 2024.

Anggota Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo, Arifin Djakani yang juga menjabat sebagai Presidium KAHMI menyebut Nelson Pomalingo dan Marten Taha adalah dua tokoh yang layak dijagokan sebagai calon Gubernur dalam Pilgub tersebut.

"Ya, Nelson dan Marten layak untuk maju dalam Pilgub 2024. Keduanya memiliki pengalaman yang cukup dan mereka cocok untuk posisi tersebut," ujar Arifin.

Nelson Pomalingo telah dua kali memimpin Kabupaten Gorontalo, yang merupakan salah satu daerah terbesar di provinsi ini. Sementara Marten Taha juga telah dua periode memimpin ibukota provinsi Gorontalo sebelum provinsi ini berdiri sendiri. Pengalaman mereka memimpin daerah ini bisa men-



jadi tolak ukur untuk mendukung mereka sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur di masa mendatang.

Selain itu, keanggotaan mereka dalam KAHMI juga memberikan modal tambahan. Dengan bersama-sama di korps ini, mereka memiliki peluang lebih besar untuk menyatukan visi dan misi mereka dalam membangun Provinsi Gorontalo ke depan.

Arifin juga menilai bahwa selain Nelson dan Marten, beberapa Presidium KAHMI lainnya juga layak dipertimbangkan sebagai calon dalam Pilgub 2024.

Salah satu contohnya adalah Thariq Modanggu, tokoh yang menggagas 'Motabi Kambungu.' Menurut Arifin, Thariq juga pantas untuk memimpin Gorut untuk periode kedua.

"Ya, Pak Thariq juga layak untuk memimpin Gorut dalam periode kedua," kata Arifin.

Selain itu, Arifin juga menyebut nama Hamim Pou sebagai potensi calon di DPRD Sulawesi Utara dan Lahmudin Hambali yang layak untuk kembali bekerja sebagai wakil rakyat di Boalemo.

Bahkan, Dahlan Usman, yang selalu berjuang bersama petani, juga dianggap layak untuk berjuang demi kepentingan masyarakat.

"Intinya, semua Presidium KAHMI ini adalah tokoh-tokoh potensial yang layak menjadi pemimpin bagi rakyat," tambahnya.

Tentu saja, konstalasi politik ini masih akan mengalami banyak perubahan dan perkembangan dalam beberapa tahun ke depan. Namun, dengan banyaknya tokoh potensial di Provinsi Gorontalo, Pilgub 2024 diharapkan akan menjadi kontes yang menarik dan berpotensi menghasilkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat.

S e -

mentara Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, memberikan tanggapan terhadap isu bahwa Partai Gerindra akan mengusungnya sebagai calon Gubernur dalam Pilgub Gorontalo 2024. Hamim menyatakan penghargaannya terhadap pernyataan Gerindra yang mengindikasikan potensi dirinya sebagai calon.

"Terima kasih kepada teman-teman saya di Gerindra yang menghargai kemungkinan saya maju. Saya sangat menghormatinya. Di Gerindra, juga ada banyak kader-kader yang sangat berkualitas. Sekali lagi, kita bisa berkolaborasi," ucap Hamim.

Sebelumnya, nama Hamim Pou mencuat setelah juru bicara Gerindra Gorontalo menyatakan bahwa Hamim Pou layak diusung sebagai calon Gubernur Gorontalo. Hamim diakui sebagai seorang bupati yang berhasil mengatasi berbagai masalah di masyarakat Gorontalo, terutama di Kabupaten Bone Bolango.

Hamim Pou diketahui akan maju sebagai Calon Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara. Oleh karena itu, sebagai politikus Nasdem, dia harus mengundurkan diri dari jabatan bupati dan akan secara resmi berhenti setelah namanya terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

"Seiring dengan itu, secara otomatis, saya akan

berhenti menjadi Kepala Daerah, tetapi hal ini akan melalui proses Paripurna di DPRD Kabupaten Bone Bolango, dan saya akan tetap berkoordinasi dengan kementerian," tambahnya.

Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kris Wartabone, telah mengumumkan kesiapannya untuk bersaing dalam Pilkada 2024.

Kris menyatakan bahwa jika partainya mengamanahkan padanya untuk menjadi seorang pemimpin daerah, dia akan siap dengan sepenuh hati.

"Jika saya diberikan tugas ini, saya akan siap sepenuhnya, baik secara fisik maupun spiritual, dan siap untuk meraih kemenangan," ungkap Kris.

Menurut Kris, ia melihat sebagai kewajiban pribadinya untuk bersedia maju sebagai calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, atau Walikota jika partainya mengarahkan dia ke arah itu.

"Impian PDI Perjuangan pada tahun 2024 adalah untuk melaksanakan misi ini," tambah Kris Wartabone.

Kris juga menegaskan bahwa partainya akan terus memajukan misi ini jika mendapat respons positif dari masyarakat.

"Kami, sebagai anggota PDIP, berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat, dan itu akan selalu menjadi prioritas kami," kata Kris.

Dia menunjukkan bahwa dia tidak akan terguncang jika akhirnya dia tidak terpilih sebagai pemimpin daerah. Kris menyadari bahwa banyak pemimpin daerah yang harus menghadapi kegagalan berkali-kali sebelum akhirnya berhasil terpilih.

"Kris adalah seorang pejuang, dan kami mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu," pungkasnya. ●





CAPRES JANGAN MAINKAN POLITIK PECAH BELAH

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengingatkan kepada masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk tidak menggunakan cara-cara politik yang bisa memecah belah demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.

Listyo mengemukakan, Polri saat ini fokus pada pengamanan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024. Listyo mengatakan, sejauh ini sudah ada dua bakal paslon capres-dan cawapres telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga pelaksanaan tahapan pemilu sudah berjalan dan ini dianggap krusial.

Dua paslon yang telah mendaftar ke KPU pada Kamis, 19 Oktober 2023, masing-masing pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Untuk itu, Kapolri kembali mengingatkan kepada para bakal paslon dan timnya sebelum dan setelah ditetapkan menjadi paslon agar selalu mengedepankan cara berpolitik yang baik, santun dan tidak memecah belah persatuan bangsa. Sebab, dampak nya

masyarakat menjadi korban.

"Jangan gunakan politik pecah belah yang bisa membuat masyarakat menjadi korban. Itu sering saya sampaikan dan saya tidak pernah ragu kepada siapa pun capresnya. Karena ini penting untuk kita semua," papar Kapolri saat membawakan kuliah umum di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 20 Oktober 2023.

Menurut dia, setiap pesta demokrasi, termasuk yang berlangsung lima tahun sekali, tentu menjadi ancaman dan potensi konflik bisa saja terjadi. Oleh karena itu, pihaknya akan bertindak secara hati-hati agar tidak memunculkan konflik saat pelaksanaan Pemilu Serentak pada 14 Februari 2024.

"Tentunya ini menjadi ancaman bagi kita semua, yang namanya situasi konflik. Apabila kita tidak hati-hati pasti akan terjadi itu (konflik). Saya selalu berpesan, mari kita jaga persatuan dan kesatuan," ucapnya.

Guna mengantisipasi potensi munculnya konflik dalam kont-

estasi, Listyo mengatakan telah menemui seluruh pimpinan partai politik. Bahkan, di beberapa kesempatan ia sering bertemu masing-masing capres yang akan maju bertarung.

"Saya berkali-kali bicar-

dan tidak pernah ragu untuk bicara kepada ketua umum partai. Saya bicara kepada capres. Boleh maju, tapi adu gagasan. Yakinkan kepada masyarakat, bahwa beliau-beliau adalah calon pemimpin yang pantas untuk dipilih," tuturnya.

Pihaknya pun berharap agar civitas akademika Unhas Makassar dan jajarannya ikut menyampaikan pesan persatuan tersebut. Perbedaan boleh ada, beda pendapat boleh, tetapi persatuan dan kesatuan harus dijaga. Karena siapa pun pemimpinnya nanti membutuhkan itu.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang mengimbau masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat dan menggunakan agama sebagai alat politik. Yaqut menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Tablig Akbar Idul Khotmi Nasional Thoriqoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah, Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat, 3 September 2023.

"Harus dicek betul. Pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini, memecah belah umat. Kalau pernah, jangan dipilih," kata Yaqut.

Yaqut juga meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. "Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat, masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat, rahmatan lil 'alamin, rahmat untuk semesta alam. Bukan rahmatan lil Islami, tok," kata Menag.

Karena itu pemimpin yang ideal,



menurutnya, harus mampu menjadi rahmat bagi semua golongan. "Kita lihat calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau pernah, jangan dipilih," tegasnya.

Menag menyampaikan pentingnya penelusuran rekam jejak saat menentukan calon pemimpin bangsa. Hal ini bertujuan agar bangsa Indonesia memperoleh pemimpin yang amanah dan dapat mengemban tanggung jawab kemajuan negeri ini.

"Saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan akhwat ini agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden, dan wakil presiden, kita, lihat betul rekam jejaknya," kata Menag.

Menag berharap Tarekat Tijaniyah dapat mengambil peran yang lebih besar menjelang tahun politik untuk mendamaikan umat, agar umat bisa tetap tenang, teduh, dan damai meskipun berbeda-beda dalam pilihannya.

"Bagaimana memilih pemimpin yang benar-benar bisa dipercaya, bisa diberikan amanah untuk memimpin bangsa besar. Bangsa yang memiliki keragaman, bangsa yang memiliki banyak perbedaan, tetapi itu menjadi kekuatan kita," ujar Menag.

Ancaman Teror

Kapolri juga mengatakan terorisme menjadi ancaman yang harus mendapat perhatian serius oleh seluruh jajaran kepolisian dalam mengamankan Pemilu 2024 agar berjalan aman dan lancar.

"Terorisme juga harus menjadi perhatian serius," kata Listyo Sigit dalam apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2023.

Menurut jenderal polisi bintang empat itu, seluruh jajaran kepolisian yang terlibat pengamanan harus mampu mengantisipasi dan mencegah serangan teroris. Dia mengingatkan pada Pemilu 2019 terdapat enam aksi serangan teror yang terjadi. "Ini tidak boleh terjadi di Pemilu 2024," tegas Listyo.

Dia juga mengingatkan konflik antara Hamas dan Israel yang sedang men-

ingkat bisa berdampak di Tanah Air, sehingga harus diantisipasi pula aksi-aksi di masyarakat.

"Terlebih, saat ini perang antara Hamas dengan Israel sedang bereskalasi, di mana hal ini dapat berdampak terhadap situasi di dalam negeri," kata mantan kepala Bareskrim Polri itu.

Dalam mengantisipasi terjadinya aksi teror, Sigit meminta jajarannya untuk mengoptimalkan pencegahan dengan aksi penindakan atau preventive strike.

"Optimalkan preventive strike agar pelaku teror bisa ditangkap sebelum melancarkan aksinya, sehingga kami bisa memastikan, kami minimalkan tidak ada letupan sekecil apa pun pada Pemilu 2024," ujarnya.



Operasi Mantap Brata 2023-2024 digelar selama 222 hari, sejak 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024, dengan melibatkan 261.695 personel dari Mabes Polri hingga polda. Selain itu, Polri juga menyiapkan 2.000 personel Brimob dan 8.500 personel Dalmas Nusantara yang siap dimobilisasi kapan pun dan di mana pun di seluruh wilayah Indonesia.

"Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024. yang diikuti oleh 261.695 personel di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan pemilu," kata Kapolri.

Dia menjelaskan, apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir

kesiapan personel maupun sarana dan prasarana Operasi Mantap Brata 2023-2024, sehingga Pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar.

Listyo menekankan, Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia, sekaligus menjadi titik penentu masa depan bangsa.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi bahwa 2024 adalah momen politik yang sangat penting karena Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara bentuk dalam tahun yang sama.

"Ini pekerjaan yang besar yang sangat menentukan masa depan bangsa,

masa depan negara kita," ujar Sigit.

Sigit mengatakan Polri bersama seluruh komponen bangsa berpartisipasi penuh guna mensukseskan Pemilu 2024 mengingat eskalasinya yang cukup tinggi. Pemilu 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan rentang waktu yang berdekatan, wilayah yang luas, geografis yang beragam serta melibatkan jumlah pemilih yang besar.

"Oleh sebab itu, guna mengamankan Pemilu 2024, maka Polri didukung TNI, kementerian, lembaga, instansi terkait dan seluruh mitra kamtibmas lainnya menggelar Operasi Mantap Brata tahun 2023-2024," kata Sigit. ●

SANTRI TENTUKAN LAJU BANGSA

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajak para santri untuk aktif menyalurkan aspirasi politiknya pada Pemilu 2024. Dia juga berpesan untuk memilih calon pemimpin yang serius membangun negara.

"Pilih pemimpin yang serius, jangan yang cengengesan. Karena tantangan bangsa ke depan ini luar biasa. Masak pemimpin cengengesan. Pemimpin harus benar-benar cinta negara ini," katanya usai acara Gerak Jalan Hari Santri di Surabaya, Sabtu, 21 Oktober 2023.

Dia juga mengimbau para santri untuk memilih calon pemimpin bukan hanya karena janji manisnya, namun

depan.

"Karena itu, gelaran Pilpres, 14 Februari 2024, harus dimanfaatkan oleh seluruh santri menyalurkan hak pilihnya. Santri harus terlibat di setiap episode sejarah negeri ini, termasuk memilih, itu pasti melibatkan santri," kata Yaqut.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, mengajak para santri berjihad dalam pembangunan negeri sebagai upaya perjuangan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Negara ini didirikan dengan jihad, masa depannya juga harus diperjuangkan dengan jihad," kata Gus Yahya.

Gus Yahya menyatakan jihad mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bisa dilakukan oleh para santri, yakni dengan ide buah hasil pemikiran dan diterapkan melalui inovasi berkelanjutan.

"Jihad santri jayakan negeri," ujarnya.

Gus Yahya menyatakan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 yang menjadi dasar pelaksanaan digelarnya Hari

telah diperjuangkan para pahlawan itu batal di masa depan karena kita tidak mampu meneladani kepahlawanan mereka," terangnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengatakan, santri adalah lokomotif pembangunan ekonomi bangsa dan ekonomi kreatif untuk masa depan ekonomi Indonesia.

"Saya berharap program digitalpreneur dapat mengubah santri menjadi produsen informasi dan literasi, menciptakan peluang usaha, serta menjadi penggerak kebangkitan ekonomi Indonesia di kancah global," ujar Sandi di acara Santri Digitalpreneur dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2023 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu, 21 Oktober 2023.

Pada tahun ini, Santri Digitalpreneur juga memfokuskan agar para santri bisa menghasilkan karya digital berupa kreatif video, video/foto produk (advertisement), dan podcast.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, mengatakan, santri memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Dia juga menyebut pondok pesantren memiliki peran besar yang akan melahirkan bangsa Indonesia yang moderat, toleransi, plural, dan bisa kolaborasi dengan siapa pun.

Baginya pondok pesantren adalah modal sosial bangsa Indonesia untuk berkompetisi dengan berbagai negara di dunia.

"Santri itu bukan terpojok di pondok pesantren, tapi santri sekarang ini sudah masuk menjelajah sampai menjadi diplomat, militer, interpreneur, dan bahkan juga menjadi pemimpin politik sampai dengan menjadi presiden," ujar Nasaruddin.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyebut Hari Santri Nasional 2023 yang digelar di Kota Surabaya harus dijadikan momentum bagi seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.

"Tidak hanya pesantren, tidak hanya santri, semuanya untuk bisa berjihad menjaga kesatuan Republik Indonesia," kata Khofifah.



juga harus dicek rekam jejak calon presiden dan wakil presiden itu seperti apa. "Rekam jejaknya harus baik dan tidak pernah menggunakan agama sebagai kuda tunggangan untuk kepentingannya," jelasnya.

Yaqut menyatakan suara dari kalangan santri pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menjadi penentu arah laju bangsa Indonesia untuk lima tahun ke

Santri Nasional di Surabaya harus dijadikan acuan berjuang mempertahankan keutuhan negara, seperti halnya yang dilakukan oleh para santri pada masa kemerdekaan.

"Surabaya menjadi pusat dari pertarungan mempertahankan NKRI. Peristiwa itu menjadi titik penting sebagai pondasi keberlangsungan proklamasi. Mari jangan sampai kejayaan yang

Menurut Khoffah, peringatan Hari Santri didasari rasa menghormati perjuangan para santri yang ikut mempertahankan kedaulatan Indonesia yang coba direbut kembali oleh sekutu, pada 22 Oktober 1945. Pada tanggal tersebut, KH Hasyim Asy'ari mencetuskan resolusi jihad.

"Kita bersama-sama berjihad mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia," ujarnya.

Karena itu, kata dia, tugas masyarakat umum dan para santri untuk memastikan kedaulatan negara terjaga di era modern ini, yakni dengan memperkuat semangat persatuan antar masyarakat tanpa memandang perbedaan.

Khoffah menyebut hal itu sudah dibuktikan, salah satunya melalui kegiatan "Jalan Santai" yang menjadi salah satu acara rangkaian "Hari Santri Nasional". Acara itu dihadiri tak hanya oleh masyarakat Surabaya dan Jawa Timur, namun juga dari sejumlah daerah lain.

"Acara ini dihadiri juga di luar Jawa Timur, maka sesungguhnya tarikan itu untuk menjaga tarikan NKRI dan ini bagian dari membangun persaudaraan supaya tetap guyub rukun," ucapnya.

Wirausahawan Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan siap memfasilitasi santri-santri di Indonesia untuk menjadi wirausahawan digital, sehingga dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi digital nasional.

"Saya berharap santri juga bisa terlibat aktif agar mengambil bagian dalam program yang ada dan Kementerian Kominfo akan memberikan dukungannya untuk ini," ujar Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, 21 Oktober 2023.

Nezar mendorong para santri di Indonesia bisa aktif ambil bagian dalam program-program dari Kemenkominfo untuk pengembangan kecakapan digital menjadi wirausaha.

Nezar pun menjelaskan beberapa program yang telah dijalankan Kementerian Kominfo terkait pengembangan kecakapan digital di Indonesia, salah satunya seperti kelas literasi digital yang disiapkan untuk berbagai tingkat.

Kelas literasi digital itu tersedia tidak

hanya untuk masyarakat awam, tapi juga menyentuh kalangan pelajar, komunitas masyarakat, akademisi. Bahkan orang yang telah mencapai posisi pimpinan baik di perusahaan swasta maupun di pemerintah.

Menurut dia sudah ada 50 juta orang yang mengikuti dan terlibat langsung dalam program-program literasi digital tersebut. Nezar mencontohkan salah satu program literasi digital yang paling diminati ialah program Digital Talent Scholarship (DTS).

"Jadi, ada beasiswa-beasiswa khusus yang diberikan kepada mereka yang ingin belajar internet atau dunia

para santri di era digital saat ini.

"Saya kira banyak sekali di antara para santri juga yang sangat cakap dalam menggunakan digital. Dengan terkoneksi internet, mereka punya kecakapan sendiri," kata Nezar.

Nezar juga mengajak para santri di Indonesia untuk bisa menggunakan internet dengan sehat sehingga kegiatan di ruang digital menjadi produktif dan nyaman.

"Paling penting bagaimana menggunakan internet itu secara sehat. Karena kita tahu beberapa kali momen Pemilu 2014 dan 2019, jagad digital kita itu penuh dengan ujaran kebencian," ujar



digital, digital bisnis, pemasaran digital, kecakapan digital yang lain secara serius. Itu kita punya programnya," ujar Nezar.

Dia juga mengenalkan program lainnya yang digalang Kementerian Kominfo dalam pengembangan wirausaha di era digital seperti program 1000 Startup Digital.

Menurut dia sudah banyak perusahaan rintisan yang berkembang setelah mengikuti program itu, termasuk wirausaha yang memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan hingga usaha yang mendukung pemberdayaan masyarakat.

Selain program-program pengembangan talenta digital, kehadiran infrastruktur digital yang terus ditingkatkan menurut Nezar menjadi faktor penting yang dapat dimanfaatkan oleh

Nezar.

Dia menyampaikan ajakan itu agar para santri bisa bijak menghadapi arus informasi yang banjir menjelang Pemilu 2024. Dia meminta para santri agar bisa menyaring informasi secara benar, sehingga nantinya apabila menemui konten bernada ujaran kebencian dan memecah belah nilai bangsa, maka para santri tidak tergoyahkan.

Nezar menilai bahwa santri pada era transformasi digital juga termasuk sebagai kelompok yang aktif berselancar di dunia maya. Oleh karena itu, mereka perlu memiliki kemampuan untuk bijak menggunakan internet secara sehat. Hal itu juga semakin penting mengingat santri masa kini didominasi oleh generasi Z dan merupakan pemilih pemula dalam Pemilu 2024. ●



PASOKAN BERAS TERBATAS IMPOR DIGENJOT TERUS

Pemerintah mengantongi kesepakatan dengan China yang menjamin kuota impor beras sebanyak 1 juta ton. Jaminan kuota impor tersebut penting agar masyarakat tidak khawatir terkait ketersediaan beras di dalam negeri.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke China saat menghadiri Belt and Road Forum for International Cooperation. "Presiden langsung ambil keputusan untuk impor, tetapi itu tidak mempengaruhi harga dari petani," kata Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, Rabu, 18

Oktober 2023.

Buwas menjelaskan, Bulog saat ini sudah tidak bisa menyerap gabah hasil petani lokal. Ia menemukan harga Gabah Kering Petani (GKP) di pasar domestik telah mencapai Rp7.800 per kilogram (kg).

Badan Pangan Nasional mengatur harga pembelian atas atau ceiling price GKP tingkat petani Rp4.550 per kg, GKP tingkat penggilingan Rp4.650 per kg, Gabah Kering Giling (GKG) tingkat penggilingan Rp5.700 per kg, dan beras medium di Gudang Perum Bulog

“Maka dari itu, kami membiarkan harga beras diatur mekanisme pasar. Sekarang ini adalah bagaimana kami menyiapkan cadangan yang mencukupi,” ujarnya.

Buwas menjelaskan, pasokan beras Bulog kini mencapai 1,7 juta ton. Angka tersebut diperkirakan tidak akan berubah pada November walau telah ada beras impor sejumlah 300.000 ton bulan depan.

Namun, stok beras Bulog pada akhir tahun hanya akan mencapai 800.000 ton jika tidak ada tambahan dari impor.

han.

“Beras impor dari China enggak bisa masuk tahun ini. Bukan karena enggak mampu beli, tapi pelabuhan kita tidak bisa bongkar segitu banyak,” ujarnya.

Perum Bulog juga mengumumkan hampir seluruh provinsi telah menerima beras impor pada tahun ini. Satu-satunya provinsi yang masih mandiri atau swasembada beras adalah Nusa Tenggara Barat.

Buwas mengatakan, NTB merupakan salah satu daerah produsen beras. Provinsi tersebut tidak mendapatkan



Rp9.000 per kg.

Sementara itu, harga batas bawah atau floor price pembelian gabah atau beras mengacu kepada HPP yang diatur Permendag 24/2020. Harga tersebut yaitu GKP tingkat petani sebesar Rp4.200 per kg, GKP Tingkat Penggilingan yang mencapai Rp4.250 per kg, GKG tingkat penggilingan sebesar Rp5.250 per kg, dan beras medium di gudang Perum Bulog mencapai Rp8.300 per kg.

Buwas mengatakan, Bulog dapat mendorong kenaikan harga beras lebih jauh jika tetap menyerap beras di petani lokal lantaran dapat mengurangi ketersediaan di pasar.

Ini karena diperlukan beras untuk penyaluran bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sekitar 900.000 ton.

Buwas memperkirakan, pasokan beras dari dalam negeri belum akan meningkat pada kuartal pertama 2024. Apalagi, menurut dia, ada dua hajatan besar pada Februari-Maret 2024, yakni Pemilu dan Ramadan yang dapat meningkatkan konsumsi.

Oleh karena itu, menurut dia, pihaknya akan merealisasikan impor beras dari beberapa negara. Adapun kuota impor beras dari China kemungkinan baru akan direalisasikan pada tahun depan karena keterbatasan kapasitas pelabu-

beras dari luar wilayahnya, termasuk beras impor.

“Saya bersyukur bahwa NTB tidak kemasukan beras dari luar wilayahnya, apalagi impor. Satu-satunya wilayah di Indonesia yang tidak kemasukan beras impor, hanya NTB,” ungkapnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan, produksi beras di NTB mencapai 1,54 juta ton pada tahun ini, atau naik 6,46 persen dibandingkan tahun lalu sebesar 1,45 juta ton.

Buwas menilai, produksi beras domestik dalam kondisi miris pada tahun ini. Hal tersebut ditunjukkan dari masuknya beras impor ke Sulawesi Selatan yang selama ini menjadi barometer

• INFO NASIONAL

produksi beras di dalam negeri. Sulawesi Selatan selama ini merupakan daerah yang memasok kebutuhan daerah lain di penjuru negeri.

Berdasarkan proyeksi BPS, produksi beras di Sulawesi Selatan tahun ini mencapai 4,94 juta ton. Angka tersebut lebih rendah 417.072 ton atau 7,78 persen dari capaian 2022 sejumlah 5,36 juta ton.

Buwas menegaskan, masuknya beras impor ke kawasan Angin Mamiri dis-

Buwas pun mencoba menganalisis akar masuknya beras impor ke Sulawesi Selatan, yakni mismanajemen neraca beras. Pemerintah provinsi tidak membatasi keluarnya beras dari wilayahnya.

Ia mencatat, beberapa daerah yang menerima bantuan beras dari Sulawesi Selatan adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah. BPS meramalkan produksi beras di Jawa Timur mencapai 9,59 juta ton, sedangkan di Jawa Tengah mencapai 9,06 juta ton.

kan langkah konkret dalam menghadapi El Nino dengan tengah menggenjot produksi beras nasional dari sebelumnya 31 juta ton menjadi 35 juta ton.

Plt Menteri Pertanian, Arief Prasetyo Adi, mengajak para kepala dinas pertanian se-Indonesia untuk segera mempersiapkan gerakan percepatan tanam El Nino, terutama yang berkaitan dengan persiapan benih unggul, ketersediaan pupuk dan kesiapan para penyuluh.

Arief mengatakan, koordinasi percepatan tanam dapat dilakukan melalui direktorat teknis kementan seperti Tanaman Pangan, PSP maupun BPPSDMP. Bahkan koordinasi dengan PUPR terkait air irigasi dan koordinasi lintas K/L.

"Gerakan nasional el nino dengan target 500 ribu hektare harus kita jalankan sebaik mungkin. Saya minta tolong sebelum ini kita mempersiapkan semuanya, sehingga minggu depan tidak ada lagi keluhan petani mengenai benih dan pupuk, karena tugas kita semua mempersiapkannya dengan baik," ujar Arief, Jumat, 20 Oktober 2023.

Dia menambahkan, target produksi Kementerian Pertanian akan ditingkatkan dari yang tadinya 31 juta ton menjadi 35 juta ton. Bagi Arief, target tersebut bisa tercapai apabila semua pihak membangun kekompakan dan kebersamaan.

"Saya sudah minta Pak Dirjen TP untuk membangun sistem benih nasional. Tidak hanya makro dan mikro tapi juga didetailkan. Kemudian Pak Dirjen TP saya tegaskan untuk tingkatkan produksi beras dari 31 menjadi 35 juta ton. Caranya bisa berkoordinasi dengan dirjen teknis lain seperti PSP untuk pupuk, BPPSDMP untuk penyuluh," katanya.

Kementan juga menyiapkan penghargaannya khusus bagi daerah yang mampu memproduksi beras dengan jumlah tinggi untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Adi mengatakan telah meminta jajaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, serta



ebabkan oleh defisitnya neraca beras di sekitar provinsi tersebut. Menurutnya, pemenuhan beras di provinsi sekitarnya membuat neraca beras Sulawesi Selatan defisit.

"Sampai hari ini, sudah masuk beras untuk Sulawesi Selatan dari impor sejumlah 70.000 ton. Miris kan?" ujarnya.

Buwas menceritakan beras impor mulai masuk ke Sulawesi Selatan pada Agustus 2024 sebanyak 5.000 ton. Namun, angka tersebut terus naik menjadi 70.000 ton hingga bulan ini. Beras impor tersebut ditujukan untuk memenuhi program bantuan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Oleh karena itu, Buwas mengimbau warga Sulawesi Selatan untuk tidak panik karena kebutuhan beras sudah terpenuhi.

"Enggak usah dipersoalkan berasnya dari mana, walaupun sebenarnya tidak boleh masuk sebutir beras pun ke sana untuk menjaga harga diri. Bagaimana kita bisa mempertahankan status Sulawesi Selatan sebagai lumbung padi?" ujar Buwas.

Di sisi lain, ia mengarahkan semua pemerintah provinsi untuk mengadopsi manajemen neraca beras di Lampung.

Buwas mencontohkan, salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung adalah pembatasan gabah ke luar Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung hanya membolehkan gabah keluar dari Lampung setelah digiling menjadi beras. Selain itu, pemerintah daerahnya juga mencatat dan membatasi pergerakan beras ke luar Lampung.

"Tadinya, saya yakin bahwa enggak mungkin Sulawesi Selatan kemasukan beras dari luar wilayahnya apalagi impor. Ternyata tidak demikian," katanya.

Genjot Produksi

Kementerian Pertanian terus melaku-

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian untuk bersinergi dengan unit eselon 1 lainnya dalam menyediakan benih unggul, ketersediaan pupuk, dan kesiapan penyuluh.

Ia juga telah meminta jajaran bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk menggerakkan elemen di daerah, termasuk para penyuluh.

"Tolong juga nomor telepon semua penyuluh diserahkan kepada Pak Tito (Mendagri Tito Karnavia) untuk mem-



"Ini tugas yang diberikan Pak Presiden kepada Badan Pangan Nasional bersama Bulog ya tidak boleh main-main karena ini untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan seluruh Indonesia."

bantu siapapun yang ke daerah dalam memecahkan masalah bisa menghubungi penyuluh yang tersedia," ujarnya.

Untuk memenuhi ketahanan pangan, Kementan juga fokus menjaga stabilitas pasokan dan harga melalui bazar murah yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Fokus lainnya yaitu menyalurkan bantuan beras 640.000 ton untuk 21,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM).

"Ini tugas yang diberikan Pak Presiden kepada Badan Pangan Nasional bersama Bulog ya tidak boleh main-main karena ini untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan seluruh Indonesia," kata dia.

Adi juga terus mendorong terbanjarnya ekosistem pangan nasional dengan menghubungkan kementerian, lembaga, asosiasi, BUMN dan legislatif untuk mewujudkan end-to-end process, bahu-membahu memajukan pertanian Indonesia, berbasis kesejahteraan petani.

Ekosistem pangan nasional ini bukan hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi didorong untuk memenuhi kebutuhan pangan Asia Tenggara, atau bahkan dunia, dengan skema ekspor setelah cadangan pangan pemerintah tercukupi.

"Kita itu bukan hanya swasembada satu produk karbo atau protein, tapi beberapa. Diversifikasi pangan. Saya sambung semuanya supaya kita mengerti, bahu membahunya di mana,



Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi, mengatakan bahwa saat ini tengah melakukan konsolidasi dengan berbagai para pemangku kepentingan. Salah satu agendanya adalah pemetaan lahan tidur di daerah-daerah yang selama ini belum tergarap maksimal, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang pertanian lainnya.

"Kami tengah intensifkan program bersama ditjen teknis seperti PSP dari sisi pupuk, alsin, air, asuransi, KUR serta BPPSDMP untuk penyuluhnya," kata

end-to-end-nya dapat," kata Arief.

Dia menegaskan, tidak ada eksklusivitas dari satu kementerian atau lembaga manapun. Saat ini merupakan waktunya gotong-royong meningkatkan produktivitas pertanian, sesuai dengan arahan Presiden.

Sementara Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, menyampaikan bahwa BRIN masuk dalam ekosistem pangan nasional ini di sisi hulu, melalui riset-riset terkait teknologi budidaya dan teknologi pasca panen.

"Karena mata rantai ini yang tidak boleh terputus. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Semoga gotong royong ini tidak cuma hari ini, tapi berlanjut terus, karena perjalanan masih panjang. Kerja sama tidak bisa seremonial saja, tapi harus kita aplikasikan, sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan dan menjadi kekuatan pertanian Indonesia," paparnya.

Suwandi.

Suwandi menjelaskan, pihaknya juga tengah gencar mempersiapkan percepatan tanam di tengah El Nino. Dia memaparkan, setidaknya ada sembilan aksi guna merealisasikan hal tersebut.

Aksi tersebut di antaranya gerakan kejar tanam, meningkatkan IP (Indeks Pertanaman) dan provitas, berdasarkan mapping wilayah kekeringan. Kemudian, perluasan areal tanam padi bagi kabupaten potensial ditanam saat musim kering dengan saprodi, pompa dan sumur, juga benih sebagai kompensasi terkena dan puso iklim ekstrim.

"Kami juga mengusung pertanian presisi: skala ekonomi, polygon dashboard TIK, saprodi tepat, alsin hulu-hilir, drone, ramah lingkungan, efisiensi biaya input melalui pemanfaatan pupuk organik, hayati, pestisida nabati, elisitor biosaka, Plant Growth Promoting Rhizobacter (PGPR) dan lainnya," beber Suwandi. ●



Revisi Perpres 191/2014

DISTRIBUSI BBM BERSUBSIDI TEPAT SASARAN

Pemerintah menyiapkan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Aturan ini yang menjadi regulasi acuan penyaluran BBM bersubsidi, Peralite dan Solar, lebih tepat sasaran.

Dalam revisi tersebut, pemerintah akan mengatur detail kriteria kendaraan yang dapat mengisi Peralite. Pemerintah juga mengkaji untuk membuat perbedaan harga Peralite sesuai dengan jenis kendaraannya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan, revisi Perpres 191/2014 ini masih berjalan. Kementerian ESDM siap melaksanakan revisi tersebut tahun ini, tapi masih menunggu pertemuan dengan pemangku kebijakan lain.

"Kami sudah siap, hanya belum bertemu waktunya. Belum bertemu bertiga, Kementerian Keuangan, BUMN, dan Kementerian ESDM," kata Arifin, Jumat, 20

Oktober 2023.

Dia menjelaskan, skema revisi Perpres 191/2014 sudah memetakan pembeli peralite berdasarkan jenis kendaraannya.

"Itu kan sebetulnya sudah disiapkan dulu mana saja kendaraan yang memang berhak, untuk jenis kendaraan seperti apa yang berhak," jelasnya.

Dia menyebut pembeli seharusnya memilih BBM yang sesuai agar dapat mengurangi angka emisi. Pengelompokan kendaraan ini bertujuan untuk menghindari konsumen BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.

"Masa yang kelas 3.500-4.000 cc masa pakai, kan merusak mesinnya sendiri. Kalau bisa beli cc besar berarti

uangnya banyak kan," ujarnya.

Pengelompokan data pengguna termasuk jenis kendaraan ini nantinya akan disimpan oleh Pertamina. "Motor mobil jenis apa, itu masuk di dalam daftar sistem IT Pertamina," terangnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, menuturkan, eskalasi konflik antara Israel dan Palestina diyakini bakal berimbas pada kenaikan harga minyak dunia. Selain itu, kebutuhan minyak menjelang musim dingin juga diproyeksikan dapat menggerak inflasi secara global.

Meski demikian, pemerintah tetap optimistis mampu mengatasi dampak kenaikan harga minyak dunia. Di lain sisi, kembali mengejar direalisasikannya penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, khususnya Peralite.

Tutuka mengatakan perang Timur Tengah saat ini belum berdampak besar ke harga minyak dunia. Namun, jika perang berlangsung lama, maka akan berpengaruh ke impor minyak mentah dan impor BBM Indonesia.

"Sampai hari ini dampaknya masih belum signifikan walaupun kita tahu harga minyak mendekati USD90 per barel, namun kalau ini berlangsung cukup lama saya kira akan berpengaruh," kata Tutuka dalam keterangan resminya, Kamis, 19 Oktober 2023.

Menurutnya, kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ ICP), selain akan berpengaruh terhadap kenaikan harga crude, juga akan mempengaruhi harga BBM di masyarakat. Hal ini

karena Indonesia impor keduanya yaitu crude oil dan BBM dengan presentase yang hampir sama.

Oleh karena itu, pemerintah juga mendorong segera diterbitkannya revisi Perpres 191/2014 yang menjadi regulasi acuan penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Dalam revisi tersebut akan mengatur detail kriteria kendaraan yang dapat

mengisi Peralite dan juga tengah mengkaji untuk membuat perbedaan harga Peralite sesuai dengan jenis kendaraannya.

"Saya menghimbau, Peralite itu untuk masyarakat yang membutuhkan, jadi kalau yang mampu janganlah menggunakannya karena bukan peruntukannya," kata Tutuka.

Sejauh ini, Pertamina tengah melakukan uji coba pembatasan pembelian Peralite khususnya bagi kendaraan roda empat di beberapa daerah. Setiap pembeli diwajibkan memiliki Quick Response (QR) Code untuk dipindai oleh petugas SPBU sebelum melakukan pembelian.

Uji coba tersebut dilakukan di 41 kota dan kabupaten yang tersebar di tiga provinsi yakni Aceh, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Uji coba juga dilakukan di Timika, Papua.

Sebagai informasi, konsumen pengguna yang belum dapat QR Code, selain mendaftar secara langsung pada program subsidi tepat yang bisa diakses melalui website atau melalui aplikasi MyPertamina.

Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan pendaftaran pada sekitar 1.300 titik booth pendaftaran offline yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang mengalami kesulitan saat melakukan pendaftaran di website.

Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, mengatakan rencana pembatasan distribusi BBM bersubsidi Peralite kembali dibahas oleh tiga menteri terkait, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),



• INFO NASIONAL

Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan. Dia menyebut rencana tersebut masih terus berjalan.

"Pertalite sejauh ini masih sesuai prognosa. Rencana ini sudah tercantum dalam revisi peraturan presiden (Perpres). Revisi perpres itu juga diusulkan jenis konsumen pengguna Pertalite," ujarnya, Kamis, 12 Oktober 2023.

Pembahasan mengenai seleksi konsumen Pertalite menjadi poin utama dalam revisi Perpres 191/2014 yang telah mengudara sejak pertengahan tahun lalu. Saleh menambahkan jika revisi Perpres ini disetujui, maka jenis konsumen pengguna Pertalite berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.

"Jadi akan lebih selektif, misalnya kalau disetujui berdasar cc kendaraan,"

jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, mengatakan pemerintah masih menimbang dampak kebijakan pembatasan Pertalite terhadap daya beli masyarakat dan inflasi.

"Pemerintah masih berupaya untuk mempertahankan tingkat inflasi, karena memang apabila itu diterapkan tentunya ada sebagian masyarakat yang harus membeli lebih mahal. Itu akan berakibat pada kenaikan tingkat inflasi," ujar Erika, Selasa, 10 Oktober 2023.

Adapun rencana pembatasan Pertalite kembali dibahas lantaran naiknya harga BBM nonsubsidi yang menyebabkan disparitas harga melebar, sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat yang telah menggunakan BBM non-

subsidi Pertamina kembali menggunakan Pertalite yang lebih murah. Jika itu terjadi, maka kuota Pertalite yang telah ditetapkan pemerintah berpotensi habis lebih cepat, sehingga harus ditambah. Ini akan membuat beban subsidi dan kompensasi membengkak.

"Migrasi akan membuat subsidi dan kompensasi melonjak. Jadi kami terus berupaya supaya revisi Perpres 191 segera bisa diterbitkan," kata Erika.

Pemerintah melalui Pertamina berencana untuk melaksanakan seleksi konsumen bagi calon pengguna Pertalite dengan merampungkan pembahasan revisi Perpres 191/2014. Penyusunan revisi Perpres 191 sudah melewati pembahasan dari banyak pemangku kepentingan, termasuk dari Korps Lalu Lintas Polri untuk memperoleh data identitas kendaraan sekaligus NIK pemilik.

BPH Migas mencatat penyaluran BBM bersubsidi Pertalite hingga Agustus mencapai 19,27 juta kiloliter (kl). Angka tersebut setara dengan 59,22 persen dari kuota tahunan. Sedangkan serapan Solar bersubsidi atau biosolar sebanyak 11,12 juta kl atau 65,41 persen dari alokasi kuota 2023 dan Pertalite sebesar 19,27 juta kl.

Sementara itu, Pertamina menyampaikan jumlah pendaftar MyPertamina untuk bisa membeli BBM bersubsidi solar dan Pertalite hingga awal Oktober ini telah mencapai 7,8 juta kendaraan.

Pertamax Green 92

Pemerintah juga tengah mengkaji untuk mengganti BBM Pertalite dengan Pertamina Green 92. BBM ini merupakan campuran BBM Pertalite dengan kandungan 7 persen bioetanol atau E7.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menilai rencana ini perlu melihat aspek ekonomi. "Tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena ini harganya tentu lebih mahal," kata Komaidi, Selasa, 17 Oktober 2023.

Menurutnya jika pengganti Pertalite ini memiliki harga yang lebih mahal, maka muncul dua permasalahan, yakni terkait daya beli masyarakat dan subsidi. Dia berkata, kedua poin ini yang perlu disadari pemerintah jika ingin melaksanakan rencana penggantian tersebut.

"Kalau pemerintah mau jaga daya beli,



berarti subsidiya nambah. Tapi kalau subsidiya mau dijaga supaya tidak melampaui yang sudah ditetapkan tentu daya beli masyarakat yang akan terkena," jelas Komaidi.

Kendati demikian, Komaidi juga mengungkapkan ini merupakan rencana ini bagus jika dilihat dari aspek lingkungan atau aspek keberlanjutan lingkungan. "Ada perbaikan kualitas udaranya, emisi gas buangnya tentu nanti lebih baik," jelas Komaidi.

Komaidi menganggap rencana ini sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian LHK men-

Pertalite. Pertalite merupakan BBM bersubsidi dengan tingkat konsumsi terbanyak secara nasional, hampir 80 persen di antara BBM jenis bensin lainnya, seperti Pertamina, dan Pertamina Turbo.

"Pertamax Green 92 masih 2026, masih lama untuk skala besarnya," kata Tutuka beberapa waktu lalu.

Menurut Tutuka, penghapusan distribusi Pertalite butuh kajian detail dan mendalam, karena sifatnya yang menjadi produk BBM domestik paling banyak dikonsumsi masyarakat.

"Pemerintah harus melihat daya beli masyarakat dan dampak kondisi sosial.

gantikan Pertalite.

"Ketika ini menjadi program pemerintah, harganya akan diatur. Tidak mungkin JBKP hanya diserahkan ke pasar," kata Nicke saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Jakarta, 30 Agustus 2023.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto, menilai penggantian BBM Pertalite menjadi Pertamina Green 92 akan menyebabkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Sehingga, ia menyatakan tidak setuju akan rencana ini.

"Karena sama saja dengan menaikkan harga BBM bersubsidi," kata Mulyanto,



genai baku mutu minimal BBM. "Baku mutunya minimal di atas RON 91 ketetapannya. Jadi kalau Pertamina Green 92, artinya sudah sesuai," ucap Komaidi.

Direktur Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, mengatakan realisasi distribusi Pertamina Green 92 masih dalam tahap kajian pemerintah dan Pertamina selaku badan usaha distribusi BBM.

Penyaluran Pertamina Green 92 akan berdampak ada penyetopan penjualan



Sekarang ini masih kajian teknis. Setelah itu baru masuk ke arah perhitungan ekonomi, bisa diterapkan atau tidak," ujar Tutuka.

Rencana penggantian BBM ini berawal dari usulan Pertamina.

Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, usulan mengganti Pertalite dengan Pertamina Green 92 merupakan implementasi paket kebijakan yang tertuang dalam 'Program Langit Biru Tahap II'. Melalui program tersebut, perseroan mengusulkan Pertamina Green 92 sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan atau JBKP meng-

Selasa, 17 Oktober 2023.

Dia menjelaskan bahwa ketidaksetujuan ini dilatarbelakangi oleh harga Pertamina Green 92 yang lebih tinggi dibandingkan Pertalite. Namun, tak menutup kemungkinan akan setuju jika pemerintah menjual Pertamina Green 92 seharga dengan Pertalite yang ada sekarang.

"Lagi pula, campuran bioetanol untuk Pertamina Green 92 ini diadakan secara impor. Ini makin menekan defisit transaksi berjalan pada sektor migas dan ketergantungan kepada impor," kata dia.

Terkait kemungkinan harga Pertamina Green 92 ini, Mulyanto mengatakan hanya ada dua pilihan, yakni menambah subsidi atau menaikkan harga BBM bersubsidi. ●



KADERISASI SUDAH GAGAL GOLKAR CUMA INCAR ELEKTORAL

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang berlangsung pada 21 Oktober 2023 menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024.

Dalam Rapimnas yang turut dihadiri Prabowo Subianto itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya telah membahas secara seksama dan mengedepankan kepentingan lebih besar dalam menentukan sosok cawapres. Dirinya juga sudah rapat dengan semua ketua DPD Partai Golkar pada Jumat malam, 20 Oktober 2023.

"Kami rapat cukup lama, hangat, tapi semuanya konsensus mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk dipasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon wakil presiden RI," kata Airlangga.

Airlangga lantas meminta persetujuan semua pimpinan Partai Golkar yang hadir. Semua menyebut setuju. Airlangga lantas mengetok palu sidang sebagai

tanda bahwa partainya resmi mengusung Prabowo-Gibran.

Namun, usai Partai Golkar menyatakan mengusung Gibran, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengaku kecewa karena hal itu dinilai semakin memperjelas upaya melanggengkan politik dinasti.

"Tentu apa yang dilakukan Partai Golkar semakin memperkuat dugaan-dugaan kami, sebagai mahasiswa maupun sebagai masyarakat bahwa ada suatu upaya atau intrik yang sedang dilaksanakan untuk melanggengkan politik dinasti," kata Koordinator Pusat BEM SI Hilmi Ash Shidiqi.

Hilmi mengungkapkan ada serangkaian upaya untuk membangun politik dinasti rezim Presiden Jokowi. Hal itu terlihat dari sejumlah kejadian mulai dari Presiden Jokowi yang melakukan 'cawe-



cawe'. Hingga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan soal batas usia capres-cawapres.

"Lalu bagaimana tiba-tiba nama Gibran kuat sebagai cawapres kemudian ditambah keputusan MK yang mengabulkan terkait batas usia capres cawapres," ujar dia.

"Kemudian sekarang salah satu partai koalisi yang mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres. Tentu dari kejadian-kejadian tersebut, semakin kuat dugaan kami meyakinkan bahwa ini benar-benar intrik yang dilaksanakan untuk menggenggam politik dinasti itu sendiri," sambungnya.

Hilmi mengaku kecewa karena demonstrasi yang sempat dilakukan oleh BEM SI pada 20 Oktober 2023 seolah sia-sia. "Kami melihat ketika kemarin kita menyuarakan dengan lantang, saat ini H+1 setelah menyuarakan ternyata apa yang kami suarakan hanya peringatan yang tidak digubris oleh para pemain politik. Tentu kami akan tetap menyuarakan ini dengan lantang. Kami menolak segala upaya dinasti politik yang sedang dan ingin dibangun," tutur dia.

Direktur Eksekutif Indo Polling Network, Nasrullah Kusadibrata, menyatakan Partai Golkar berburu efek ekor jas dalam mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

"Strategi melekatkan Gibran Rakabuming sebagai cawapres Golkar, bagian dari exit strategi atau keluar dari jebakan semakin merosotnya elektabilitas Golkar, dan mendapatkan coattail effect/ efek ekor jas," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 21 Oktober 2023.

Dia menjelaskan, dari posisi cawapres Gibran, dapat meningkatkan dukungan suara dan perolehan kursi DPR pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Nasrullah berpendapat mencuatnya nama Gibran melalui Partai Golkar karena posisi partai politik tersebut di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Partai Golkar memiliki kursi terbesar kedua sebanyak 85 kursi setelah PDIP 128 kursi, berdasarkan hasil pemilu 2019. Kemudian disusul Partai Gerindra 78 kursi, Partai Demokrat 54 kursi dan PAN 44 kursi.

"Golkar memiliki posisi tawar strategis

untuk mendapatkan prioritas mengisi posisi cawapres Prabowo," ujarnya.

Selain itu, sebagai partai dengan kursi terbesar di KIM, Partai Golkar memiliki kepentingan besar secara elektoral untuk mendapatkan efek ekor jas dari kontestasi Pilpres 2024. "Kalau kita lihat dari berbagai temuan survei, elektabilitas Golkar saat ini merosot di posisi ketiga, tertinggal dari PDIP dan Gerindra," katanya.

Tak Percaya Diri

Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, menilai Partai Golkar sebagai salah satu partai senior kini terlihat gagal dalam melakukan kaderisasi kepemimpinan. Menurut Najmuddin, harusnya Golkar yang masih eksis sebagai partai papan atas lebih mengedepankan kader dari partai sendiri untuk menjadi capres ataupun cawapres.

"Sudah lama sekali Golkar tidak mengusung kader sendiri sebagai capres maupun cawapres. Padahal ini partai besar dan sudah punya pengalaman panjang," kata Najmuddin.

• INFO NASIONAL

Partai Golkar hari ini mendeklarasikan nama kader PDIP yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Sebelumnya Golkar juga sudah memastikan mendukung Prabowo sebagai capres. Di mana diketahui Prabowo adalah ketua umum Partai Gerindra.

Najmuddin mengingat terakhir kali kader Golkar maju di Pilpres adalah pada Pemilu 2009 saat mencalonkan Jusuf Kalla sebagai capres. Kala itu, JK berpasangan dengan Ketua Umum Hanura, Wiranto.

tum, Airlangga Hartarto tidak mampu meningkatkan elektabilitas menyaingi Prabowo, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Untuk menjadi cawapres pun, Golkar tidak memiliki daya tawar ketimbang nama-nama lain yang beredar."Ini adalah kegagalan kaderisasi Golkar. Padahal selama ini kita tahu Golkar adalah partai kader," ujar Najmuddin.

Najmuddin mengingatkan pada Pemilu 2004, di mana kala itu Golkar harus mengadakan konvensi internal partai untuk menjadi capres. Alasannya karena terlalu banyak kader potensial maju se-

Gibran Rakabuming sebagai cawapres oleh Partai Golkar. Dia menilai pengusungan itu menunjukkan matinya demokrasi dan sebaliknya, tumbuhnya politik dinasti.

"Saya menyebut ini (sejarah Golkar) yang paling buruk karena melawan semangat reformasi," kata Syamsuddin.

Syamsuddin mengatakan, publik mesti kecewa dan marah atas keputusan Partai yang dinahkodai Airlangga Hartarto tersebut memilih putra sulung Presiden Joko Widodo itu sebagai cawapres. Dia menegaskan bahwa negara yang melakukan praktek politik



Setelah itu, di Pemilu 2014, Golkar yang diketuai Aburizal Bakrie gagal mengusung kader internal sebagai capres. Mereka mendukung Prabowo yang kala itu berpasangan dengan Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa.

Setelah itu, pada Pemilu 2019, Golkar masuk ke dalam barisan pengusung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Jokowi adalah kader PDIP dan Ma'ruf adalah representasi dari ulama dan ormas Nahdlatul Ulama.

Harusnya di Pemilu 2024 ini, menurut Najmuddin, sudah saatnya Golkar menonjolkan kadernya untuk menjadi capres atau cawapres. Tapi hal itu gagal dilakukan. Capres yang digadagadag Golkar sebelumnya yakni Ke-

bagai capres. Mereka yang ikut konvensi Golkar 2004 adalah Akbar Tanjung, Wiranto, Surya Paloh, Prabowo Subianto dan Tommy Soeharto.

Nama-nama peserta konvensi Golkar 2004 itu dinilai Najmuddin sekarang telah menghiasi panggung utama politik nasional dalam beberapa dekade terakhir walau sudah dengan partai masing-masing.

"Dulu betapa kayanya Golkar dengan kader hebat. Sekarang mereka tak dapat usung capres maupun cawapres," sambungnya.

Ketua Yayasan ASA Indonesia sekaligus Dewan Pembina Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah, mengkritisi diumumkannya

dinasti jelas melanggengkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Politik dinasti merampas demokrasi. Mereka melakukan korupsi terhadap demokrasi kita. Kita berada di posisi darurat politik dinasti. Ada beberapa negara contoh yang bisa kita lihat di mana-mana bahwa negara yang melakukan praktik politik dinasti pasti negara itu korup," ujar dia.

Syamsuddin juga menekankan bahwa seharusnya Partai Golkar memiliki semangat demokrasi dengan melawan politik dinasti. Dia pun mengkritisi mengenai pengkaderan Partai Golkar yang dinilai tidak representatif.

Pasalnya, Golkar tidak mengambil nama cawapres dari kadernya sendiri,

melainkan dari kader partai lain, di mana Gibran Rakabuming merupakan kader PDIP. Padahal Partai Golkar disebut merupakan partai politik yang paling banyak kedua mendapatkan alokasi keuangan dari negara, namun tidak menggunakannya dengan baik dari segi pengkaderan.

"Rakyat punya hak menggugat partai terhadap bagaimana proses rekrutmen. Publik harus sadar bahwa selama ini membayar pajak dan duit itu masuk pada alokasi dana bantuan parpol. Golkar menjadi partai yang paling banyak kedua mendapatkan dana bantuan keuangan dari negara dengan tujuan melakukan proses rekrutmen kaderisasi," kata Syamsuddin.

Ia mengatakan bahwa langkah Partai Golkar mengusung Gibran yang merupakan kader partai lain, yakni PDIP, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat melalui proses penggunaan alokasi anggaran yang tidak digunakan sebagaimana mestinya.

"Saya menganggap Golkar itu seperti mobil besar tapi tidak ada mesin, padahal kan banyak kader. Masak Ketua Umum Airlangga Hartanto tidak percaya diri?" tutur dia.

Menurut Syamsuddin, masyarakat perlu bereaksi atas kabar diusungnya Gibran. Setidaknya dua poin kenapa hal itu perlu dilakukan, yakni dilanggengkannya politik dinasti di negara Indonesia dan tidak termanfaatkannya alokasi anggaran parpol dari negara.

"Harus (rakyat bereaksi). Kayaknya seolah-olah rakyat dipertontonkan bahwa rakyat tidak ada partisipasi atau dibuka ruang, pokoknya seolah hanya punya hak untuk memilih (mencoblos) calon. Menurut saya sekarang ini Pemilu yang 2024 rakyat harus betul-betul sadar bahwa pemilu kan referendum untuk menentukan pilihannya," kata dia.

Syamsuddin mengatakan masyarakat bisa melakukan demonstrasi untuk menyuarakan lebih lantang menge-

nai penolakan terhadap praktek melanggengkan politik dinasti. Dia mengaku mengapresiasi demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di kawasan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 20 Oktober 2023, yang diantara poin tuntutanannya adalah menolak politik dinasti.

Sayangnya, demonstrasi tersebut

gas dia.

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang, mengatakan langkah politik Partai Golkar yang mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai cawapres pendamping Prabowo menjadi sesuatu yang paradoks. Hal itu mengingat Partai Golkar lebih mementingkan kader partai lain dibandingkan kadernya sendiri.



justru mendapatkan reaksi yang kembali mengecewakan. H+1 usai demo itu, nama Gibran justru secara resmi diusung menjadi cawapres.

Meski begitu, semangat demokrasi masyarakat diharapkan mesti terus membawa untuk bisa melawan politik dinasti dengan melakukan berbagai gerakan, di antaranya gerakan turun ke lapangan.

"Yang dilakukan mahasiswa semalam itu penting dan langkah yang harus diapresiasi. Harus hati-hati untuk tidak memilih partai politik yang mendukung politik dinasti. Karena selain membunuh atau melawan semangat demokrasi, partai itu juga tidak menggunakan atau menyalahgunakan duit pajak kita yang masuk pada bantuan dana parpol," te-

"Pada saat kader Golkar Ridwan Kamil masuk sebagai salah satu cawapresnya Ganjar Pranowo, petinggi Golkar justru mengambil sikap kontra dibandingkan pro," kata Ahmad Atang di Kupang, Minggu, 22 Oktober 2023.

Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Kupang itu mengatakan dalam sejarah pilpres, Golkar selalu menjadi partai pendukung dan bukan menjadi partai pengusung. Kader-kader Golkar selalu kalah populer dengan kader partai lain, sehingga sikap politik mendukung figur dari partai lain.

Walaupun Golkar pernah menjadi partai pengusung Wiranto dan Jusuf Kalla, namun hanya berhenti pada kedua figur tersebut dan tidak ada kelanjutannya.

Dia menambahkan, pilihan politik ini akan beresiko terhadap elektabilitas Golkar pada pemilu mendatang. Hal ini perlu diwaspadai karena antara pemilu dan pilpres berlangsung pada momentum yang sama. ●

PPP TARGET 5 BESAR

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menargetkan posisi kelima pada Pemilu 2024. Pada pemilu sebelumnya, PPP menempati urutan kesembilan atau partai dengan jumlah kursi paling sedikit di parlemen.

"Kami ingin posisi tiga yang saat ini berada di urutan kesembilan di parlemen. Kami berharap naik tingkat, minimal menjadi urutan kelima di parlemen untuk Pemilu 2024. Ini bisa dilakukan, yang penting ada komitmen kebersamaan dari DPRD kabupaten, provinsi dan pusat," kata Ketua Fraksi PPP DPR, Amir Uskara, saat memberikan sambutan dalam Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia, Jumat, 20 Oktober 2023.

Kepada 1.300 kader PPP yang hadir, Amir berharap mereka dapat menjadi garda terdepan dan mesin penggerak PPP di daerahnya masing-masing. Menurutnya, jika anggota PPP dapat bekerja secara maksimal, selain naiknya peringkat di parlemen, mereka juga dapat memenangkan calon presiden yang mereka usung, Ganjar Pranowo.

"Ini harus ada komitmen yang tegas. Saya kira Pak Ketua beserta jajarannya DPP PPP sudah menginstruksikan kepada kita semua untuk bekerja secara bersama-sama mencari

suara untuk DPRD kabupaten, DPRD provinsi dan DPR RI, sekaligus dengan calon presiden kita insya Allah menjadi presiden," jelasnya.

Amir menjelaskan, PPP memiliki dua agenda politik yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Pertama, bagaimana memenangkan PPP. Kedua, bagaimana memenangkan Ganjar Pranowo.

Meskipun PPP sudah mengundang beberapa pemateri yang akan membahas soal kemenangan agenda politik secara bersamaan, ia tetap berharap bisa mendapat masukan dari anggotanya terkait hal ini.

"Kita akan hitung masing-masing di TPS, suara teman-teman di DPRD kabupaten berapa, suara teman-teman di TPS itu berapa, suara teman-teman di D P R itu berapa, dan suara calon presiden kita berapa, dan itu tidak bisa kita bohongi. Makanya tentu kita berharap sekali lagi, melalui workshop ini mari kita satukan pikiran, pandangan kita bersama-sama untuk bisa memperkuat PPP sekaligus mem-

enangkan capres kita," jelasnya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Uno, mengajak pengurus PPP di semua tingkatan untuk merapatkan barisan menjelang Pemilu 2024. Hal ini disampaikannya pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VIII PPP bertema "Perkuat Ekonomi Rakyat, Menangkan PPP di Pemilu 2024" di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2023.

Sandiaga menjelaskan, PPP telah menargetkan perolehan 11 juta suara pada Pemilu 2024. Untuk itu, menjaga soliditas kader dan pengurus partai menjadi hal penting.

"Kita rapatkan barisan. Target kita memperoleh sebanyak 11 juta suara pada pemilu yang akan datang," ujar Sandiaga.

Pada Rapimnas, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini juga memaparkan pentingnya menggaet pemilih muda pada Pemilu 2024. Sebab, pemilih milenial dan generasi Z menjadi salah satu segmen terbesar pada Pemilu 2024, yakni mencapai 160 juta pemilih.

"Angka partisipasi 80 persen atau sekitar 160 juta pemilih di pemilu 2024 adalah generasi milenial dan generasi Z, ini yang harus kita ambil karena ceruknya luas" paparnya.

Sandiaga menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan strategi khusus dalam membidik pemilih generasi milenial dan generasi Z. Strategi tersebut akan dijalankan selama masa kampanye. Akan tetapi, Sandiaga tidak membeberkan strategi tersebut. "Kampanye hanya 117 hari dari sekarang. Kita akan buat kegiatan berdasarkan aktivasi, semua kegiatan berdasarkan Pilpres," kata Sandiaga.



Calon wakil presiden yang diusung PPP, Mahfud MD, berkomitmen memenangkan partai berlambang Ka'bah di Pemilu 2024. Mahfud meminta seluruh kader di tingkat kabupaten/kota, provinsi, serta DPP untuk solid memenangkan pemilu.

"Saya yakin, karena saudara ikhlas saja, saya ini membawa amanah dari para ulama yang untuk membumikan pesan keislaman, dan biasanya yang begitu itu selalu ditolong oleh Allah," kata Mahfud.

Mahfud juga mengulas soal kejayaan PPP di masa orde baru. Menurutnya, kejayaan itu bakal bisa diraih kembali oleh PPP di Pemilu 2024. Ia pun optimistis survei PPP akan terus naik selepas dirinya dideklarasikan menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

"Mudah-mudahan terus naik," jelas Mahfud.

Menkopolkam ini bercerita tentang kedekatan yang terjalin sejak lama dengan PPP. Adapun masa-masa itu terjadi ketika dirinya diminta menjadi Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Namun, Mahfud mengatakan saat itu tak memiliki partai untuk bisa dimajukan. Tetapi, PPP di bawah kepemimpinan Ketua Umum Hamzah Haz saat itu memberikan jalan untuk bisa menjadi Menteri Pertahanan.

"Saya lapor ke Pak Hamzah Haz, tetapi perlu baju politik. Mau tidak PPP memberi rekomendasi baju politik ke saya, Oh mau. Semua berdebat, tetapi saya pulang, saya diminta ketemu dari atas mobilnya beliau kira-kira 5 menit. Prof saya sudah kirim surat ke Alwi Shihab, menteri luar negeri. Waktu itu yang lebih dominan Pak Alwi Shihab dibandingkan Menseskab," sebutnya.

"Pak Alwi yang lebih dekat dengan Gusdur, yang menentukan jabatan-jabatan Pak Alwi Shihab. Saya sudah kirim surat ke Presiden melalui Pak Alwi Shihab, pokoknya Prof adalah teman kami, orang PPP. Sehingga setuju," lanjut Mahfud.

Mahfud mengatakan kedekatannya dengan PPP pun berlanjut hingga Mardiono menjadi Plt Ketua Umum saat ini. Ia pun berkomitmen untuk mendorong dan membantu PPP serta parpol koalisi pengusungnya di Pemilu 2024.

Sebelumnya, Ketua DPP Bidang Data dan Digital PPP, Rendhika Harsono, mengaku, partainya memiliki strategi jitu dalam menjangkau suara kaum muda dalam Pemilu 2024.

"PPP sendiri, merancang baru kebijakan dan implementasinya di setiap provinsi dan kabupaten/kota," kata Rendhika.

Untuk itu, PPP telah menciptakan pola untuk meraup suara tersebut yang akan diterapkan di kota-kota besar di mana banyak generasi milenial dan Gen Z. Bahkan, program hingga kegiatannya sudah dipersiapkan PPP untuk menarik minat kalangan muda tersebut.



"Kami mau membuka mata mereka, bahwa partai politik merupakan perpanjangan tangan mereka," ucapnya.

Ketua Umum Angkatan Muda Ka'bah ini menegaskan PPP akan rutin menggelar diskusi dengan generasi milenial dan Z. Sebab, sebanyak 438 bakal calon anggota legislatif (caleg) PPP dipersiapkan untuk memenangkan kontestasi Pileg 2024.

"Insya Allah, banyak, kami se-Indonesia memiliki anggota 438 bakal caleg. Kami siapkan administrasinya untuk masuk dalam bagian dari caleg-caleg PPP," ujar Rendhika.

KPU sendiri memproyeksikan ada sekitar 110 juta penduduk atau 55-60 persen yang berusia 20-44 tahun yang diperkirakan berpartisipasi dalam Pemilu 2024.

"Jadi pemilih muda itu yang berusia

17 tahun, usia pemilih awal sampai 40 tahun itu proporsinya 54-60 persen," ujar anggota KPU, August Mellaz.

Ia menyebutkan potensi pemilih tersebut merujuk pada dua sumber data. Pertama, berdasarkan data penduduk potensial pemilih pemilu dalam negeri, yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenu).

Menurut dia, berdasarkan data penduduk potensial pemilih pemilu jumlah keseluruhannya mencapai 206 juta. Apabila terdapat warga negara Indonesia (WNI) yang belum berusia 17 tahun, akan tetapi pada saat 14 Februari 2024

mendatang sudah berusia 17 tahun, maka akan didata.

Menurut dia, Pemilu 2024 akan menjadi suatu momentum yang tidak saja penting dan strategis dalam konteks kebangsaan. Namun juga konteks generasi karena Indonesia di masa mendatang banyak menentukan bagaimana masyarakat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden, serta pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.

"Akan ditentukan oleh aspirasi yang kemudian mampu tidak para peserta pemilu itu merumuskan harapan, tuntutan, aspirasi dari pemilih yang faktanya 60 persen isinya orang muda. Ini menarik dan menjadi tantangan ke depan," tutur dia. ●



MUBA PASTIKAN AMAN DARI KONFLIK PEMILU

Menyambut pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan berbagai persiapan terutama mengantisipasi berbagai masalah pada pelaksanaan pesta demokrasi.

Guna memastikan kesiapan tersebut Pj Bupati Muba, H Apriyadi Mahmud memimpin gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024. Operasi Mantap Brata Musi ini merupakan operasi dalam rangka pengamanan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 agar proses pemilu bisa berjalan dengan aman dan lancar.

Dikatakan Apriyadi, setelah dilakukannya simulasi sistem pengamanan kota dengan digelar apel pasukan operasi ini juga dalam rangka pemeriksaan akhir kesiapan personel, alat serta sarana dan prasarana yang digunakan aparat kepolisian dalam rangka pengamanan Pemilu 2024.

"Kita semuanya, baik pemimpin mau-

pun seluruh masyarakat sangat berharap pemilihan umum yang akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024 mendatang bisa berlangsung dengan aman, lancar, dan demokratis di wilayah Kabupaten Muba," kata Pj Bupati Muba.

Apa yang menjadi harapan bersama ini tentunya harus ada kerjasama yang baik dalam penanganan situasi darurat harus diperkuat antara personel gabungan Polri, TNI dengan instansi terkait.

"Untuk itu, dalam menghadapi tahun politik pemilu tahun 2024 diharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muba, harus bijak menyikapi apapun bentuknya itu pemberitaan jangan mudah terprovokasi," tuturnya.

Kapolres Muba AKBP Imam Syafi'i menyampaikan, dalam apel gelar pasu-

kan ops dilakukannya pengecekan kesiapan dan menyatakan seluruhnya sudah siap melakukan operasi. Untuk mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai serta mencegah berbagai kerawanan.

“Maka, kesiapan menghadapi tahapan Pemilu 2024 tentunya kita juga persiapkan langkah dari persiapan pengamanan, langkah untuk meredam terjadinya polarisasi atau hal-hal yang mengarah ke politik identitas dengan cooling system bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah dan seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Untuk itu lanjutnya, sinergitas dan soliditas antara personel pengamanan dan stakeholder terkait juga merupakan



Untuk itu, dalam menghadapi tahun politik pemilu tahun 2024 diharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muba, harus bijak menyikapi apapun bentuknya itu pemberitaan jangan mudah terprovokasi.

kunci keberhasilan operasi ini.

“Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel yang terlibat dan mengajak semua untuk bersama-sama mengamankan Pemilu 2024,” terangnya.

Fokus Penanganan Karhutla

Guna memaksimalkan kondisi Kabupaten Muba yang lebih baik, Pemkab Muba juga kini fokus pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karahutla). Untuk memastikan situasi tersebut Pj Bupati, Apriyadi Mahmud bahkan turun langsung ke lokasi kebakaran untuk ikut memadamkan api.

“Hot spot yang terpantau ini dominan di lokasi lahan gambut dan kita akui saat ini di lokasi pemadaman api kita kesulitan air dan menembus masuk lokasi

yang harus dipadamkan,” ungkap Pj Bupati Apriyadi Mahmud saat melokalisir Karhutla di Kecamatan Lalan.

la merinci, hasil peninjauan di udara diestimasikan sudah hampir mencapai 1000-1500 hektar hutan yang terbakar.

“Saat ini kami terus berjuang ekstra memadamkan api, lokasi tempat terbakar ini adalah lokasi hutan,” bebarnya.

la menambahkan, saat ini juga proses

angkat desa dan Kecamatan untuk partisipatif aktif dalam meminimalisir meluasnya Karhutlah.

“Imbau warga untuk selalu waspada dan antisipasi selalu penyebaran api, karena ini sangat cepat apinya meluas,” ungkap dia.

Sementara itu, Dandim 0401 Muba Letkol Inf Erry Dwianto SPSi MHan mengaku saat ini jajaran Dandim 0401 Muba



pemadaman api kekurangan pemadaman dari udara menggunakan helikopter atau water bombing. Dimana seluruh tim di lapangan dari jajaran TNI, Polisi, dan pihak perusahaan sekitar ekstra juga melakukan penyiraman di daerah terdekat yang tidak terbakar, guna meminimalisir penyebaran api.

Apriyadi juga menginstruksikan per-

terus melakukan upaya ekstra pemadaman api di lokasi bersama tim di lapangan dari Polisi serta perusahaan sekitar.

“Kita terus memaksimalkan upaya meminimalisir perluasan api, karena api sangat cepat menyebar. Kondisi ini juga dihadapkan dengan sulitnya air untuk pemadaman api dan menjangkau lokasi api,” tuturnya. •rhd/***



Pembahasan Upah Minimum 2024

BURUH WAJIB SEJAHTERA PENGUSAHA HARUS LABA

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendorong peman­gku kepentingan untuk segera mulai membahas kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024. Asosiasi buruh tersebut menilai, pembahasan UMP dapat dilakukan meski tanpa dasar hukum.

Dasar hukum kenaikan UMP sebelumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31/2021 tentang Pengupahan. Namun, PP tersebut merupakan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kini sudah tidak berlaku akibat penerbitan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan, pembahasan UMP harus segera dilakukan agar dapat tetap terbit maksimal 60 hari sebelum akhir tahun atau 1 November 2023. Oleh karena itu, Said mendorong pembahasan tripartit oleh pihak buruh, pengusaha, dan pemerintah tetap berlangsung tanpa dasar

hukum.

“Secara pragmatis, kami sebaiknya berunding di Dewan Pengupahan Nasional tanpa dasar aturan. Kan aturannya enggak ada sekarang,” kata Said, Kamis, 19 Oktober 2023.

Said mengusulkan kenaikan UMP 2024 tetap menggunakan formula yang ditetapkan dalam PP Nomor 31 Tahun 2021, yakni jumlah antara proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 dan proyeksi inflasi 2024, lalu dikalikan dengan alfa.

Said mendorong agar besaran alfa adalah antara 1,0 sampai 2,0. Nilai atau alfa merupakan indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun lalu, nilai ditetapkan berada dalam rentang 0,1-0,3.

Menurutnya, penentuan alfa penting agar kenaikan UMP 2024 lebih besar dibandingkan kenaikan gaji pegawai negara tahun depan. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan gaji ASN sebesar 8 persen dan pensiunan sebesar 12 persen pada tahun depan, pertama kali sejak 2019. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,2 persen, sedangkan inflasi diperkirakan sebesar 2,8 persen. Ia pun mengusulkan kenaikan UMP 2024 sebesar 15 persen dengan alfa sebesar 1,875.

Said menjelaskan, kenaikan UMP 2024 sebesar 15 persen akan membuat gaji buruh sesuai dengan status



Judicial Review UU Cipta Kerja kan sudah dikeluarkan putusannya oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu menolak. Karena sudah ada putusan Judicial Review-nya, mestinya enggak ada lagi alasan enggak mau diskusi, karena sudah bisa dieksekusi

Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah atas. Jika usulan tersebut dikabulkan, Said menghitung rata-rata nasional gaji buruh akan menjadi Rp5,6 juta per bulan atau Rp67,2 juta per tahun.

Said juga menjelaskan, pertimbangan angka 15 persen adalah kenaikan UMP buruh yang tertunda pada 2020-2022 akibat pandemi COVID-19.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan, pembahasan kenaikan upah akan dilakukan berdasarkan aturan turunan UU 6/2023 tentang

Cipta Kerja yang kemungkinan segera diterbitkan pemerintah.

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengatakan, pengusaha sepakat untuk menjaga daya beli buruh. Namun, perkara besarnya harus disesuaikan dengan pembahasan berdasarkan dasar hukum yang akan diterbitkan pemerintah.

"Bukan soal besaran kenaikan UMP 2024, yang harus dipertimbangkan itu bagaimana menentukan indeks tertentunya. Kami sepakat untuk menjaga daya beli buruh," ujar Bob.

Menurut Bob, aturan turunan UU Cipta Kerja tentang pengupahan ke-

ungkinan hanya merevisi sedikit dari Peraturan Pemerintah Nomor 31/2021 tentang Pengupahan. Namun, penerbitan revisi aturan tersebut tersendat oleh uji materi formil UU Cipta Kerja oleh pihak buruh.

Uji materi UU Cipta kerja ini yang menurut Bob juga menjadi alasan pihak buruh masih enggan membahas kenaikan UMP 2024 di Dewan Pengupahan pada minggu-minggu sebelumnya.

"Judicial Review UU Cipta Kerja kan sudah dikeluarkan putusannya oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu menolak. Karena sudah ada putusan Judicial



Review-nya, mestinya enggak ada lagi alasan enggak mau diskusi, karena sudah bisa dieksekusi,” ujar dia.

Bob pun menyarankan agar diskusi kenaikan UMP 2024 tidak terlalu lama di Dewan Pengupahan Nasional. Menurutnya, hal tersebut penting untuk memastikan hubungan industrial pada tahun depan.

Dia mengusulkan agar fokus diskusi di Dewan Pengupahan Nasional adalah besaran indeks tertentu. Ia menyarankan agar disparitas upah antar daerah menjadi salah satu pertimbangan penentuan indeks tersebut.

Bob menemukan adanya potensi migrasi tenaga kerja jika disparitas upah antar daerah terus melebar. Menurut dia, migrasi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah pengangguran karena tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja di daerah dengan UMP tinggi.

Bob juga menampik alasan buruh meminta kenaikan UMP 2024 sebesar 15 persen karena kecilnya kenaikan upah pada 2020-2022 akibat pandemi COVID-19. Menurut dia, UMP pada tahun-tahun sulit tersebut tetap naik meski tak di semua industri.

Dia mencontohkan, kenaikan UMP pada 2020-2022 terjadi pada industri farmasi dan alat kesehatan, tetapi memang tertunda pada industri transportasi.

“Waktu pandemi COVID-19, berhenti hampir semua sektor industri, ya wajarlah kalau situasinya seperti itu. Jadi, jangan disamaratakan, harus lihat per perusahaan,” ujarnya.

Bob mengatakan pihaknya ingin rumus perhitungan kenaikan UMP 2024 tetap mengacu pada aturan saat ini, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi.

“Ya formula mesti konsisten supaya ada kepastian bagi dunia usaha dan juga pekerja,” kata Bob.

Permenaker 18/2023 itu berisi beberapa ketentuan soal pe-

ntuan upah minimum bagi pemerintah daerah. Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

R u m u s kenaikan-nya adalah upah t a h u n sekarang d i t a m - b a h p e n y e s u a i a n nilai Upah Minimum (UM) dikali U M

tahun sekarang. Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi (pertumbuhan ekonomi dikali indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

“Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen,” kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Kementerian Ketenagakerjaan sendiri memberi sinyal UMP bakal naik di 2024 meskipun saat ini pembahasan dan perhitungan masih terus dilakukan.

Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani, menyatakan pihaknya masih menunggu revisi PP 36/2021 tentang Pengupahan. Menurutnya, dunia usaha berhati-hati menentukan usulan kenaikan upah pekerja tahun depan karena gelaran Pemilu 2024.

“Saat ini kan sedang ada revisi PP 36, kita juga menunggu PP 36 ini, jadi formulasi saya rasa sudah jelas, tapi bakal seperti apa persisnya kami menunggu,” ujar Shinta di Kota Serang, Banten, Selasa, 17 Oktober 2023.

Shinta mengatakan, Apindo belum bisa memperkirakan besaran kenaikan upah pekerja di Indonesia karena ada berbagai pertimbangan,



seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi di setiap daerah. Kemudian besaran kenaikan upah juga harus di bicarakan bersama melalui forum tripartit dan dewan pengupahan. Sehingga diharapkan bisa menemukan jalan tengah terkait besaran kenaikan upah di tahun politik mendatang.

“Jadi itu tergantung dari pertumbuhan ekonomi daerahnya dan juga inflasi. Jadi ini akan berbeda-beda, tidak sama semua. Kami juga punya tripartit di daerah, tentunya juga akan ada proses konsultasi dengan dewan pengupahan,” terangnya.



Pekerja perlu dilindungi dari pelemahan daya beli karena dengan adanya kenaikan UMP setidaknya lebih tinggi dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Selain faktor daerah dan dalam negeri, kondisi luar negeri juga bakal jadi bahan pertimbangan kenaikan upah secara nasional. Menurut Shinta, nilai ekspor dan dunia usaha Indonesia belum benar-benar pulih, ditambah situasi global yang masih belum menentu. Berbagai kondisi itu diharapkan jadi pertimbangan pemerintah untuk mengatur formula dan menetapkan kenaikan upah pada 2024.

“Pemerintah juga perlu melihat situasi terkini apa yang terjadi dengan situasi ekonomi saat ini. Keadaan juga pemulihan belum kembali normal karena kondisi global yang penuh ketidakpastian, dan itu juga berpengaruh ke perekonomian Indonesia, walaupun kita tumbuh dengan cukup baik. Tapi kita lihat ekspor kita menurun, jadi bayak situasi global yang jadi gambaran juga,” jelasnya.

Sementara itu, pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan

Industri (Kadin) Indonesia menyebut UMP 2024 sulit naik sampai 15 persen.

Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, menuturkan usulan kenaikan UMP hingga 15 persen tentu harus ada dasar dan rumusnya.

“Dengan kondisi ekonomi saat ini apakah dunia usaha memiliki kemampuan menaikkan UMP sampai 15 persen, sesuatu yang tidak mungkin,” ucapnya, Selasa, 18 Oktober 2023.

Sarman menjelaskan, seluruh pemangku kepentingan harus tetap melihat kondisi ekonomi saat ini dari sisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah.

Ia mengingatkan ekonomi Indonesia masih belum pulih dari hantaman COVID-19. Apalagi, di tengah pemulihan kini Indonesia dihadapkan dengan kondisi perekonomian global yang juga tertekan. Menurutnya, kondisi ekonomi global tersebut pun berdampak pada kondisi nasional.

Sarman mengatakan pertumbuhan ekonomi global turun drastis dan semakin parah akibat terjadinya perang Rusia-Ukraina yang saat ini masih berkepanjangan.

Ia menilai realitas ekonomi global saat ini tentu akan semakin tidak pasti akibat terjadinya perang Israel-Hamas Palestina yang diprediksi akan dapat mempengaruhi harga minyak dunia.

Oleh karena itu, Sarman mengingatkan serikat pekerja harus mengerti bahwa permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan global. Dengan begitu, kenaikan UMP tidak akan lebih dari 10 persen.

“Kami meminta kepada teman-teman serikat pekerja agar dapat meminta kenaikan upah minimum 2024 yang sesuai dengan kemampuan dunia usaha,” ucap Sarman.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan kenaikan dilakukan dengan melihat geliat ekonomi saat ini. Dia berharap keputusan pihaknya itu tidak diprotes pengusaha.

“Tentunya (UMP naik), mudah-mudahan tidak diprotes pengusaha,” kata Anwar di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu, 15 Oktober 2023.

Meski demikian, Anwar belum mau membeberkan berapa besaran kenaikan UMP 2024 karena sampai saat ini masih terus dihitung. Keputusan resmi soal kenaikan UMP 2024 akan disampaikan pada akhir November 2023. Namun, kemungkinan kenaikan tidak akan sampai 15 persen seperti tuntutan buruh.

“Ya kalau buruh permintaannya tinggi terus. Kita kan juga menghitungnya tentunya dari berbagai pertimbangan, terutama terkait dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celsius), Bhima Yudhistira, menyebut, UMP 2024

diperkirakan naik di kisaran 9-10 persen. Kenaikan upah tersebut sebagai kompensasi tingkat inflasi yang lebih tinggi akibat penyesuaian harga kebutuhan energi, transportasi, dan pangan.

Menurutnya, dengan naiknya UMP 2024, para pekerja dapat terlindungi dari pelemahan daya beli.

“Pekerja perlu dilindungi dari pelemahan daya beli karena dengan adanya kenaikan UMP setidaknya lebih tinggi dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Adapun UMP 2024 akan ditetapkan dan diumumkan paling lambat 21 November 2023. Tanggal tersebut sesuai dengan PP 36/2021 tentang Pengupahan. Sementara, untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat ditetapkan dan diumumkan pada 30 November 2023. ●





KUOTA HAJI INDONESIA 2024 JADI 241 RIBU JEMAAH

Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu jemaah untuk perjalanan haji pada 2024.

Kuota tambahan tersebut berhasil didapatkan setelah pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada Kamis, 19 Oktober 2023.

"Kurang dari 12 jam komitmen tambahan kuota haji langsung diberikan paling tidak 20 ribu untuk tahun depan tambahannya diberikan kepada Indonesia," ujar Presiden dalam keterangan-

jemaah haji Indonesia sudah mencapai 47 tahun, sehingga Indonesia membutuhkan tambahan kuota haji.

"Dan alhamdulillah ditanggapi sangat positif," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi bersyukur bahwa kegiatan kunjungan kerja ke Kerajaan Arab Saudi sudah selesai dan berjalan dengan lancar serta memberikan hasil yang produktif. Kegiatan tersebut yaitu pertemuan bilateral dengan PM Mohammed bin Salman Al-Saud hingga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-GCC (Gulf Cooperation Council).

"Alhamdulillah seluruh kegiatan sudah selesai. Pertemuan Bilateral dengan His Royal Highness Prince Mohammed Bin Salman dan KTT ASEAN-GCC berjalan lancar, berjalan dengan produktif," ucap Presiden.

"Karena memang di tengah situasi dunia yang makin terbelah, persahabatan seperti yang dibangun dua negara kita makin diperlukan," ucap Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan kekhawatiran Indonesia terhadap situasi di Palestina yang makin memburuk. Kepala Negara pun menegaskan sikap Indonesia yang mengutuk keras segala penyerangan yang berdampak pada kemanusiaan dari negara tersebut.

"Indonesia mengutuk keras serangan Israel atas Rumah Sakit Al Ahly di Gaza yang memakan ratusan korban sipil," lanjutnya.

Untuk itu, Presiden mengajak pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk bersama-sama menghentikan eskalasi di daerah konflik agar tidak makin meningkat. Selain itu, Kepala Negara mendorong agar permasalahan di daerah konflik Palestina dan Israel dapat segera terselesaikan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

"Ini saatnya dunia berdiri bersama untuk menghentikan eskalasi, mengutamakan isu kemanusiaan, dan menyelesaikan akar masalah sesuai parameter internasional yang sudah disepakati," katanya.

Persiapan Lebih Matang

Dengan komitmen tambahan 20.000 kuota haji pada tahun depan, maka proyeksi total jemaah haji asal Indonesia yang dapat terbang ke Mekkah menjadi 241 ribu jemaah.

Pemerintah Arab Saudi telah menginformasikan besaran kuota haji pada 2024 melalui surat yang diserahkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Surat pemberitahuan kuota haji tahun depan itu diberikan usai Haflat al-Haj al-Khitamy 1444 H, 30 Juni 2023.

"Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah menginformasikan kuota haji 2024 ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Tahun depan, kuota haji Indonesia berjumlah 221.000 orang," kata



nya yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 20 Oktober 2023.

Menurut Presiden, dalam pertemuan tersebut ia menjelaskan secara langsung kondisi antrean haji di Indonesia yang sudah sangat panjang. Bahkan, saat ini waktu tunggu keberangkatan

Presiden Jokowi juga menyambut baik hubungan Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi yang terjalin makin erat. Bahkan, Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi sepakat membentuk Dewan Koordinasi Tertinggi Indonesia-Arab Saudi untuk memperkuat hubungan kerja sama kedua negara.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, 3 Juli 2023.

Dengan adanya kepastian kuota untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan, maka kuota sama seperti pelaksanaan haji tahun ini yakni 221 ribu orang. Namun, pada penyelenggaraan 1444 H/2023 M, Indonesia mendapat tambahan kuota sebanyak 8.000 orang.

Dia menjelaskan Pemerintah Arab Saudi juga mengumumkan tahapan penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M. Pada 30 Juni 2023 yakni penyerahan dokumen pekerjaan dan pengumuman kuota haji 1445 H. Kemudian, 16 September 2023 rapat persiapan, pembukaan e-haji untuk input data, pengumuman daftar perusahaan yang mendapat izin, pembukaan kontrak penerbangan, aktivasi rekening di e-haji

Pada 4 November 2023 penyelesaian rapat-rapat persiapan dan paket pelayanan. Lalu, dilanjutkan pada 8 Januari 2024 yakni imposium dan pameran pelayanan haji dan umrah. Pada 24 Februari 2024 penyelesaian semua kontrak akomodasi dan layanan Masyair. Pada 1 Maret 2024 awal proses penerbitan visa.

Pada 29 April 2024, penutupan e-haji dan penerbitan visa dan 9 Mei 2024 awal kedatangan jamaah calon haji.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama juga tengah mengkaji ulang sistem remunerasi petugas haji serta skema pemberangkatan petugas haji 1445 Hijriah/2024 Masehi.

"Kita akan melakukan reformulasi penugasan, termasuk penghitungan kembali masa tugas para petugas haji," ujar Direktur Bina Haji, Arsad Hidayat.

Selama ini, ungkap Arsad, masa tugas para petugas haji disesuaikan dengan penempatan. Jamaah yang bertugas di Daerah Kerja (Daker) Mekah memiliki masa tugas sekitar 60 hari. Sementara itu petugas Daker Bandara dan Madinah memiliki masa tugas sekitar 72 hari.

"Ke depan, masa tugas akan

disesuaikan dengan beban dan target kinerja. Petugas yang cukup hanya 50 hari, masa penugasannya juga akan disesuaikan menjadi 50 hari," ujar Arsad.

Penyesuaian masa tugas, lanjut dia, akan berdampak kepada penyesuaian jadwal keberangkatan. Ke depan, pemberangkatan petugas tidak dilakukan secara bersamaan. Dia membuka kemungkinan penyiapan petugas khusus untuk fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

"Mereka akan diberangkatkan terakhir, sehingga saat puncak haji tidak kecapekan," ujar Arsad.

Dengan pola pemberangkatan seperti itu, Arsad menegaskan akan ada petugas khusus yang disiapkan untuk penanganan layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Selain masa pemberangkatan, lanjut dia, Kemenag juga tengah menganalisa beban kerja petugas haji. Hal ini dirumuskan dalam rangka peningkatan remunerasi mereka agar sesuai dengan beban kerjanya.

"Jika penilaian kinerja meningkat, mudah-mudahan ada penyesuaian honor petugas haji," kata Arsad.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama, Saiful Mu-

jab, mengatakan, pihaknya akan melakukan penyiapan dokumen jamaah haji 2024 lebih awal sebagai antisipasi adanya pelambatan dalam proses penerbitan visa jemaah.

Pemerintah Arab Saudi, kata Saiful, sejak tahun ini memberlakukan perekaman biometrik bagi jemaah haji. Perekaman yang menjadi syarat jemaah memperoleh visa haji dilakukan melalui aplikasi visa bio yang dikembangkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

"Dalam praktiknya, ada sejumlah jemaah yang terkendala dalam proses perekaman biometrik, sementara waktunya mepet. Alhamdulillah, akhirnya semua jemaah bisa memperoleh visa haji setelah melalui kerja keras dan perjuangan panjang," kata Saiful.

Sedangkan untuk musim haji 2024, pihaknya akan mencoba mengantisipasi dengan melakukan penyiapan dokumen lebih awal. Menurutnya, antisipasi perlu dilakukan karena perekaman biometrik melalui visa bio kemungkinan akan diberlakukan kembali oleh Pemerintah Arab Saudi pada 1445 Hijriah.

"Untuk peningkatan layanan dalam penyiapan dokumen, kami juga perlu melakukan penyeragaman SOP dalam pembatalan visa haji," ujarnya.

Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler, Zainal Ilmi, menambahkan evaluasi penyelesaian dokumen, pemvisaan, dan perlengkapan haji reguler diselenggarakan untuk meng-

etahui kelemahan atau kekurangan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M, khususnya terkait dokumen, pemvisaan dan perlengkapan haji reguler.

"Kami mengidentifikasi sejumlah persoalan yang muncul dan merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk penyelenggaraan ibadah haji mendatang," tuturnya. •



TERUS KEJAR INVESTASI CHINA

Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping, di Great Hall of the People, Beijing, Selasa, 17 Oktober 2023. Dalam pertemuan yang didahului dengan upacara penyambutan resmi tersebut, Presiden Jokowi mengangkat empat hal, dimulai dari kerja sama investasi hingga kerja sama antarmasyarakat.

Pertama, Presiden Jokowi menyampaikan mengenai upaya peningkatan kerja sama investasi terutama untuk baterai EV dan otomotif, pabrik suku cadang, kilang petrokimia, produksi baja, dan pengembangan kerja sama Halal Center. Presiden juga mendorong tindak lanjut kerja sama pengembangan koridor ekonomi "Two Countries, Twin Parks".

"Untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, saya harap RRT dapat jadi mitra strategis," ujar Presiden.

Kedua, terkait perdagangan dan keuangan, Presiden menyampaikan apresiasi terhadap perdagangan bilateral yang terus tumbuh dan seimbang.

"Ke depan kita perlu terus dorong pembaruan protokol dan peningkatan kuota impor sarang burung walet dan penambahan jenis produk ekspor seperti perikanan, pertanian, dan buah tropis," usul Presiden.

Mengenai kerja sama keuangan, Presiden Jokowi menyampaikan dukungannya terhadap rencana pembentukan local currency transaction melalui QR cross border untuk memfasilitasi ekspor-impor dan investasi.

Ketiga, mengenai ketahanan energi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang melakukan akselerasi penambahan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) sebesar 60GW hingga 2040. Presiden Jokowi pun berharap dukungan RRT untuk mengimplementasikan kerja sama kelistrikan kolaborasi Indonesia-RRT. Hal itu dikarenakan ketahanan energi merupakan bidang kerja sama yang dinilai dapat terus diperkuat antara kedua negara.

Keempat, Presiden Jokowi juga mendorong peningkatan wisatawan kedua negara. Presiden Jokowi menyebut sejumlah langkah, mulai dari penambahan frekuensi penerbangan langsung Indonesia-RRT, hingga meningkatkan

beasiswa dan pelatihan vokasi bagi mahasiswa Indonesia.

"Serta implementasi kerja sama desa melalui peningkatan kapasitas kepala desa Indonesia," ucap Presiden.

Selain itu, kedua pemimpin negara juga turut bertukar pandangan mengenai situasi dunia saat ini, termasuk situasi di Gaza. Indonesia dan RRT memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya upaya untuk deeskalasi situasi dan memberikan fokus bagi isu kemanusiaan.

Selain bertemu Xi Jinping, Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional RRT, Zhao Leji, di Great Hall of the People, Beijing, Rabu, 18 Oktober 2023. Pertemuan tersebut digelar di sela-sela pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-3 Belt and Road Forum (BRF) for International Cooperation.

Ketua Zhao Leji menyampaikan apresiasi terhadap peningkatan kerja sama Indonesia dan RRT. Dia menyebut, kepemimpinan strategis Presiden Xi Jinping dan Presiden Jokowi berhasil melanjutkan inisiatif belt and road dan visi poros maritim dunia.

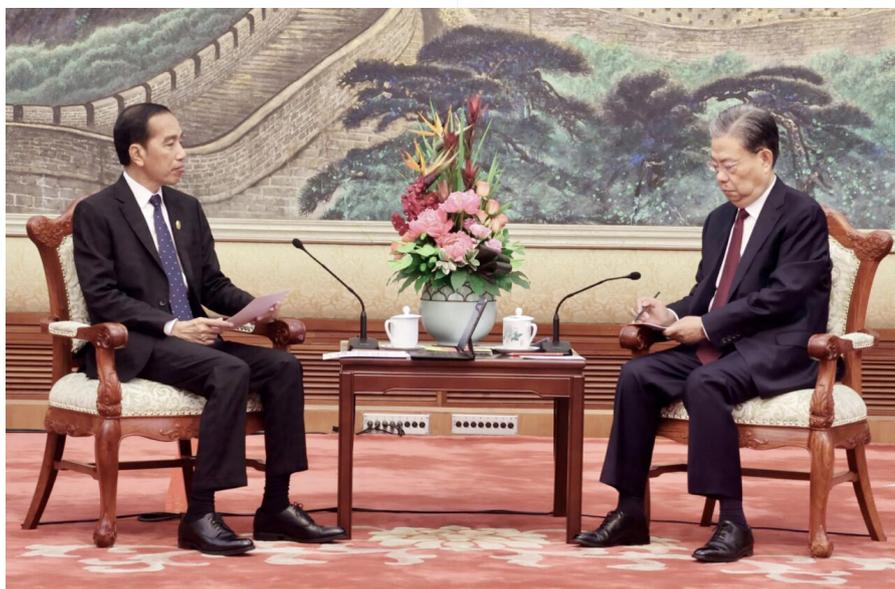
"Kerja sama yang saling menguntungkan telah menghasilkan progres yang cukup berimbang, sehingga telah berperan sebagai suatu teladan bagi peningkatan kerja sama regional," ujar Zhao Leji.

Sementara itu, Presiden Jokowi turut menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama antarparlemen Indonesia dan RRT yang telah berjalan dengan baik. Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa Indonesia dan RRT sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama kedua negara di berbagai bidang.

"Dan tentunya ini membutuhkan dukungan dari parlemen," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi pun berharap kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan RRT yang telah berjalan selama 10 tahun dapat terus dijaga. Hal tersebut penting dilakukan untuk menjaga hubungan baik kedua negara.

"Kemitraan strategis komprehensif In-



donesia dan Tiongkok telah berusia 10 tahun dan ini harus terus kita jaga untuk mempererat hubungan kedua negara,” ucap Presiden Jokowi.

Sinergi BRI

Presiden Jokowi menuturkan bahwa dibutuhkan upaya bersama agar nilai-nilai Belt and Road Initiative (BRI) tetap terjaga untuk memperkuat sinergi dan kerja sama dalam pembangunan infrastruktur.

“Saya berharap sinergi BRI dalam pembangunan infrastruktur dapat terus, dan di tengah situasi dunia yang makin terbelah kerja sama BRI tidak boleh dipolitisasi. Ini membutuhkan upaya kita bersama dalam menjaga nilai-nilai utama agar inisiatif ini makin kuat dan makin berdampak,” ucap Presiden saat memberi pandangan dalam acara pembukaan BRF ke-3 di Great Hall of The People, Beijing, Rabu, 18 Oktober 2023.

Presiden Jokowi menilai bahwa rasa kepemilikan sangat penting untuk keberlangsungan sebuah proyek. Oleh karenanya dibutuhkan sinergi yang memberikan ruang kepemilikan bagi negara tuan rumah untuk melaksanakan proyek nasionalnya secara mandiri sebagaimana dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Indonesia.

“Indonesia memiliki proyek nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang kemudian disinergikan dengan BRI dan baru-baru ini telah diluncurkan dan dioperasikan,” jelas Presiden.

Presiden pun berharap ke depannya hal serupa dapat dilakukan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. “Ke depan, kami juga akan sinergikan pembangunan IKN, transisi energi, dan hilirisasi industri,” tuturnya.

Selain itu, Kepala Negara juga menekankan agar proyek BRI harus dilandasi prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan antarpihak. “Serta dilengkapi dengan perencanaan yang matang, penggunaan sistem pendanaan yang transparan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemanfaatan produk dalam negeri,” sambungnya.

Terakhir, Presiden Jokowi memandang bahwa keberlanjutan proyek BRI harus dipastikan untuk jangka panjang dan dapat memperkuat fondasi ekonomi negara mitra. “Bukan justru

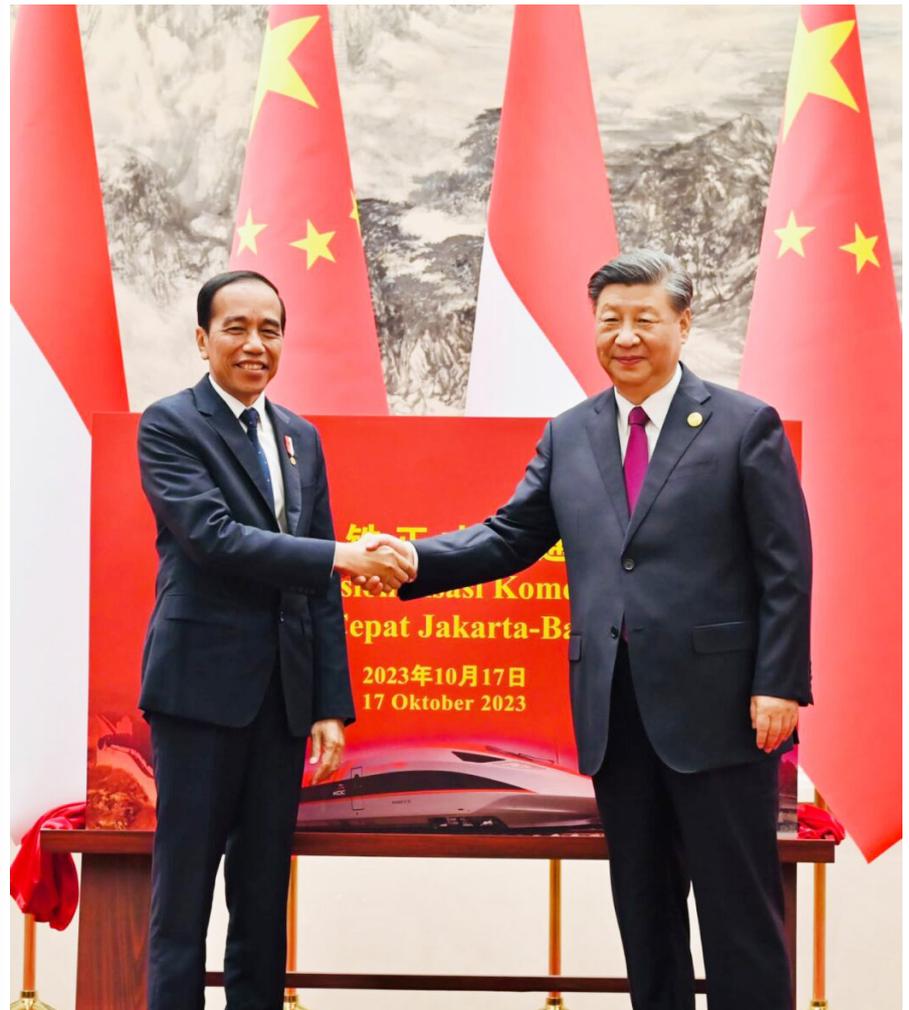
mempersulit kondisi fiskalnya,” tegasnya.

Presiden juga turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah RRT atas kontribusi yang diberikan kepada negara-negara berkembang melalui BRI.

Sementara itu, dalam agenda High Level Forum yang mengangkat tema “Connectivity in an Open Global Acad-

berkontribusi bagi perdamaian di kawasan untuk menciptakan kemakmuran bersama,” ujarnya.

Presiden juga turut menuturkan sejumlah pembangunan konektivitas yang telah dilakukan Indonesia selama sembilan tahun terakhir. Presiden meyakini bahwa pembangunan konektivitas merupakan jalan kemakmuran bagi sebuah



emy”, Presiden menyampaikan terdapat empat hal penting dalam membangun konektivitas di sebuah negara.

“Yang pertama, harus memberikan manfaat ekonomi. Yang kedua, harus dilakukan merata dan inklusif. Yang ketiga, harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Yang keempat, harus didukung pengembangan sumber daya manusia dan alih teknologi,” jelas Presiden.

Presiden Jokowi menilai bahwa keempat hal tersebut merupakan sebuah landasan dalam kerja sama BRI untuk pembangunan konektivitas.

“Sehingga BRI ini dapat menjadi solusi bagi pengembangan konektivitas dan

negara.

“Selama sembilan tahun sampai akhir 2023, Indonesia membangun lebih dari dua ribu kilometer jalan tol, dan juga membangun jalan nontol, pelabuhan-pelabuhan baru, dan bandara-bandara baru,” jelasnya.

Selain membangun infrastruktur besar, Presiden Jokowi juga menuturkan bahwa Indonesia juga membangun konektivitas melalui pembangunan infrastruktur kecil yang tersebar di seluruh desa di Tanah Air.

“Ada lebih dari 320 ribu kilometer jalan desa, 1,7 juta meter jembatan, dan lainnya,” lanjutnya. ●



Dilaporkan terdapat tiga artis yang menjadi bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang diduga terlibat dalam promosi judi online.

Ketiga nama tersebut telah dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar tindakan ini dapat ditindaklanjuti.

Juru bicara dari LBH PB PMII, Muhammad Qusyairi menjelaskan bahwa tiga orang ini dilaporkan ke KPU agar mendapatkan perhatian khusus dibandingkan dengan calon legislatif lainnya.

Sebelumnya, telah beredar video yang menunjukkan Denny Cagur, Gilang Dirgahari, dan Vicky Prasetyo mempromosikan situs online yang diduga merupakan situs judi online.

LBH PMII berharap KPU akan mengambil tindakan tegas terkait hal ini, termasuk mencoret nama-nama mereka dari Daftar Calon Sementara (DCS) dan akan menerima apapun keputusan yang diambil oleh KPU.

"Pemerintah telah berusaha memblokir situs judi online dan penegak hukum juga telah bergerak cepat terkait masalah ini," jelasnya.

Ketiga nama tersebut adalah:

1. GILANG DIRGAHARI (GD), BACALEG DARI PPP UNTUK DAPIL DKI JAKARTA I

Gilang Dirga, salah satu artis caleg yang terlibat dalam promosi situs judi online, mengklaim bahwa dirinya hanyalah korban dalam situasi ini.

Menurutnya, ia tidak menyadari bahwa yang dipromosikan adalah judi online, karena ia mengira itu hanya sebatas game online.

Ia menceritakan bahwa ia menerima tawaran membuat video dari manajernya pada tahun 2020, tanpa mengetahui bahwa itu terkait dengan judi online.

Menurut Gilang Dirga, ia merasa menjadi korban dalam kasus promosi judi online ini karena peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2020, di mana ia hanya menjalankan pekerjaan untuk membuat video.

Ia mengungkapkan bahwa manajernya pada saat itu menawarkan pekerjaan membuat video dengan imbalan finansial yang menggiurkan.

"Bisa dibayangkan di sini gue menjadi korban juga karena itu kan tahun 2020. Gue sebagai artis ditawarin oleh manajer bikin video, ada duitnya, ya bikin aja gitu kan," ungkap Gilang

beberapa waktu lalu.

Gilang menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui bahwa video promosi yang dibuatnya akan digunakan untuk mempromosikan judi online, ia mengira video tersebut akan digunakan untuk mempromosikan game online.

"Gua enggak tahu kalau itu adalah judi online karena yang gua promoin adalah game online," katanya.

Gilang juga mengakui bahwa dirinya dan manajemennya saat itu kurang melakukan pengecekan yang cukup terkait dengan pekerjaan tersebut.

"Salahnya gua dan manajer adalah enggak ngecek lagi," ujarnya.

Sementara itu, terkait pencalonannya sebagai anggota DPR RI, Gilang mengungkapkan bahwa ia akan terus maju dan tidak terganggu oleh isu promosi judi online tersebut, pasalnya isu tersebut tidak memiliki hubungan dengan pencalonannya sebagai anggota DPR.

Gilang juga merasa optimis bahwa orang-orang akan memahami bahwa ia adalah korban dalam kasus promosi judi online tersebut.

"Gua rasa itu dua hal yang berbeda ya, gua melakukan itu di tahun 2020. Berarti memang sudah cukup lama. Gua rasa gak ada hubungannya sih (dengan pencalonan menjadi anggota DPR), gua rasa orang-orang pasti paham," tambahnya.

2. DENNY CAGUR (DC), BACALEG DARI PDIP UNTUK DAPIL JAWA BARAT II

Komedian Denny Cagur menjadi sorotan publik setelah dikabarkan menjadi salah satu dari beberapa artis yang diduga mempromosikan judi online. Namun, sang istri, Shanty, dengan tegas membantah kabar tersebut.

Shanty, yang ditemui di kawasan Tendean Jakarta Selatan, menanggapi kabar tersebut dengan kritik keras.

"Hah? Nggak ada suami aku yang terlibat dalam hal itu," ujarnya dengan nada tegas.



Shanty merasa sangat yakin dengan pernyataannya ini karena ia belum pernah melihat Denny Cagur mempromosikan situs judi online. Baginya, kabar ini jelas salah dan keliru.

"Aku nggak pernah lihat dia promosiin judi online," tegas Shanty.

Ia menegaskan keyakinannya bahwa Denny Cagur tidak pernah terlibat dalam promosi judi online dan ia merasa bahwa kabar ini hanyalah spekulasi tanpa dasar.

"Nggak pernah lihat dia, kayaknya salah deh," tambah Shanty sebelum meninggalkan awak media.

Kabar ini muncul setelah akun Twitter @deduktifid mengunggah 13 foto artis yang diduga mempromosikan judi online, salah satunya adalah Denny Cagur. Meskipun kabar ini telah menyebar, Shanty dengan tegas membantah keterlibatan suaminya dalam hal tersebut, dan menyatakan bahwa ia yakin Denny Cagur tidak pernah terlibat dalam promosi judi online.

3. VICKY PRASETYO (VP), BACALEG DARI PARTAI PERINDO UNTUK DAPIL JAWA BARAT VI

Presenter Vicky Prasetyo membantah keterlibatannya dalam dugaan kasus promosi judi online. Penyangkalan ini dia sampaikan setelah namanya digosipkan terlibat dalam kasus tersebut.

"Aku belum tahu dan belum ada update soal itu," katanya.

Vicky Prasetyo, yang juga dikenal sebagai vokalis Kudeta, menegaskan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui kasus promosi judi online tersebut. Menurutnya, ia tidak pernah mempromosikan situs judi online di media sosial.

"Aku enggak pernah (promosi judi online). Enggak pernah tahu dan melakukan," jelas mantan suami Angel Lelga tersebut.

Vicky Prasetyo menyebut bahwa hingga saat ini, ia belum menerima informasi apa pun dari pihak

kepolisian terkait kasus tersebut. Dia juga belum menerima surat panggilan untuk pemeriksaan terkait dugaan promosi judi online.

"Enggak ada (panggilan polisi)," tambah Vicky Prasetyo.

Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memberikan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan oleh LBH PB PBMII terkait tiga bacaleg yang diduga terlibat dalam promosi judi online.

Komisioner KPU RI, Idham Holik, menyatakan bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah komunikasi dengan partai politik yang memiliki kaitan dengan bacaleg yang disebutkan dalam pengaduan tersebut.

"Pada prinsipnya kami akan berkomunikasi dengan partai yang bersangkutan bahwa ini ada tanggapan dari masyarakat," kata Idham dalam sebuah wawancara di Jakarta.

Dalam tiga nama yang menjadi subjek pengaduan ini adalah Gilang Dirga, yang merupakan bacaleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I, Vicky Prasetyo, bacaleg dari Partai Perindo di dapil Jawa Barat VI, dan Denny Cagur, bacaleg dari PDIP di dapil Jawa Barat II.

Idham menjelaskan bahwa KPU memiliki kewenangan untuk mencoret nama seorang bacaleg

dari Daftar Calon Sementara (DCS) hanya dalam beberapa kasus tertentu,

seperti jika peserta pemilu meninggal dunia, menerima putusan pengadilan yang bersifat inkrah, atau

menggunakan dokumen palsu.

Namun, dalam kasus promosi judi online yang diajukan oleh PB PBMII, KPU tidak memiliki kewenangan untuk tindakan lebih lanjut karena masalah tersebut berada di luar domain yang dapat mereka tangani.

Idham menekankan bahwa hal ini dapat berubah jika bacaleg yang bersangkutan telah menerima putusan inkrah dalam kasus pidana terkait, sebagai contoh.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia telah memberikan pernyataan mengenai dugaan keterlibatan tiga bakal calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari kalangan artis dalam promosi judi online.

Bawaslu menyatakan bahwa mereka akan mengambil langkah selanjutnya terkait kasus ini setelah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan tindakan hukum yang sesuai. Hal ini dikarenakan, dugaan keterlibatan dalam kasus ini dianggap sebagai ranah hukum yang merupakan kompetensi kepolisian.

Komisioner Bawaslu Republik Indonesia, Lolly Suhenty, menjelaskan bahwa dugaan ini lebih bersifat kriminal dan tidak secara langsung terkait dengan pemilu, terutama dalam hal ketentuan pencalonan. Kasus ini hanya menjadi perhatian Bawaslu karena terduga pelakunya adalah bakal caleg.

Selain itu, Lolly juga menyampaikan keraguan mengenai apakah tiga bakal caleg tersebut benar-benar terlibat dalam promosi judi online atau hanya menjadi korban fitnah yang mungkin melibatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Oleh karena itu, ia berharap agar pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan menyeluruh terkait kasus ini untuk mengungkap kebenarannya.

"Bagi Bawaslu, kasus-kasus semacam ini penting agar pihak kepolisian bergerak cepat mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika kepolisian memproses kasus ini dalam konteks ini, kami akan menunggu hasil penyelidikan mereka dan melihat apa yang akan terungkap," pungkasnya. ●



AIS

Gunawan Effendi

Penting, namun Konferensi Tingkat Tinggi di Bali itu bagaikan tenggelam dalam lautan ingar-bingar peristiwa lain: KTT Archipelagic and Island States (AIS) Forum. Jadi, AIS Forum itu adalah wadah berkumpulnya negara-negara pulau dan kepulauan.

Harap maklum, dinamika politik dalam negeri sedang berada dalam momen-momen tersibuk menjelang suksesi (pergantian) kepemimpinan nasional melalui Pilpres dan Pemilu Legislatif pada 2024. Jadi, KTT AIS Forum itu seperti terlewat begitu saja.

Toh Presiden Joko Widodo yang membuka acara itu di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 11 Oktober 2023. Semalam sebelumnya, Presiden Jokowi juga menjadi membuka Gala Dinner (makan malam untuk menyambut tamu negara).

Nah, di acara Gala Dinner itulah Presiden mengemukakan pentingnya Forum AIS. "Penyebabnya, laut adalah kehidupan kita, lautan merupakan kesatuan manusia dan lautan menyediakan banyak sumber daya yang harus kita kelola secara bertanggung jawab," kata Jokowi.

Lebih dari itu, Forum AIS tampak merupakan inisiatif Indonesia sebagai salah satu negara AIS terbesar di dunia. Kantor AIS itu di Menara Thamrin, Jakarta. Yang mengelola dan para tenaga ahlinya juga kebanyakan orang Indonesia.

Dari sejarahnya, gagasan membentuk Forum AIS muncul setelah Konferensi Kelautan 2017 di New York City, Amerika Serikat dalam wadah Perserikatan Bangsa Bangsa. Berlanjut kemudian dengan Konferensi Forum Negara Pulau dan Kepulauan di Jakarta pada tahun yang sama. Dari konferensi itu lahirlah pemahaman bersama di antara negara-negara peserta AIS. Forum Negara Kepulauan dan Kepulauan kemudian secara resmi dibentuk melalui adopsi Deklarasi Bersama Manado pada Pertemuan Tingkat Menteri pertama negara-negara peserta pada 1 November 2018.

Dalam laman web resminya, AIS Forum merupakan ranah Badan PBB untuk program pembangunan (UNDP) dan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Namun, di forum itu Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sedang dalam pemulihan kesehatan di Singapura. Sedangkan Menko

Marves ad interim Erick Thohir belum menerima tugas itu.

Apapun, tercatat lima pimpinan tertinggi negara hadir langsung, yakni Presiden Micronesia, Perdana Menteri Niue, Perdana Menteri Sao Tome and Principe, Perdana Menteri Timor Leste, dan Perdana Tuvalu. Sementara Fiji dan Tonga mengirimkan Deputi Perdana Menteri. Delapan negara mengirimkan menterinya yaitu Maladewa, Kepulauan Marshall, Palau, Seychelles, Singapura, Kepulauan Solomon, Sri Lanka dan Papua Nugini.

Sebanyak tiga negara mengirimkan pejabat setingkat wakil menteri atau direktur jenderal atau sekretaris jenderal yaitu Cabo Verde, Selandia Baru, dan Madagaskar. Kemudian, 11 negara mengutus duta besar yaitu Irlandia, Jepang, Siprus, Samoa, Malta, Inggris, Saint Lucia, Kepulauan Cook, Filipina, Suriname, dan Bahrain. Sedangkan empat organisasi internasional yang mengirimkan perwakilannya adalah Kelompok Kerja Sama Negara Melanesia (MSG), Forum Negara Kepulauan Pasifik (PIF), Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dan Badan Program Pembangunan PBB (UNDP).

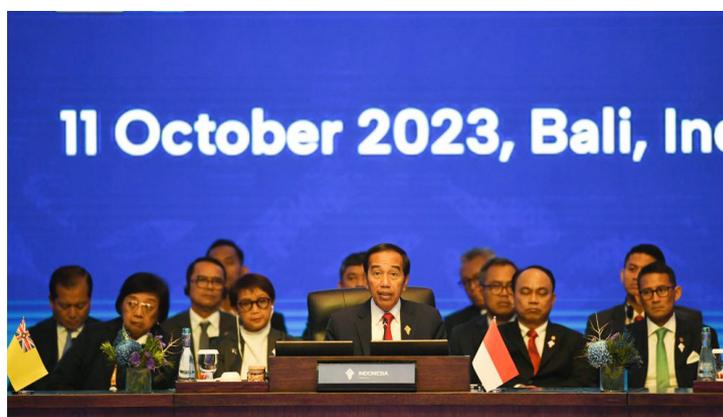
Alhasil, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang tampak paling sibuk di KTT AIS Bali itu. Menurut Bu Menlu, KTT AIS Forum menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kerja sama menuju ekonomi biru dan pariwisata hijau. Kesepakatan ini tertuang dalam deklarasi "Solidarity of The

Archipelagic and Island States Forum," yang ditandatangani oleh para peserta di BNDCC pada Rabu, 11 Oktober 2023.

Retno menjelaskan, kesepakatan pertama, para pemimpin sepakat AIS Forum dijadikan sebagai organisasi internasional. Nantinya, para menteri atau perwakilan negara rutin melakukan pertemuan untuk mengonkretkan kesepakatan tersebut. Kedua, memperkuat kerja sama dalam upaya mengatasi persoalan lingkungan. Seperti mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru dan pariwisata hijau, mengatasi sampah laut, dan tata kelola maritim yang baik.

"Blue economy is there as one of the priorities dan ecotourism. Ini juga banyak dibahas dalam pertemuan," kata Menlu Retno.

Nah, bagaimana tindak lanjut konkret deklarasi KTT AIS Forum di Bali? Meski lebih ke bidang kelautan, perikanan, dan pariwisata, nama Indonesia menjadi taruhannya. ●





JALAN PANJANG LAWAN JUDI ONLINE

Pemberantasan judi online di Indonesia berjalan panjang dan melelahkan. Sudah beberapa kali ganti Menteri Komunikasi dan Informatika, Indonesia masih terus kebanjiran situs macam ini.



• INFO KHUSUS

Dampak judi online tak main-main. Berdasarkan catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika, kerugian masyarakat per tahun ditaksir mencapai Rp27 triliun.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan sebanyak 2,19 juta warga berpenghasilan rendah alias miskin rela merogoh kocek untuk main judi online. Jumlah itu setara dengan 79 persen dari total pemain judi online di Indonesia, yakni 2,76 juta.

Masih menurut PPATK, ada 159 juta lebih transaksi terkait judi online sepanjang 2023 yang nilai transaksinya mencapai Rp160 triliun.

"Tahun 2023 sampai dengan saat ini, PPATK sedang menganalisis lebih dari 159 juta transaksi dengan nilai lebih dari Rp160 triliun terkait dengan judi online," ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, beberapa waktu lalu.

Jika digabungkan dari tahun-tahun sebelumnya, angkanya jauh di atas atau terbilang sangat besar, yakni bisa mencapai lebih Rp200 triliun. Sebelumnya, PPATK menyebut terdapat

perputaran dana senilai Rp190 triliun dalam 157 juta transaksi selama periode 2017 hingga 2022.

Perputaran uang dimaksud merupakan aliran dana untuk kepentingan taruhan, pembayaran kemenangan, biaya penyelenggaraan perjudian, transfer antar-jaringan bandar, serta transaksi dengan tujuan diduga pencucian uang yang dilakukan oleh jaringan bandar.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengaku pemberantasan judi online bukan perkara mudah. Menurutnya, setiap pihaknya memutus akses, situs judi online yang baru kerap muncul lagi.

"Kami sangat sadar dan menyadari penuh bahwa upaya-upaya yang saya sebutkan di atas belum menuntaskan permasalahan perjudian online, karena setiap hari terus bermunculan ribuan situs dan puluhan aplikasi baru yang dapat diunduh di luar aplikasi Apple Appstore dan Google Playstore," jelas Budi.

Untuk periode 18 Juli (sehari setelah pelantikan Budi sebagai Menkominfo) hingga 18 Oktober, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah memutus akses 425.506 konten perjudian.

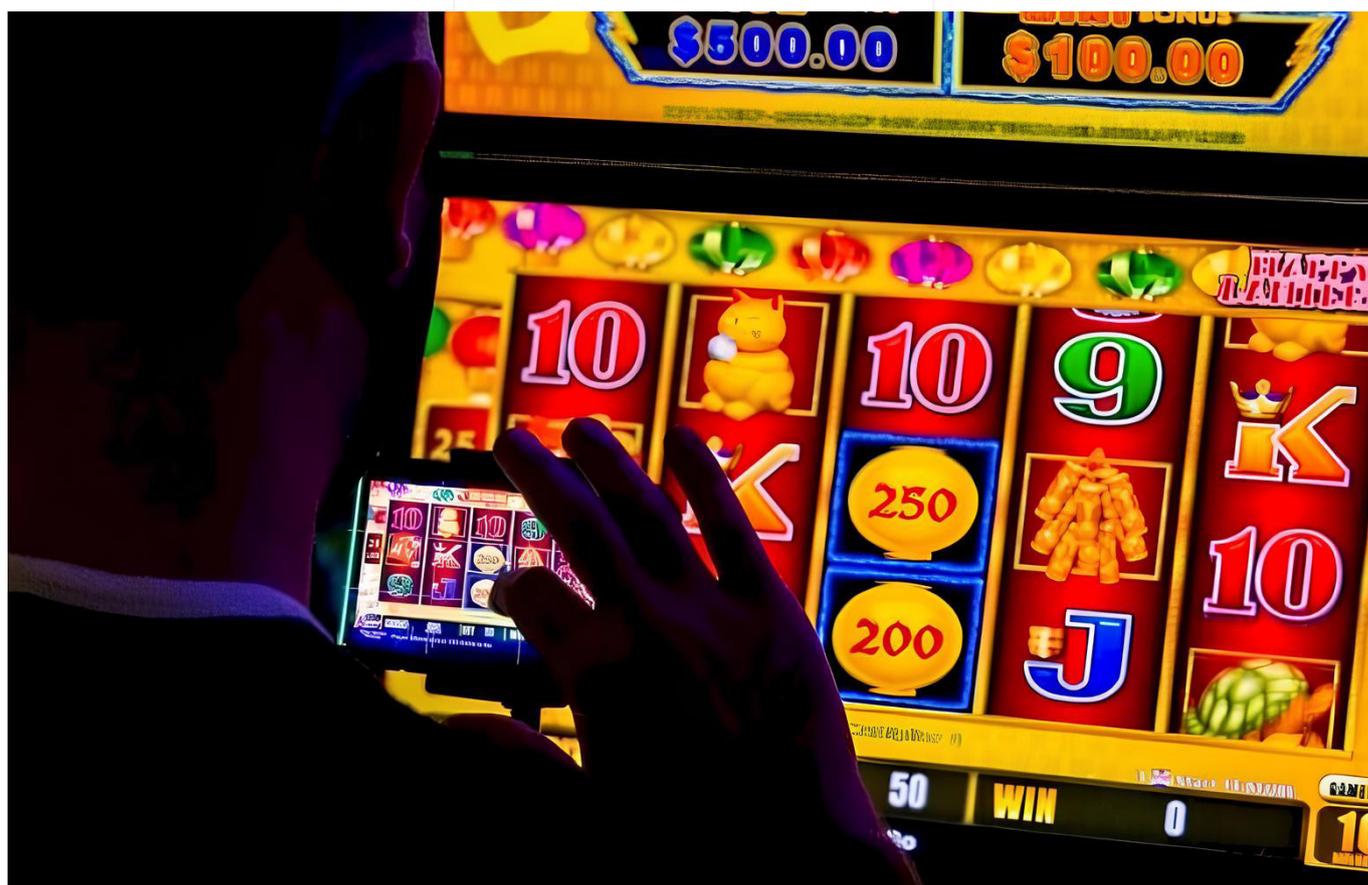
Sebanyak 237.096 konten di antaranya berasal dari situs dan alamat internet protokol (IP Address), 17.235 konten dari file sharing, dan 171.175 konten dari media sosial.

Menurut Budi, salah satu cara memberantas judi online adalah lewat penindakan hukum bagi pihak-pihak yang mempromosikan praktik ilegal tersebut. Budi dalam satu kesempatan menyatakan influencer yang mempromosikan situs judi online bakal ikut ditindak dan segala bentuk yang berkaitan dengan judi online bakal disikat.

Ia mengungkap saat ini beberapa influencer yang mempromosikan judi online sudah ditangani oleh kepolisian.

"Ada, ada beberapa influencer kan yang sudah dieksekusi oleh polisi tanda kutip. Ini serius lah. Jadi kalau ada, ini juga sekalian mengimbau influencer-influencer, tokoh-tokoh publik, jangan mempromosikan judi slot karena pasti akan berhadapan dengan aparat penegak hukum," kata Budi.

Namun, realita menyatakan sebaliknya. Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) mengkritik langkah kepolisian yang dinilai terkesan terbang



pilih dalam kasus dugaan promosi situs judi online.

Pengamat Kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto menilai terdapat perbedaan sikap yang cukup terasa terkait proses hukum yang melibatkan para publik figur tersebut.

Menkominfo menyebutkan tidak jarang pihak kepolisian bergerak cepat untuk menetapkan tersangka terhadap influencer kecil yang kedapatan mempromosikan situs judi online. Di sisi lain, sikap berbeda justru ditampilkan kepolisian ketika berhadapan dengan artis-artis kenamaan ibu kota.

"Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas dalam kasus pemberantasan judi terkonfirmasi di situ. Mengapa yang bawah selalu menjadi target awal karena mereka memiliki posisi paling lemah," ujar Bambang.

Budi bahkan sempat mendapat kecaman setelah melontarkan ide mau menggandeng artis Wulan Guritno sebagai duta anti-judi online. Padahal, saat itu, Wulan tengah disorot karena diduga ikut mempromosikan judi online.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, menjelaskan juru kampanye akan ditawarkan kepada para influencer maupun artis yang pernah terlibat dalam promosi judi online. Namun, mereka tak mengetahui jika hal itu ternyata melanggar hukum.

"Para selebritas dan influencer itu karena ketidaktahuannya, kemudian mempromosikan judi online, maka kita jadikan katakanlah juru kampanye anti judi online. Tapi kan tergantung ya mereka mau atau tidak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kemenkominfo ingin meng-approach mereka," kata Usman.

Ingatkan Platform Digital

Budi Arie mengungkapkan, Meta, perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp, telah menghapus 1,65 juta konten terkait judi online sebagai respons atas teguran yang disampaikan Kementerian Kominfo.

"Berdasarkan laporan yang saya terima, hingga 11 Oktober 2023, Meta telah menindaklanjuti teguran tersebut, dengan menghapus lebih dari 1,65 juta

konten perjudian, serta lebih dari 450 ribu iklan perjudian yang menargetkan pengguna di Indonesia serta melanggar kebijakan Meta," kata Budi Ariedi Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat, 20 Oktober 2023.

Sebelumnya, peringatan keras telah diberikan Budi Arie kepada Meta di Indonesia karena ditemukan konten maupun iklan soal judi online di platform media sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Meta. Peringatan tersebut dituangkan dalam surat dengan Nomor B703/M.KOMINFO/ AL.05.02/10/2023 perihal Perintah Penanganan Konten

itu. Tak lupa ia juga mengajak lebih banyak platform digital untuk ikut aktif dalam pemberantasan judi online di ruang digital Indonesia.

Budi Arie menegaskan, Kementerian Kominfo secara serius menangani perjudian online di Indonesia dengan tujuan agar tidak ada lagi masyarakat kecil yang menjadi korban. Dia memastikan tidak segan-segan untuk memberi teguran bahkan sanksi apabila ada platform yang tak mengikuti aturan dalam penanganan judi online.

"Saya tidak segan-segan memberikan teguran atau bahkan memberikan



dan Kegiatan Perjudian Online dan/ atau judi slot oleh PSE kepada Perwakilan Meta di Indonesia tertanggal 2 Oktober 2023.

Secara singkat, surat itu berisi permintaan Menkominfo dalam waktu 1x24 jam usai surat itu diterima Meta, perusahaan asal AS itu dapat segera meningkatkan penanganan konten dan iklan bermuatan judi online di platform-platform yang ada di bawah naungannya.

"Meta ternyata merespons dengan sangat baik atas teguran yang saya layangkan," kata Budi Arie.

Ia pun mengakui pemerintah mengapresiasi langkah konkret dari perusahaan induk Instagram dan Facebook

sanksi berat kepada platform yang masih membandel dan tidak serius dalam menangani konten judi online ini," ujar Budi Arie.

Budi Arie juga menyebutkan dua negara tetangga yaitu Kamboja dan Filipina menjadi pusat dari praktik judi online yang kini merebak di Indonesia. Hal itu menjadi temuan dalam pemberantasan judi online yang terus digencarkan sejak Budi Arie menjabat sebagai Menteri Kominfo pada Juli 2023.

"Mereka (pelaku judi online) kan pindah-pindah IP adress-nya, tapi saat ini kami sudah tahu kalau pusatnya itu di Kamboja dan Filipina. Kami terus berusaha menutup (akses) itu," kata Budi.

Menurut Budi sudah banyak langkah

yang diambil oleh Kementerian Kominfo untuk mempersempit ruang gerak para pelaku dan pengembang aplikasi judi online di Indonesia. Mulai dari pemblokiran akses konten judi online di ruang digital hingga penutupan akses keuangan yang diduga digunakan untuk transaksi judi online.

Untuk pemberantasan konten judi online itu, Kementerian Kominfo secara siaga menggunakan mesin kecerdasan buatan untuk menekan peredaran konten-konten tersebut.

Tidak hanya menggunakan teknologi yang dimiliki Kementerian Kominfo, operator seluler hingga penyedia jasa internet juga diajak untuk bisa mengawasi dan menutup akses ke situs web

atau aplikasi yang terafiliasi judi online.

Meski sudah berupaya memaksimalkan penanganan di dalam negeri, namun masih ada saja konten judi online ditemukan di ruang digital Indonesia. Sebab, pada dasarnya pusat data atau server judi online tersebut berada di luar Indonesia.

Budi berpendapat langkah-langkah tersebut pun tidak percuma karena sebenarnya tetap berguna mengurangi jumlah konten hingga ruang gerak para pembuat situs judi online secara signifikan di ruang digital Indonesia.

Dengan demikian, pihaknya tetap merutinkan kegiatan pemberantasan online, sehingga dapat tetap menjaga ruang digital di Indonesia produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Kami berusaha semaksimal mungkin, tapi namanya teknologi kan kecanggihannya lawan kecanggihannya. Tapi yang jelas intinya ekosistemnya sudah kami buat tidak kondusif lah begitu. Itu langkah serius kami," tegas Budi.

Sulit Dibasmi

Pengamat keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, membeberkan bahwa secara teknis membasmi judi online itu sangat sulit. Salah satu sebabnya adalah hukum di Indonesia melarang praktik judi. Sementara, di negara lain judi diperbolehkan dengan ketentuan tertentu.

Walhasil, penyelenggara judi online ini bisa berpindah operasi dari satu ke negara lain, tapi sasarannya tetap orang Indonesia. Menurut Alfons, mere-



Bahkan, bertumpuk-tumpuk, sudah pinjam dari pinjol (pinjaman online) eh uangnya dipakai judi online. Judi online kalah, utang pinjol bertumpuk.

ka memanfaatkan kanal digital, maka harus adu canggih antara pemerintah dengan penyelenggara judi online ini.

"Makin sulit karena sifat dasar manusia memang suka bermain judi," ujarnya.

Alfons meminta agar pemberantasan judi online ini perlu dilakukan koordinasi bersama beberapa Lembaga, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bisa menghadapi pelaku judi online ini. Namun, dia mengatakan judi online ini tidak akan hilang dan berhenti.

"Betul (tidak bisa berhenti). Seperti prostitusi dan narkoba kan tidak bisa dibasmi

sampai 100 persen hilang, kan?” kata Alfons.

Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, merespons penanganan judi online di Indonesia oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ia menyoroti saat ini influencer hingga streamer semakin terang-terangan ikut mempromosikan judi online dan tidak takut dengan aparat penegak hukum.

“Karena (mereka) bisa beralasan tidak tahu kalau itu (promosi) judi on-

Heru.

Heru menjelaskan, melihat kondisi seperti itu, perlu keseriusan pemerintah, termasuk memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat mengenai jahatnya judi online. Karena dampaknya membuat semakin runyam kehidupan jika uang bermain judi online berasal dari pinjol.

Upaya memblokir yang dilakukan juga tidak konsisten. Dia mengibaratkan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat-

situs perjudian, atau mendistribusikannya, termasuk juga membuat dapat diaksesnya ini juga menjadi bagian dari yang dapat dikenakan pasal 27 ayat 2,” kata Heru.

Mengacu pada pasal tersebut, hukuman untuk mereka yang menyebarkan situs judi dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Aturan itu berlaku untuk siapa saja, baik itu influencer, streamer, maupun pun masyarakat



line, sehingga tidak ada sanksi,” ujar Heru.

Akibatnya, promosi judi online tak terbandung dan masuk hingga ke pelosok daerah dan ke semua kalangan. Lebih parahnya lagi, kata Heru, aplikasi judi online kini merambah event esport.

“Harus diwaspadai. Jangan sampai esport ikutan dilarang karena juga mempromosikan judi online,” tuturnya.

Heru juga mengatakan penanganan judi online di Indonesia masih belum maksimal. Hingga kini korban akibat judi online masih banyak dan tak sedikit dari kalangan masyarakat miskin.

“Bahkan, bertumpuk-tumpuk, sudah pinjam dari pinjol (pinjaman online) eh uangnya dipakai judi online. Judi online kalah, utang pinjol bertumpuk,” ujar

pol PP) yang mengusir pedagang kaki lima. Bila Satpol PP tidak bekerja, maka pedagang kaki lima akan berjualan lagi.

“Jadi harus diawasi dan dijaga terus-menerus, jangan kendor untuk menutup situs dan aplikasi perjudian meski dengan label game online,” tutur Heru.

Heru menambahkan, pelaku yang mempromosikan judi online melalui akun media sosial dapat dikenai pidana. Hal itu diatur dalam UU 11/2008 yang direvisi menjadi UU 19/2016 tentang ITE. “Barang siapa setiap orang yang membuat aplikasi perjudiannya,



biasa.

“Jadi kita tidak melihat apakah pelaku pembuat atau mungkin influencer atau mungkin streamer, kalau mereka terbukti mengajak orang untuk menggunakan atau bermain judi online, akan dikenakan

sanksi,” ujar Heru.

Melihat maraknya akun yang mempromosikan situs judi online di media sosial, pihaknya berharap pemerintah dapat menindak pelaku tanpa pandang bulu. “Semua sama di mata hukum,” tandas dia. ●



BURUH HINGGA PNS IKUT KECANDUAN

Maraknya judi online kian meresahkan. Judi online tak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah seperti buruh atau petani, namun juga pegawai negeri sipil (PNS) dan karyawan swasta.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menceritakan, PNS juga terjerat judi online. "Karena waktu awal-awal saya masuk, saya difotoin sama teman-teman saya, ini pegawai kita pada main judi," kata dia dalam konferensi pers perkembangan penanganan judi online, Sabtu, 21 Oktober 2023.

Budi mengatakan, PNS hingga pejabat pemerintah daerah juga menjadi korban judi online. "Korbannya kan gila-gilaan, Pemda, pejabat Pemda, ASN, semuanya," imbuh Budi.

Kementerian Kominfo sendiri telah memblokir atau menghapus 425.506 konten terkait judi online selama tiga bulan terakhir, atau tepatnya sejak 18 Juli 2023. Penghapusan konten-konten tersebut dilakukan sebagai bentuk ketegasan pemerintah memberantas judi online. Terlebih, nilai transaksi judi online bisa mencapai Rp 160-350 triliun per tahun.

"Dari 18 Juli hingga 18 Oktober 2023, kami sudah mengeksekusi pemutusan akses 425.506 konten perjudian, di mana 237.098 konten berasal dari situs alamat internet protokol (IP address),



sebanyak 17.235 konten dari file shar- ing dan 171.175 konten dari media so- sial,” terang dia.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan, sebanyak 2,76 juta masyarakat Indonesia menjadi partisipan dalam permainan judi online. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,19 juta masyarakat merupakan golongan war- ga berpenghasilan rendah.

Kepala Biro Humas PPATK, M Natsir Kongah, menjelaskan, jumlah tersebut menggambarkan aktivitas pertaruhan dengan nominal kecil.

“(Nominal taruhan) di bawah Rp 100.000,” kata dia dikutip dari Kompas, Jumat, 13 Oktober 2023.

Natsir memerinci, profil masyarakat tersebut melingkupi pelajar, maha- siswa, buruh, petani, ibu rumah tang- ga, dan pegawai swasta. Tak hanya masyarakat berpenghasilan rendah, bahkan PNS juga menjadi korban judi

online ini.

Pada 17 Oktober 2023, salah satu PNS di Puskesmas Kota Bango, Jambi, nekat merampok toko emas dengan pistol mainan akibat kecandu- an judi online. Motif dari perampokan ini lantaran pelaku terlilit utang setelah bermain judi online.

Sebelumnya, seorang guru PNS di Pangandaran, Jawa Barat, ditetapkan menjadi tersangka setelah terbukti menjual aset sekolah berupa perang- kat lunak senilai Rp237 juta. Pelaku menjual aset tersebut untuk modal ber- main judi slot online.

Judi online juga menelan korban masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani. Sebanyak empat buruh tani warga Dusun Randu, Desa Jetis, Ke- camatan Besuki, Kabupaten Situbon- do, Jawa Timur, ditangkap polisi pada 19 Oktober 2023.

Kasi Humas Polres Situbondo, Iptu Sutrisno, menyatakan terpaksa mering-

kus keempat buruh tani tersebut sete- lah ada warga yang melaporkan secara langsung ke Reskrim Polres Situbondo.

Para warga khawatir semakin banyak buruh tani yang lain ikut bermain judi online. Salah satu buruh tani diketahui berperan sebagai bandar judi online wilayah Kecamatan Besuki.

“Ada empat orang, satu orang ber- peran sebagai pengoordinasi dan penginformasian ke para pemain,” ka- tanya.

Guru Besar Sosiologi Universitas Air- langga (Unair) Prof Bagong Suyanto menyoroti banyaknya masyarakat kel- las ekonomi menengah ke bawah yang tergoda judi online. Berdasarkan data PPATK, tercatat 2,76 juta masyarakat Indonesia merupakan partisipan judi online. Menariknya, sekitar 2,19 juta di antaranya adalah masyarakat berpeng- hasilan rendah.

Bagong menjelaskan, perjudian merupakan patologi sosial yang sudah

lama dan bentuknya berubah-ubah. Judi, memiliki berbagai bentuk. Ber-
macam taruhan muncul dari kejadian
yang sering ada di masyarakat. "Mulai
dari kejadian sederhana hingga kom-
pleks bisa dijadikan bahan taruhan un-
tuk perjudian," kata Bagong, Selasa, 17
Oktober 2023.

Dia mengatakan, budaya judi di se-
bagian masyarakat Indonesia masih
langgeng. Memanfaatkan idiom bu-
daya populer seperti media. Film *God
of Gamblers* yang terkenal di kalangan
masyarakat Indonesia seolah mem-
berikan legitimasi untuk mengubah
nasib melalui perjudian.

"Faktor mentalitas yang ingin menem-
puh jalan pintas. Jika mengubah nasib
dengan jalur rasional sudah tidak lagi

mengulas topik perjudian.

Bagong juga berpendapat, peta ja-
lan dalam memberantas judi masih
menjadi tantangan besar bagi pen-
egak hukum. Secara hukum, judi ter-
masuk tingkat kejahatan sekunder. Na-
mun, jika dilihat lebih mendalam, juga
sebagai salah satu sumber perilaku
kriminal lainnya.

"Ketika penjudi telah kehilangan se-
luruh kekayaan material, potensi untuk
menggunakan jalan kriminalitas tentu
semakin tinggi," kata Bagong.

Dia juga menilai, hukuman yang
dijatuhkan terhadap penjudi masih
belum bisa menyelesaikan masalah.
Ia mengatakan, dorongan adiktif judi
memerlukan rehabilitasi, khususnya
dengan pendekatan keluarga dan

bedaan judi online dengan game
online. Dengan begitu dapat meng-
hindari anak mereka ikut terjerat judi
online.

Presiden Asosiasi Game Indone-
sia, Cipto Adiguno, mengatakan, baik
judi online maupun game memiliki
penampilan luar yang sama. Namun,
pengguna masih bisa melihat per-
bedaan keduanya pada saat mengelu-
arkan mata uang.

"Pembeda utama antara judi dengan
game adalah fasilitas untuk mengelu-
arkan mata uang digital dalam game.
Misalnya koin atau diamond, menjadi
mata uang asli, misalnya rupiah, dolar,"
kata Cipto.

Dengan penampilan yang hampir
sama, Cipto meminta adanya pendaf-
taran bagi seluruh produk game. Jadi
isi semua game dapat diperiksa den-
gan teliti.

Cipto mengungkapkan pendaftaran
dapat melalui dua cara, yakni dengan
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)
atau lewat sistem rating game IGRS.
"Sudah, regulasinya (soal pendaftaran
produk game) sedang disusun dan/
atau direvisi," ungkapnya.

Slot berkedok game juga sempat di-
ungkapkan sejumlah artis yang ditud-
ing mempromosikan judi online.

Mereka menyatakan men-
gira yang dipromosikan
merupakan sebuah
game.

Salah satu yang
mengungkapkan
hal tersebut ada-
lah Sule. Dia men-
gaku tidak tahu
platform yang
dipromosikan mer-
upakan judi online.

"Ya nggak apa-apa.

Ya ada teman berarti, ya
kan. Kami juga sama-sama
nggak tahu (judi online), kan kita tahun
berapa itu sudah lama, saya 2018 ka-
lau nggak salah. Kan awalnya juga bu-
kau itu, ngomongnya game," ujar Sule.

Perwakilan manajemen Wulan Gurit-
no, Bucie Lee juga mengungkapkan
hal yang hampir sama. Dia mengata-
kan tidak curiga karena beberapa artis
mempromosikan platform serupa.

"Mbak Wulan merupakan korban ka-



mungkin, sehingga dia menempuh jalur
irasional berupa perjudian," ujarnya.

Bagong menambahkan, hadirnya
judi online memberikan pengaruh
masif karena pemain tidak dibatasi
wilayah dan dapat dilakukan den-
gan mudah lewat telepon genggam.
Tawaran nominal deposit akun judi
online tergolong rendah, sehingga
mudah dijangkau masyarakat miskin.
Modal seadanya ini justru semakin
mendorong masyarakat miskin me-
n coba segala cara untuk berjudi online.

"Judi online menawarkan media al-
ternatif untuk memotong kompas ke-
hidupan. Selalu muncul persepsi 'siapa
tahu rezeki' menjadikan adiktif dalam
berjudi," kata Bagong yang skripsinya

keagamaan.

Artinya, pen-
anganan berupa
community sup-
port system dari
lingkungan terdekat
cenderung lebih diden-
garkan oleh penjudi. Terlebih,
jika ada anggota yang memiliki kontrol
peran dalam keluarga. Maka dari itu,
keluarga perlu hadir untuk bisa mem-
berikan petunjuk bagi penjudi.

"Rangkaian dari orang terdekat ini
yang bisa membawa penjudi keluar
dari dampak kecanduannya," ujarnya.

Awes Game Online

Orang tua perlu mengetahui per-



rena dia mendapat informasi bahwa itu adalah game online yang dipromosikan oleh banyak sekali artis-artis besar lainnya," ungkapnya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Polri untuk memblokir situs game online yang mengandung unsur perjudian. Hal itu disampaikan Diyah untuk menyikapi fenomena maraknya anak usia pelajar yang bermain judi online berdasarkan hasil riset PPATK.

"Saya yakin sampai detik ini, pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo dan Polri bisa melakukan itu (blokir) terhadap situs-situs game online yang berunsur kekerasan dan judi itu seharusnya harus sudah diskriming," kata Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini, Minggu, 15 Oktober 2023.

Diyah mengatakan, pemblokiran terhadap situs-situs tersebut merupakan langkah tegas yang harus dilakukan pemerintah sebagai upaya memproteksi anak-anak dari pengaruh buruk judi online.

"Kemenkominfo dan kepolisian bisa mengerahkan cybercrime untuk bisa mendeteksi awal gejala-gejala seperti ini dari mana datangnya, saya yakin ya. Situs porno saja bisa dihapus, negara kita itu bisa," ujarnya.

Menurut Diyah, maraknya anak di bawah umur mengakses situs game online yang terafiliasi judi online didasari oleh rasa ingin tahu anak yang sangat tinggi. Anak yang telah menjadi korban judi online umumnya akan mengalami candu dan cenderung tidak mau berhenti untuk terus bermain. Rasa candu yang tinggi tersebut juga akan berdampak terhadap penurunan aktivitas fisik.

"Biasanya kalau sudah memasuki level yang tinggi pasti dia akan mencari tantangan-tantangan baru gitu ya. Nah, salah satunya ada taruhan ada unsur taruhannya kalau di judi online kan begitu," katanya.

Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 20, orang tua dan masyarakat juga memiliki peranan pent-

ing dalam melindungi anak, termasuk dari paparan game dan judi online. Orang tua wajib meningkatkan literasi digital agar tidak gagap terhadap perkembangan teknologi yang berubah cepat, sehingga bisa optimal dalam melakukan pengawasan kepada anak.

"KPAI juga akan melakukan pengawasan dan advokasi terhadap kasus-kasus seperti ini (judi online pada anak) tidak hanya di kota-kota besar, karena kasus ini sepertinya merata," kata dia.

Komisioner KPAI Sub Kluster: Anak Korban Cybercrime, Kawiyan, juga menyebut ada banyak anak yang terlibat dalam dunia judi online. Hal itu seiring dengan mewabahnya judi online secara umum di kalangan masyarakat.

Maraknya judi online tidak lepas dari banyaknya anak-anak yang menggunakan teknologi komunikasi yang ter-

sambung dengan internet.

Kawiyan mengatakan, seperti halnya dengan pornografi, jika anak-anak menggunakan gadget tanpa pengawasan dan tanpa dibekali dengan sikap positif, mereka akan dengan mudah bersentuhan atau mengakses situs-situs judi online.

"Anak-anak memang rentan menjadi sasaran atau korban judi online," kata dia.

Berdasarkan data KPAI Januari-Agustus 2023, jumlah pengaduan terkait cybercrime berada di lima besar kasus yang terjadi pada anak-anak, di bawah kekerasan seksual, kekerasan fisik/psikis, korban kekerasan lain-lain, dan anak berhadapan dengan hukum.

"Fenomena tersebut harus dihentikan. Anak-anak harus dikembalikan pada aktivitas yang sehat dan produktif," tegasnya.

Lebih lanjut, orang tua dan guru di sekolah harus mengarahkan dan melakukan pengawasan terhadap anak-anak dalam menggunakan gadget.

Penggunaan gadget dengan waktu terbatas dan dalam pengawasan wajib diterapkan untuk hal-hal positif, seperti mencari informasi yang menunjang pelajaran atau kehidupan, dan hiburan yang bermanfaat bagi anak. ●



LINGKARAN SETAN JUDI ONLINE DAN PINJOL ILEGAL

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut, berdasarkan pemantauan sementara, banyak masyarakat yang meminjam uang di platform pinjaman online atau pinjol ilegal untuk bermain judi online.

“Dari pantauan sementara kami, pinjol ilegal ini adalah adik kandung dari judi online. Setelah bermain judi online, kekurangan uang, dia pinjam di pinjol. Dapat uang dari pinjol, bermain judi lagi. Kalah lagi. Jadi, gali lubang, gali lubang lagi,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam Sesi Diskusi AFPI UMKM Digital Summit 2023 di Jakarta, Kamis, 21 September 2023.

Budi menyebut, Kementerian Kominfo pun berdiskusi dengan Otoritas

tuk judi slot online.

“Perlu adanya pengawasan agar sistem pembayaran tersebut tidak bisa dilakukan dengan baik oleh pelaku judi slot online,” ujar Budi Arie.

Kementerian akan mengirimkan surat kepada penyelenggara layanan telekomunikasi seluler dan Internet Service Provider (ISP) seperti Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo hingga Smartfren agar ikut memerangi judi slot online.

“Kami ingatkan kepada operator seluler, ISP, maupun stakeholders sek-

tuk mewaspadai lingkaran setan judi online sekaligus pinjol ilegal. Sebab, saat ini muncul kasus masyarakat memanfaatkan layanan pinjol untuk digunakan dalam judi online.

“Juga bagaimana memang saat ini banyak masyarakat yang menggunakan pinjaman online ini kemudian untuk bermain judi online. Makanya ini menjadi fokus kita bersama untuk memberantas,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam konferensi pers RDK Bulanan OJK September 2023, Senin, 9 Oktober 2023.

Wanita yang akrab disapa Kiki ini menegaskan, mengatasi lingkaran setan judi online dan pinjol ilegal akan menjadi fokus utama. Meskipun belum ada studi yang menyatakan adanya hubungan pinjol dan judi online, Kiki menuturkan laporan berkaitan hal tersebut sudah cukup banyak.

“Kami mengamati apa yang terjadi di masyarakat kita cukup banyak yang dilaporkan seperti ini,” ucap Kiki.

Kiki menambahkan, OJK dengan pihak terkait lainnya sudah melakukan pertemuan untuk membahas fenomena judi online dan pinjol ilegal. Dia menuturkan, Satgas yang sebelumnya hanya beranggotakan 12 kementerian dan lembaga akan bertambah menjadi 14 untuk memberantas aktivitas ilegal tersebut.

“Kami terus melakukan sosialisasi dan edukasi masif dan berkelanjutan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan pinjol ilegal. Apalagi untuk dijadikan judi online,” ujar Kiki.

Kiki memastikan, OJK juga akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi melalui berbagai cara. Selain itu juga berperan aktif sebagai narasumber di



Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi pinjol ilegal. “Kami harus mengantisipasi, karena ini betul-betul seperti rentenir dan lintah darat yang mencekik masyarakat,” ujarnya.

Budi juga sudah mengirimkan surat kepada Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar, untuk memblokir rekening yang terkait aktivitas judi dan perjudian online. Selanjutnya, Kementerian Kominfo berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) terkait sistem pembayaran yang disinyalir digunakan un-

tor komunikasi dan informatika untuk sama-sama berperang melawan judi slot online. Semua yang memfasilitasi judi online harus ditutup,” tegas Budi.

Dalam bidang penegakan hukum, Kementerian Kominfo berkoordinasi dengan Kepolisian. Kominfo telah mengeluarkan Instruksi Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2023 berisi langkah-langkah strategis dan terukur dalam menyapu bersih konten judi slot online di internet Indonesia.

OJK sendiri meminta masyarakat un-

berbagai acara seminar dan webinar yang untuk secara masif bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online dan pinjol ilegal.

OJK juga saat ini telah melakukan pemblokiran terhadap 1.700 rekening bank yang mempunyai keterkaitan dengan kasus judi online. Bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemblokiran tersebut dilakukan OJK sebagai bentuk pemberantasan judi online yang saat ini tengah menjamur di masyarakat.

"Ini hasil kerja sama dengan Kominfo. Kalau melihat data, jumlah rekening yang sudah diblokir sekitar 1.700-an dan ini masih terus berkembang sebetulnya," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.

Dian mengatakan, saat ini beberapa bank tengah membangun sebuah sistem yang mampu mendeteksi apakah suatu rekening tersebut berkaitan dengan bisnis judi online atau tidak. Oleh karena itu, OJK meminta kepada bank untuk segera melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menindaklanjuti status masing-masing rekening yang terkait dengan judi online, sehingga dapat dipastikan langkah yang harus dilakukan.

OJK juga tengah memantau iklan pinjol ilegal hingga influencer yang mempromosikan judi online. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Edi Setijawan, mengatakan ada tiga sektor pengawasan OJK, yakni pengawasan sektoral, pengawasan terintegrasi, dan pengawasan market conduct.

Khusus iklan fintech ilegal dan influencer, dia mengatakan pengawasannya berada di bawah tim market conduct OJK. Edi menyampaikan saat ini kedua fenomena tersebut tengah diawasi oleh tim market conduct OJK.

"Mereka (market conduct) sekarang sedang melakukan pemantauan mulai dari iklan-iklan di medsos. Mereka juga melakukan penelitian soal itu," ucap Edi di Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2023.

Edi mengatakan OJK tak segan-segan akan menegur pelaku fintech ilegal jika memang ditemukan adanya pelanggaran.

Sementara itu, Edi menyebut OJK juga tengah memantau influencer yang terlibat dalam aksi promosi judi online. Dia mengatakan pengawasan hal tersebut menjadi tugas tim market conduct OJK.

"Kami menyerahkan ke teman-teman market conduct. Kalau kami lebih ke arah prudential secara organisasi, lebih mendalam di sisi governance," ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR, Willy Aditya,

haan atau entitas hukum sudah terindikasi akan melakukan operasi judi online atau pinjaman online," ujar Wakil ketua Badan legislasi DPR itu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 16 Oktober 2023.

Hal lain yang disoroti Willy adalah perkembangan media penyebaran informasi dan promosi judi online dan pinjol. Menurutnya, segala media yang dipakai untuk menyebarkan informasi dan promosi judi online maupun pinjol perlu diberangus dan dilarang tayang sebagai bentuk pencegahan.

"Selain penegakan hukum, pencegahan penyebaran lebih lanjut adalah kunci dalam memerangi judi online ilegal. Pengawasan ketat terhadap kegiatan penyebaran konten dan promosi perjudian online perlu diterapkan," imbaunya.



mengapresiasi kinerja OJK yang telah melakukan pemblokiran terhadap 1.700 rekening bank yang memiliki keterkaitan dengan kasus judi online. Ia berharap langkah ini bisa terus berlanjut ke rekening pinjol ilegal. Sebab, menurutnya, dampak pinjol dan judi online sangat nyata di tengah masyarakat.

"Suksesnya pemblokiran rekening bank oleh OJK adalah hasil dari kerja sama yang efektif. Ini perlu dilakukan bahkan sejak awal sebuah perusa-

Politisi Fraksi Partai Nasdem ini juga mendorong pemerintah untuk tegas menindak promosi perjudian di dunia maya. Ia menegaskan bahwa upaya ini pun harus diiringi dengan edukasi publik tentang risiko terkait judi online.

"Perkembangan media digital yang demikian cepat ini perlu diantisipasi. Semua pihak yang terlibat dalam promosi dan penyebaran informasi judi online dan Pinjol harus ditindak tegas. Mau dia influencer, tokoh publik, atau siapapun yang dapat bayaran dari menyebarkan informasi dan promosi judi online dan pinjol harus ditindak," tegas Willy.

Willy juga mendorong OJK tak

• INFO KHUSUS

hanya memblokir rekening yang berafiliasi dengan judi online. Ia berharap OJK juga melakukan pengawasan dan pemblokiran terhadap aktivitas pinjol ilegal yang masih meresahkan masyarakat.

"OJK diharapkan lebih proaktif lagi menindak jasa keuangan ilegal dan meresahkan. Judi online dan pinjol ilegal ini sudah sangat meresahkan. Jangan hanya fokus pada penegakan hukumnya, tapi pengawasan dan pemblokiran rekening sejak awal," kata Willy.

Dia menaruh perhatian kepada sejumlah kasus kejahatan dan kemanusiaan akibat pinjol dan judi online. Seperti baru-baru ini, viral di media sosial seorang warga bunuh diri karena diduga terlilit hutang pinjol. Dalam narasi pada video itu disebut korban awalnya meminjam uang Rp9 juta, namun ia wajib mengembalikan Rp19 juta dalam kurun waktu yang singkat.

Melihat makin meningkatnya masalah sosial akibat pinjol dan judi online, Willy menilai pemerintah belum memperketat penegakan aturan hukum terhadap penyelenggara pinjol karena banyak dari mereka yang sangat membebankan peminjam. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah terkait cara penagihan dan biaya-biaya siluman.

Willy mendorong adanya revolusi digital perbankan untuk mengatasi fenomena ini. Keamanan, privasi dan keterpercayaan harus menjadi kunci kebijakan digitalisasi keuangan dan perbankan. Di samping itu, aturan hukum yang melindungi nasabah juga perlu diperkuat bersamaan dengan penguatan usaha keuangan digital.

Willy menilai selain faktor kebutuhan yang mendasak faktor lain yang menjadi penyebab banyaknya masyarakat beralih ke pinjol adalah karena masalah inklusi keuangan yang setengah hati. Masyarakat biasa masih kerap kesulitan mengakses keuangan dari lembaga formal, seperti perbankan dan

lembaga keuangan formal lainnya.

"Sehingga muncul pinjol ilegal yang menawarkan proses mudah, cepat, dan dalam jumlah besar yang berujung permasalahan sosial. Sehingga sekarang ini pinjol ilegal semakin banyak dan semakin tidak terawasi," paparnya.

Oleh karenanya, Willy mengingatkan agar pemerintah menggalakkan inklusi dan literasi keuangan kepada masyarakat. Ia menilai, rendahnya literasi dan inklusi keuangan menyebabkan individu maupun rumah tangga meminjam secara berlebihan kepada pinjol yang memiliki biaya kredit lebih tinggi.

"Akibatnya pinjol menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan utang rumah tangga di Indonesia. Ini kan sungguh di luar perkiraan kita semua," untk a p Willy.

Pemerhati sosial dari Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, mengatakan, ada dua

pangkal permasalahan dari maraknya perilaku judi online dan pinjol saat ini. Hal ini disebabkan literasi keuangan yang rendah dan literasi digital yang lemah di kalangan masyarakat.

"Pinjol diawali dengan merasa pendapatan yang dia miliki tak mencukupi kebutuhan dia. Padahal keputusan itu perlu diaudit dulu. Benar apa enggak cukup? Padahal ada orang yang dengan penghasilan sama bisa saja hidupnya baik tanpa terikat pinjol," kata Devie.

Pinjol, kata Devie, sebetulnya tidak masalah selama itu dilakukan dengan perencanaan yang matang. Namun, menjadi masalah saat keputusan memaknai jasa pinjol dilakukan tanpa perhitungan sama sekali.

"Yang jadi masalah adalah mereka enggak tahu bisa bayar atau enggak, tapi tetap pinjam dulu.

Padahal menurut sebuah penelitian, 60 persen dari uang pinjol itu digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif, cuma memenuhi gaya hidup," terang Devie.

Devie memandang, ada hubungan antara judi online dan maraknya pengguna jasa pinjol. Ia menyoroti bahwa orang sering lupa kalau judi online adalah bisnis ilegal yang dikemas menarik dengan model gamifikasi. Pengguna dibuat ter-

pikat dengan kemenangan di awal, sehingga harus berutang ke pinjol untuk menutupi utang di akhir.

"Orang sudah kalah dia bukan berhenti malah dia akan menutupi kekalahannya. Ini berkaitan dengan pinjol, dia optimis akan menang lagi dan lanjut terus main," tutur Devie. ●



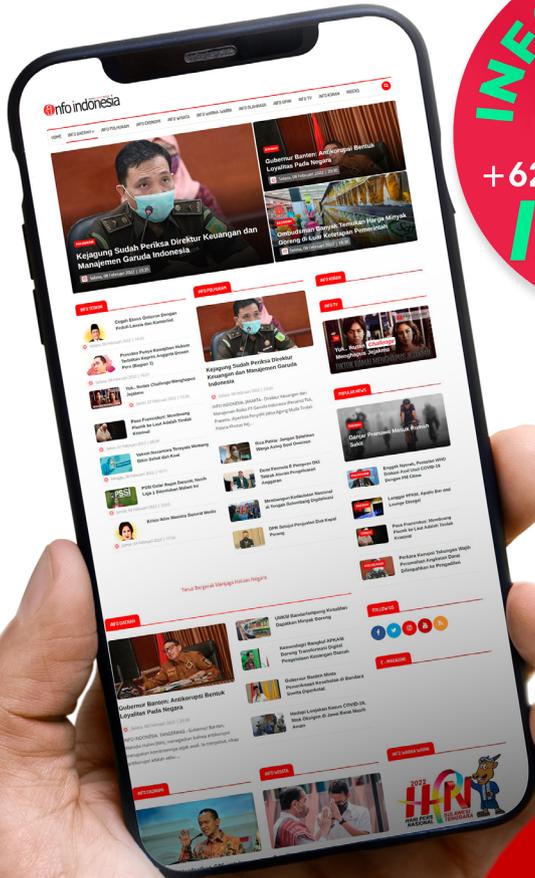


info indonesia Network

www.infoindonesia.id

INOVASI UNTUK NEGERI

INFO PASANG
ZULFAHMI
+62 813 8019 6507
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat Sumsel

Koran Cetak Info Indonesia



www.infoindonesia.id

facebook @infoindonesia.id twitter : @_infoindonesia

Instagram @info_indonesia.id YouTube : infoindonesiatv

JAKARTA
Jl. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id



info indonesia

iNOVASI UNTUK NEGERI

<https://infoindonesia.id>

EDISI #36 OKTOBER 2023

STRATEGI JOKOWI DI KOALISI INDONESIA MAJU

